



LOMPATAN STRATEGIS CHINA DALAM KOMUNIKASI GLOBAL

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau penransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

**Dani Fadillah
Kumajaya**



**LOMPATAN STRATEGIS CHINA
DALAM KOMUNIKASI GLOBAL**



Katalog dalam Terbitan (KDT)

Dani Fadillah dan Kumajaya

Lompatan Strategis China Dalam Komunikasi Global/ Dani Fadillah dan Kumajaya. Yogyakarta: Samudra Biru, 2017.

viii + 90 hlm. ; 16 x 24 cm

ISBN: 978-602-6295-32-3

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Mei 2017

Penulis	: Dani Fadillah dan Kumajaya
Editor	: Team Samudra Biru
Desain Sampul	: Roslani Husain
Layout	: Joko Riyanto

Diterbitkan oleh:

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email/FB : psambiru@gmail.com

website: www.cetakbuku.biz/www.samudrabiru.co.id

Phone: 0813-2752-4748

Untuk kalian yang mencintai bangsa ini atas nama Allah Ta'ala..
Untuk kalian yang senantiasa semangat berdiskusi..

"sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka"
QS, 13:11

PENGANTAR

Globalisasi adalah wacana yang sudah berkembang sejak tiga dasawarsa yang lalu, bahkan mungkin lebih. Para pemikir terkemuka seperti Samuel P Huntington, Francis Fukuyama, hingga Alvin Toefler telah banyak membahas globalisasi sejak pertengahan abad 20. Para tokoh tersebut bersama para akademisi sosial lainnya telah meramalkan akan tiba sebuah zaman dimana bangsa-bangsa di dunia akan bersaing tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. Bahkan sempat diramalkan oleh Toefler ketika zaman itu datang hanya organisasi/negara yang memiliki mental Komodo lah yang akan bertahan, bagi yang tidak bisa bertahan meski pun dia (organsiasi/negara) sebesar dinosaurus maka akan menemui kepunahan. Zaman itulah yang kita kenal dengan era globalisasi.

Memasuki abad ke-21 ramalan Huntington, Fukuyama, dan Toefler tentang Globalisasi tampaknya terbukti tepat, tidak hanya kedatangananya saja namun juga tentang fenomena, peluang dan ancaman yang ditawarkannya. Meminjam istilah yang digunakan oleh Thomas L Friedman pada tahun 2007 silam, globalisasi telah membuat bumi ini menjadi datar tanpa sekat ruang dan waktu, sehingga membuat siapa saja yang tidak siap dengan berbagai kemungkinan yang muncul akibat globalisasi akan tersingkir. Bahkan Alan Greenspan dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2008 menyebut abad 21 sebagai abad prahara karena akan ada kehancuran ekonomi dunia secara besar-besaran disebabkan banyak Negara di dunia yang tidak dapat dengan cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan. Melihat krisis ekonomi yang

melanda Eropa, Amerika, dan beberapa Negara Asia yang berimbas pada banyak pihak, yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir nampaknya apa yang dikhawatirkan oleh Greenspan benar-benar menjadi kenyataan. Intinya para pemikir dan akademisi dunia memiliki kesimpulan yang sama bahwa globalisasi hanya memberikan janji kenikmatannya pada mereka yang siap, sedangkan bagi mereka yang tidak siap cukuplah berpikir bagaimana agar tetap bisa melanjutkan hidup.

Kemudian muncul beberapa pertanyaan tentang bagaimana dengan Negara seperti Amerika Serikat (AS), sebagai Negara raksasa nampaknya mereka adalah salah satu Negara yang akan menikmati janji manis globalisasi. Tidak sedikit masyarakat dunia yang berkesimpulan seperti itu, namun ada beberapa pemikir dan *futurology* yang memiliki pandangan berbeda. Salah satu tokoh yang memiliki pandangan yang berbeda adalah Robyn Meredith, pada tahun 2008 dia mengeluarkan pendapatnya dalam sebuah buku yang berjudul *The Elephant and The Dragon* bahwa AS bukanlah satu-satunya Negara yang akan menikmati janji manis globalisasi namun ada lagi sebuah Negara dari kawasan Asia yang akan menikmati efek globalisasi, Negara itu adalah China.

Bahkan pada tahun 2010 dalam bukunya yang berjudul *China's Mega Trends*, John dan Dorris Naisbitt secara lebih terang-terangan menyebutkan bahwa China lah yang pada akhirnya menjadi satu-satunya Negara yang merasakan manisnya era global, di mana puncaknya akan terjadi pada tahun 2017 saat mereka (China) jauh meninggalkan AS pada tahun 2027, John Naisbit tidak secara sembarangan mengeluarkan pendapatnya, dia memandang bahwa China memiliki pilar-pilar pendukung yang tidak dimiliki oleh AS dan Negara-negara lainnya.

Singkat kata karena paparan para ahli itu lah penulis menggerakkan diri untuk menulis buku ini dengan harapan kita semua dapat segera sadar dan belajar dengan mengkaji langkah-langkah apa saja yang diambil oleh China, sebuah Negara yang didengung-dengungkan oleh para ahli akan muncul sebagai pemenang di era Global.

Penulis,

Daerah Istimewa Yogyakarta
Mei 2017 M / Sya'ban 1438 H

DAFTAR ISI

PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PROLOG	1
A. Pendahuluan	1
B. Kerangka Dasar Pemikiran.....	4
1. <i>State Capitalism</i>	4
2. Globalisasi	6
C. Hipotesa	10
BAB I KORPORATOKRASI	11
A. Dari Kapitalisme ke Globalisasi.....	11
B. Dari Globalisasi ke Korporatokrasi.....	13
1. Terminologi Korporatokrasi.....	18
2. Imperium Bisnis dan Eksploitasi Tanpa Batas.....	19
3. Bersatunya Penguasa dan Pengusaha.....	23
4. Kekuasaan yang Memudar (Redupnya Negara Bangsa).....	28
5. Konfrontasi Sengit dan Beberapa Tawaran Solusi	31
C. Dari Korporatokrasi ke Kosmokrasi?.....	35
BAB II PERKEMBANGAN GLOBALISASI DI DUNIA	41
A. Pengertian Globalisasi.....	41
B. Transformasi Dunia Global	43
1. Globalisasi di Eropa	43
2. Globalisasi di Asia	44
3. Globalisasi di Timur Tengah	46

BAB III POLITIK PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN	
CHINA	49
A. Sejarah Globalisasi di China.....	49
B. Politik Pemerintahan dan Kebijakan Ekonomi China	51
1. Era Mao Zedong : Revolusi Kebudayaan Proletar.....	53
2. Era Deng Xiaoping : <i>Gaige Kaifang</i> (Reformasi dan Keterbukaan).....	55
3. Era Jiang Zemin : <i>One China, Two Systems</i>	57
4. Era Hu Jintao : <i>Peace and Harmony</i>	58
 BAB IV GLOBALISASI BERPENGARUH PADA PENGUATAN	
SISTEM EKONOMI PASAR SOSIALIS DI CHINA	59
A. Integrasi China Dalam Ekonomi Internasional	59
B. Penguatan Sistem Ekonomi Pasar Sosialis	65
C. China Modern	72
 BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP	75
 INDEKS	77
DAFTAR PUSTAKA	83
TENTANG PENULIS	89

PROLOG

A. PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan sebuah fenomena yang kompleks dan dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi menyentuh ke dalam hampir semua aspek kehidupan manusia sehingga suatu definisi tunggal barangkali tidak akan mampu menggambarkan fenomena yang sangat kompleks ini. Lodge (1991) mendefinisikan globalisasi sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling berhubungan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan¹.

Globalisasi sebagai sebuah proses pengintegrasian dunia dan meleburnya batas-batas teritorial maupun kedaulatan negara telah membawa dampak perubahan yang sangat signifikan di seluruh negara di dunia, baik secara *kultural*, *politik*, *institusional*, maupun *ekonomi*. Secara *kultural*, Kuisel menyebut terjadinya imperialisme kultural di mana terjadi proses homogenisasi praktik-praktik kebudayaan tertentu (pada umumnya berasal dari negara Amerika Serikat) yang pada gilirannya menghilangkan praktik kebudayaan lokal².

Secara politik dan institusional, globalisasi juga membawa dampak pada proses homogenisasi bentuk-bentuk pemerintahan dunia. Salah satu contoh yang paling mudah adalah penyebaran model

1 Lihat, Winarno, Budi, 2004, *Globalisasi: Wujud Imperialisme Baru: Peran Negara dalam Pembangunan*, Tajidu Press, hal, 39.

2 Lihat, Kuisel, Richard, 1993, *Seducing the French: the Dilemma of Americanization*, Berkeley; University of California Press, hal. 22.

nation-state di seluruh dunia, dan munculnya bentuk isomorfis dari tata pemerintahan di seluruh dunia, atau dengan kata lain, tumbuhnya model tata pemerintahan di seluruh dunia yang kurang lebih sama. Salah satu pandangan yang ekstrim tentang homogenisasi dalam dunia politik adalah pemikiran Barber tentang McWorld, yaitu berkembangnya orientasi politik tunggal yang semakin pervasif di seluruh dunia³.

Pada level *ekonomi*, proses homogenisasi juga terjadi. Globalisasi pada level ini merupakan penyebaran ekonomi pasar ke seluruh kawasan dunia yang berbeda-beda. Joseph Stiglitz, seorang pemenang Nobel Ekonomi dan mantan dewan penasihat ekonomi Bank Dunia, mengeluarkan kecaman tajam kepada Bank Dunia, WTO, dan khususnya IMF karena peran mereka yang bukannya memperbaiki tapi malah memperburuk krisis ekonomi global. Di antara kritik tersebut, Stiglitz mengecam IMF karena menyamaratakan pendekatan *"one size fits all"* yang tidak mempertimbangkan perbedaan nasional⁴.

Tidak heran jika kemudian Giddens mengatakan bahwa, *"Globalisasi adalah restrukturisasi cara-cara kita menjalani hidup, dan dengan cara yang sangat mendalam. Ia berasal dari Barat, membawa jejak kekuasaan ekonomi dan politik Amerika..."*⁵

Proses homogenisasi yang dibawa oleh globalisasi ini telah membawa perubahan ekonomi yang sangat signifikan di negara-negara yang dahulunya bukan negara demokratis dan menutup diri dari globalisasi. Perubahan tersebut dapat dirasakan dan dibuktikan secara empiris di negara China. China yang pada masa Mao Zhedong merupakan negara sosialis yang menutup diri dari arus besar ekonomi dunia, kini perekonomiannya semakin terintegrasi dengan ekonomi dunia. Bahkan China sekarang telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru dunia selain India. Hal ini dibuktikan, salah satunya dengan meningkatnya *Gross Domestic Product* (GDP) China pada tahun 2010 yang mencapai angka \$1.337 Triliun, jauh lebih besar daripada GDP Jepang yang hanya mencapai \$1.288 Triliun, di samping itu apabila pemerintah China dapat mempertahankan angka tersebut, maka bukan hal yang mustahil perekonomian China akan mampu menggeser perekonomian Amerika Serikat dan menjadi negara yang memiliki perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2027⁶.

3 Lihat, Barber, Benjamin, 1995, *Jihad vs. McWorld*, New York; Times Books.

4 Lihat, Stiglitz, Joseph, 2002, *Globalization and its Discontents*, New York; W.W. Norton, hal. 23-25.

5 Lihat, Giddens, Anthony, 2000, *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives*, New York; Routledge, hal. 34.

6 Jim O'Neill, *China Overtakes Japan as World's Second Biggest Economy*, diunduh pada 20 Februari 2011, <<http://www.bloomberg.com/news/2010-08-16/china-economy-passes-japan-s-in-second-quarter->

Proses pertumbuhan ekonomi di China rupanya mengambil jalannya sendiri, tidak dilakukan secara gegabah meniru sepenuhnya model kapitalisme Barat. Negara tetap memegang kendali secara solid, tetapi ruang gerak masyarakat untuk berusaha justru didorong dengan kebijakan desentralisasi daerah. Individu dan masyarakat didorong untuk mengembangkan perekonomian rakyat. Industri-industri besar di daerah pusat kota dikontrol untuk merambat secara perlahan sehingga konflik yang terjadi antara industri makro yang berada di pusat-pusat kota dengan industri mikro yang berada di daerah pedesaan bisa diminimalisir. Mesin produktivitas China saat ini adalah buruh yang murah, inovasi, dan menggeliatnya kapitalisme dengan pangsa pasar yang sangat besar.

Selain itu, pengaruh dari kapitalisme barat juga akan memunculkan kekhawatiran baru dari masyarakat kelas buruh dan petani di China. Pada awalnya kapitalisme barat telah menjadi momok yang cukup menakutkan. Misalnya dengan masuknya para pemilik modal asing ke wilayah-wilayah industri China, maka apakah hak-hak istimewa yang selama ini diberikan kepada kaum buruh oleh pemerintah China akan lenyap. Hal ini dikarenakan adanya privatisasi industri-industri di China oleh para pemilik modal dalam hal ini perusahaan-perusahaan asing. Adanya privatisasi itu kemudian akan berakibat pada pemutusan sepihak terkait masalah upah, jaminan kesejahteraan, dan kontrak antara pemilik modal dan kaum buruh di China. Meluasnya pengaruh kapitalisme barat akibat dari adanya globalisasi membuat pemerintah China berupaya untuk memanfaatkan fenomena ini menjadi sebuah senjata yang sangat ampuh dalam sistem perekonomian China.

Selain pertumbuhan kelas menengah hasil dibukanya keran perekonomian China, menguatnya masyarakat sipil di China juga dipengaruhi oleh terbukanya akses informasi hasil dari perkembangan teknologi. Peristiwa di lapangan Tiananmen pada tahun 1989 menunjukkan bahwa mahasiswa di China telah menjadi kritis terhadap pemerintah China karena terbukanya akses informasi bagi mereka. Perkembangan semakin menguatnya masyarakat sipil ini juga telah diteliti oleh David Kelly dalam jurnal *Pacific Affairs*⁷.

Di samping itu, ditutupnya layanan Google Mail oleh pemerintah China beberapa waktu yang lalu juga menunjukkan kekhawatiran pemerintah China atas penguasaan industri elektronik dan informatika

capping-three-decade-rise.html>.

⁷ Kelly, David, *Public Intellectuals and Citizen Movements in China in the Hu-Wen Era*, *Pacific Affairs* Vol. 79, no. 2, Summer 2006.

yang dapat menjatuhkan produk-produk media China sehingga menyebabkan layanan mail dan jejaring sosial di China menjadi kurang populer dan tidak dipandang sebelah mata oleh rakyat China. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan adanya indikasi bahwa pemerintah China tidak ingin kehilangan salah satu pun sektor pasar yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomiannya, yaitu elektronik dan teknologi informasi. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi di dalam era globalisasi saat ini, bahwa kunci yang terpenting untuk menguasai perekonomian dunia adalah dengan menguasai teknologi informasi.

Lalu bagaimana hubungan antara globalisasi dan penguatan sistem ekonomi pasar sosialis di China ini? Bagaimana globalisasi mempengaruhi perekonomian China?

B. Kerangka Dasar Pemikiran

Ada beberapa konsep dan teori yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini. Konsep yang akan digunakan adalah konsep kapitalisme negara dengan sedikit tambahan teori tentang kemunculannya. Sedangkan teori yang akan digunakan adalah teori tentang globalisasi.

1. State Capitalism

Sistem ekonomi kapitalis merupakan sebuah sistem mengenai adanya kebebasan baik untuk produsen maupun konsumen untuk melakukan aktivitas usaha, dimana tidak adanya intervensi dari pemerintah untuk mempengaruhi mekanisme pasar⁸. Dalam sistem ekonomi pasar, hal-hal mengenai mekanisme pengaturan harga diserahkan oleh pasar, yang pada dasarnya bergantung pada ketentuan penawaran dan permintaan. Umumnya sistem ekonomi pasar telah diterapkan oleh negara-negara maju, yaitu negara-negara Barat. Sebagai contohnya seperti negara Amerika Serikat dan negara-negara anggota Uni Eropa. Konsep dari ekonomi liberal adalah dengan tujuan supaya pasar berjalan kearah suatu sistem ekonomi pasar bebas dan menerima perdagangan bebas. Sistem ekonomi kapitalis ini diperkenalkan oleh Adam Smith, seorang tokoh ekonomi liberal klasik. Demi terwujudnya sebuah kesejahteraan umum, maka kemudian terlahirlah sebuah sistem baru yang dipengaruhi oleh pemikiran Friedrich List yaitu *state capitalism*.

⁸ *The Concise Encyclopedia of Economics*, diunduh pada 23 April 2017, <<http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Smith.html>>

Kapitalisme negara atau *state capitalism* memiliki berbagai makna, akan tetapi biasanya digambarkan sebagai kegiatan ekonomi secara komersial (*profit-seeking*) yang dilakukan oleh negara melalui tenaga-tenaga manajemen produktif dengan cara-cara kapitalis⁹. Keberadaan *state capitalism* di dalam sebuah negara ditandai dengan adanya dominasi dari sebuah perusahaan besar milik negara atau BUMN yang melakukan aktivitas monopoli usaha atas izin dari pemerintah. Dari sisi ini pemerintah bertindak sebagai kontrol terhadap perusahaan-perusahaan dan secara efektif bertindak sebagai kapitalis besar serta pemegang saham itu sendiri. Sistem ini juga merujuk pada suatu sistem ekonomi dimana alat-alat produksi dimiliki secara pribadi oleh perusahaan, negara juga dapat mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga perekonomian negara semakin kuat ditambah dengan upah buruh yang begitu rendah menjadi keuntungan utama dari sistem *state capitalism*. Disamping itu, negara memiliki peran sebagai kontrol makro atas alokasi kredit dan investasi yang dilakukan oleh para pemilik modal. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kapitalisme negara bisa digunakan sebagai landasan untuk menggambarkan sebuah sistem, dimana campur tangan negara dalam perekonomian nasional cukup memiliki andil yang besar dalam mengupayakan perlindungan dan memajukan kepentingan ekonomi nasional dan berskala internasional.

Konsep dari kapitalisme nasional tersebut kemudian dianggap sangat bertentangan dan berbeda dengan cita-cita sosialisme dan liberal kapitalisme. Sebagai contoh misalnya, dalam konsep ekonomi pasar liberal, terdapat tiga prinsip yang menjadi poin utama, yaitu ; *pertama* adanya prinsip individualitas, yang bertujuan untuk menciptakan kebebasan individu dalam hal perdagangan. *Kedua* adalah terdapat prinsip solidaritas, di mana mengacu pada ide setiap individu manusia terlekat dengan masyarakat yang tidak terpisahkan, saling tergantung satu sama lain dengan tujuan menghapus ketidakadilan. *Ketiga* yaitu, prinsip subsidiaritas yang berarti sebuah tugas institusional yang bertujuan untuk saling mempererat hubungan antara prinsip individualitas dan prinsip solidaritas. Aturan tersebut harus memberikan jaminan kepada masing-masing hak individu dan memposisikannya sebagai prioritas utama, yang kemudian dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu, selama masih mampu ditangani secara individu, tidak boleh ada intervensi dari negara¹⁰. Sedangkan

9 George Friedrich List, *National Economy*, diunduh pada 23 April 2017, <<http://www.fordham.edu/halsall/mod/1856list.asp>>

10 Lihat, Kardiman, Drs dkk, 2006, *Ekonomi Dunia Keseharian Kita*, Yudistira, hal, 80

dalam konsep *state capitalism* dikatakan bahwa negara memiliki peran sebagai kontrol investasi dan juga sekaligus sebagai pemilik saham, dalam artian negara bisa memonopoli keuntungan dari aktifitas bisnis.

Oleh karena itu, penerapan dari *state capitalism* bisa terjadi di negara-negara sosialis yang masih dipimpin oleh rezim otoriter seperti China dan Rusia¹¹. Negara-negara yang menganut sistem kapitalisme negara memiliki wewenang untuk mengontrol investasi asing yang akan melakukan aktifitas bisnis di wilayah mereka sehingga negara masih memiliki peran untuk memonopoli aktifitas usaha.

2. Globalisasi

Menurut David Held, globalisasi merupakan sebuah peristiwa *interconnectivity*, dimana adanya keterkaitan antara masyarakat satu dengan yang lain sehingga menciptakan sebuah proses pengintegrasian dunia yang melebur melampaui batas-batas wilayah kedaulatan suatu negara¹². Dari proses pengintegrasian itu kemudian berpengaruh pada aspek-aspek semacam ekonomi, budaya, teknologi, politik dan institusional.

Globalisasi dari sisi ekonomi misalnya, adalah suatu perubahan di dalam perekonomian dunia, yang bersifat mendasar atau struktural dan akan berlangsung terus dalam laju yang semakin pesat, mengikuti kemajuan teknologi yang juga prosesnya semakin cepat¹³. Perkembangan ini telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan dan juga mempertajam persaingan antar negara, tidak hanya dalam perdagangan internasional tetapi juga dalam kegiatan investasi, finansial dan produksi. Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional, tetapi semakin mengglobal menjadi "satu" proses yang melibatkan banyak negara. Dalam tingkat globalisasi yang optimal arus produk dan faktor-faktor produksi lintas negara atau regional akan selancar lintas kota di suatu negara atau desa di dalam suatu kecamatan. Pada tingkat ini, seorang pengusaha yang punya pabrik di Kalimantan Barat setiap saat bisa memindahkan usahanya ke Serawak atau Filipina tanpa ada halangan, baik halangan logistik maupun halangan birokrasi dari pihak pemerintah Malaysia atau

11 Peter Binns, *State Capitalism*, diunduh pada 23 April 2017, <[http:// www.marxists.de/statecap/binns/statecap.htm](http://www.marxists.de/statecap/binns/statecap.htm)>

12 Lihat, Held, David, et al., 1999, *Global Transformation*, Stanford; Stanford University Press, hal, 16.

13 Lihat, Winarno, Budi, 2004, *Globalisasi: Wujud Imperialisme Baru: Peran Negara dalam Pembangunan*, Tajidu Press, hal, 39.

Filipina maupun dari pemerintah Indonesia dalam urusan administrasi seperti izin dan sebagainya.

Semakin menipisnya batas-batas kegiatan ekonomi secara nasional maupun regional disebabkan oleh banyak hal, di antaranya menurut Halwani (2002) adalah komunikasi dan transportasi yang semakin canggih dan murah, lalu lintas devisa yang semakin bebas, ekonomi negara yang semakin terbuka, penggunaan secara penuh keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif tiap-tiap negara, metode produksi dan perakitan dengan organisasi manajemen yang semakin efisien, dan semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional di hampir seantero dunia. Selain itu, penyebab-penyebab lainnya adalah semakin banyaknya industri yang bersifat *footloose* akibat kemajuan teknologi (yang mengurangi pemakaian sumber daya alam), semakin tingginya pendapatan rata-rata per kapita, semakin majunya tingkat pendidikan masyarakat dunia, ilmu pengetahuan dan teknologi di semua bidang, dan semakin banyaknya jumlah penduduk dunia.

Secara optimis, globalisasi membuka peluang munculnya hal-hal yang positif. *Pertama*, produksi global dapat ditingkatkan. Pandangan ini sesuai dengan teori 'Keuntungan Komparatif' dari David Ricardo. Melalui spesialisasi dan perdagangan faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan dengan lebih efisien, output dunia bertambah dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan dalam bentuk pendapatan yang meningkat, yang selanjutnya dapat meningkatkan pembelanjaan dan tabungan. *Kedua*, globalisasi dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Hal ini menyebabkan konsumen mempunyai pilihan barang yang lebih banyak. Selain itu, konsumen juga dapat menikmati barang yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah.

Ketiga, globalisasi dapat meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang jauh lebih luas dari pasar dalam negeri. *Keempat*, suatu negara dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Modal dapat diperoleh dari investasi asing dan terutama dinikmati oleh negara-negara berkembang karena masalah kekurangan modal dan tenaga ahli serta tenaga terdidik yang berpengalaman kebanyakan dihadapi oleh negara-

negara berkembang. *Kelima*, globalisasi menyediakan peluang bagi suatu negara untuk mendapat dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Pembangunan sektor industri dan berbagai sektor lainnya bukan saja dikembangkan oleh perusahaan asing, tetapi utamanya melalui investasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta domestik. Perusahaan domestik ini seringkali memerlukan modal dari bank atau pasar saham, dana dari luar negeri terutama dari negara-negara maju yang memasuki pasar uang dan pasar modal di dalam negeri dapat membantu menyediakan modal yang dibutuhkan tersebut.

Sedangkan globalisasi dari segi informasi telah dijelaskan oleh Manuel Castell dalam bukunya yang berjudul *The Rise of Network Society*, dimana dia berpendapat bahwa abad di mana kita sekarang hidup di dalamnya adalah abad informasi (*Informational Age*)¹⁴. Dia menyebut bahwa globalisasi dan perkembangan teknologi telah membawa perubahan pada persebaran informasi bagi penduduk dunia. Semakin meratanya persebaran informasi ini mempengaruhi pula kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Semakin tinggi tingkat keterserapan informasi bagi suatu masyarakat, semakin tinggi pula kemungkinan bagi mereka untuk mengalami mobilitas sosial.

Dalam abad informasi ini, Castells menandai adanya fenomena baru yang dinamainya masyarakat jaringan. Inilah masyarakat di mana fungsi dan proses dominan ditata sekitar jaringan—bisa internet, intranet, jaringan kerjasama berbagai perusahaan, organisasi, negara, hingga jaringan pergaulan. Logika jaringan menentukan dan memodifikasi morfologi sosial, proses produksi, kekuasaan, budaya dan pengalaman keseharian.

Bangkitnya masyarakat jaringan dipicu dan dipacu oleh revolusi teknologi informasi yang diawali dengan teknologi rekayasa mikro: elektronika, komputer dan telekomunikasi. Revolusi teknologi ini mempengaruhi masyarakat dan pola-pola relasi di dalamnya.

Sementara inti globalisasi menurut Castell adalah proses ekonomi. Untuk pertama kalinya sebuah sistem ekonomi—yaitu kapitalisme informasional global—menguasai hampir seluruh planet. Bentuk ekonomi jelas kapitalisme, karena modal memegang peran utama; dan informasional dalam arti sumber-sumber produksi dan kompetisi tergantung pada pengetahuan, informasi dan teknologi. Sifat globalnya menyangkut kapasitas untuk bekerja sebagai satu unit serentak dalam

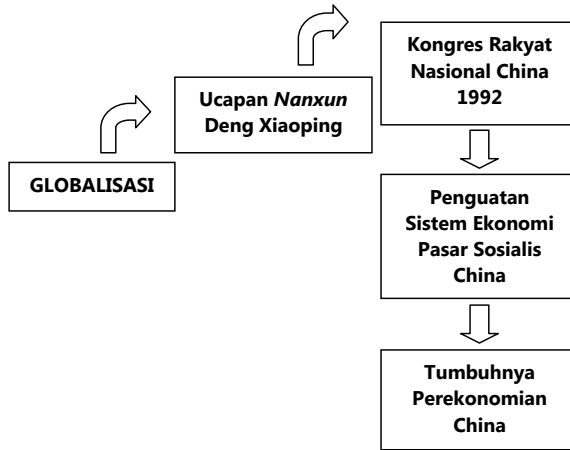
14 Castell, Manuel, *The Information Age: Economy, Society and Culture*, Oxford; Blackwell. Terdiri dari tiga volume. Volume I: *The Rise of the Network Society* (1996). Volume II: *The Power of Identity* (1997). Volume III: *End of Millennium* (1998)

skala planet.

Yang terjadi sekarang adalah integrasi berbagai media komunikasi dalam jaringan interaktif, hypertext dan meta-language yang dapat dipilih-pilih sesuai kemauan pemirsa. Banyaknya stasiun televisi, radio, surat kabar dan majalah, belum lagi situs internet dan berjenis-jenis multimedia menimbulkan kombinasi terpaan media yang sangat beragam antar rumah tangga, bahkan antar individu dalam satu rumah.

Dalam masyarakat jaringan dengan jarak ruang dan waktu makin kabur. Masyarakat dapat melakukan transaksi jual-beli dalam waktu yang relative singkat, aman, dan efisien melalui perkembangan dunia maya. Bahkan berbagai macam transaksi ekonomi bisa dilakukan tanpa melanggar batas suatu negara dan hal itu menjadi sesuatu yang legal tanpa melanggar hukum. Selain itu, munculnya gerakan-gerakan sosial politik dan budaya yang bermunculan pada 1980-1990an menurut Castell merupakan wujud kebutuhan manusia era informasi akan identitas dan akar tempatnya berasal. Ia memetakan gerakan-gerakan sosial, politik, lingkungan hidup, feminisme hingga religius secara sistematis, dihubungkan dengan relasi-relasi kekuasaan dalam pembentukan identitas. Ia mengkategorikan tiga macam identitas. Pertama, identitas resmi atau terlegitimasi (*legitimizing identity*) yang diperkenalkan oleh institusi-institusi dominan masyarakat. Kedua, identitas pembangkang (*resistance identity*) yang dimulai oleh aktor-aktor sosial dalam posisi direndahkan atau distigmatisasi oleh institusi dominan. Ketiga, identitas yang dicita-citakan (*project identity*), yaitu identitas baru yang (ingin) dibangun untuk mentransformasi seluruh struktur sosial.

Tabel 1.1, Gambaran bagaimana pengaruh globalisasi terhadap penguatan sistem ekonomi pasar sosialis di China bisa digambarkan sebagai berikut;



3. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menduga bahwa globalisasi telah membuat perekonomian China semakin terintegrasi dengan perekonomian dunia serta menguatnya sistem ekonomi pasar sosialis di China. Jangkauan pembahasan dalam buku ini dimulai dari China pada masa pemerintahan Deng Xiaoping (1978) sampai China pada masa sekarang (2017). Dipilihnya China pada masa Deng Xiaoping sebagai titik awal terjadi karena pada masa itulah perekonomian China mulai membuka diri terhadap globalisasi.



BAB I

KORPORATOKRASI

A. Dari Kapitalisme Ke Globalisasi¹

Keluarnya Amerika sebagai pemenang dalam Perang Dingin melawan Uni Soviet membuat rivalitas ideologi menjadi hilang. Tak ada lagi tarik-menarik antar adidaya karena Amerika telah menjadi penguasa tunggal di dunia ini. Peristiwa ini sering disebut juga akhir dari sejarah karena berarti menangnya Kapitalisme dan runtuhnya Sosialisme.

Francis Fukuyama mengatakan dalam artikelnya yang terkenal itu: "Barangkali, yang kita saksikan bukanlah sekedar akhir perang dingin, atau bergulirnya periode tertentu dari sejarah paska perang; melainkan akhir sejarah: yakni titik akhir dari evolusi ideologi umat manusia dan makin universalnya demokrasi liberal Barat sebagai bentuk final pemerintahan umat manusia."²

Namun, pendapat ini tidak serta merta diamini setiap pengamat Barat. "Akhir Perang Dingin tidak berarti akhir persaingan ideologi, diplomatik, ekonomi, teknologi atau bahkan militer diantara negara-negara. Hal ini tidak berarti akhir dari perebutan kekuasaan dan pengaruh. Hal ini sangat mungkin berarti meningkatnya instabilitas, ketidakpastian dan kekerasan dalam persoalan-persoalan internasional.

1 Judul sub-bab ini saya ambil dari judul kata pengantar yang ditulis oleh Rizal Mallarangeng dengan judul yang sama - untuk buku karya Martin Wolf (*Why Globalization Work*) - yang diterjemahkan ke edisi Indonesia menjadi *Globalisasi: Jalan Menuju Kesejahteraan*. Selain itu, sub-bab ini juga terinspirasi dari kata pengantar tersebut.

2 Francis Fukuyama, *Akhir Sejarah?*, dalam *Amerika dan Dunia*, alih bahasa Yusi A.Pareanom dan A.Zaim Rofiqi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm.2.

Hal ini bisa berarti akhir dari perdamaian panjang.”³ Begitulah menurut Samuel P. Huntington.

Bersamaan dengan hal itu, berkembangnya teknologi informasi, komunikasi, transportasi yang dibarengi dengan menguatnya arus modal atau investasi ke seluruh negara-negara di dunia ini – terutama negara berkembang-sebagai akibat menangnya Kapitalisme atas Sosialisme membuat globalisasi seakan tak terelakkan bagi negara manapun. Beberapa orang berpendapat, Globalisasi tak terelakkan lagi, sehingga siapapun harus menerimanya berikut segala kekurangannya.⁴

Globalisasi menempati titik sentral dalam berbagai agenda intelektual dan politik yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan krusial tentang apa yang oleh banyak orang dipandang fundamental dan dinamis pada zaman kita ini, yakni sebuah epos perubahan yang menentukan dan secara radikal sedang mentransformasikan hubungan-hubungan dan lembaga-lembaga ekonomi dan sosial pada abad ke-21.⁵

Bagi banyak pendukungnya, ia adalah kekuatan tak tertahankan yang diinginkan yang menyapu batas-batas, menjungkalkan pemerintahan-pemerintah despot, memperlemah pemajakan, membebaskan individu dan memperkaya apa saja yang disentuhnya. Bagi banyak penentangannya, ia juga kekuatan tak tertahankan, tapi tidak diinginkan. Dengan embel-embel “neoliberal” atau “korporasi”, globalisasi dikutuk sebagai kekuatan jahat yang memiskinkan massa, menghancurkan budaya, memperlemah demokrasi, memaksakan Amerikanisasi, membasmi negara kesejahteraan, menghancurkan lingkungan hidup dan memuja keserakahan.⁶

Dalam pandangan ekonomi dan politik, kepentingan globalisasi adalah sebuah proses sistematis untuk merombak struktur perekonomian negara-negara miskin, terutama berupa pengkerdilan peran negara dan peningkatan peran pasar, sehingga memudahkan pengintegrasian perekonomian negara-negara miskin itu ke dalam genggamannya para pemodal negara-negara kaya.⁷ Tak heran jika globalisasi disebut juga

3 Samuel P.Huntington, *Tak Ada Jalan Keluar: Kesalahan-kesalahan Endisme*, dalam Amerika dan Dunia, alih bahasa Yusi A.Pareanom dan A.Zaim Rofiqi, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,2005),hlm.42.

4 Joseph E.Stiglitz, *Making Globalization Work*, alih bahasa Edrijani Azwardi, (Bandung: Mizan, 2007), hlm.74.

5 James Petras dan Henry Veltmeyer, *Imperialisme Abad 21*, alih bahasa Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), hlm.7.

6 Martin Wolf, *Globalisasi: Jalan Menuju Kesejahteraan*, alih bahasa Samsudin Berlian, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2007), hlm.15.

7 Soepriyatno, *Nasionalisme dan Kebangkitan Ekonomi*,(Jakarta: Inside Press,2008),hlm.15.

sebagai Imperialisme.⁸

B. Dari Globalisasi Ke Korporatokrasi

Bahkan negara-negara paling maju dan paling mampu memenuhi kebutuhan sendiri tidak bisa lagi berpura-pura berdaulat penuh.⁹ Kata-kata tersebut mungkin sangat tepat untuk menggambarkan bagaimana globalisasi sungguh-sungguh telah mengikis batas-batas yang dibuat oleh manusia, terutama batas wilayah. Tapi ada satu perbedaan mendasar antara negara maju dan negara berkembang dalam konteks globalisasi, seperti dikatakan Joseph Stiglitz:

Aturan permainan secara luas telah ditetapkan oleh negara-negara industri maju – dan biasanya ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu – dan, tak perlu heran, mereka telah membentuk globalisasi demi mengembangkan kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak berupaya menciptakan aturan-aturan yang adil dan berimbang, bahkan menghambat aturan-aturan yang akan menguntungkan negara-negara berkembang yang berpotensi untuk maju.¹⁰

Dalam konteks yang tidak terlalu ekstrem, yakni dari sisi teknologi, globalisasi merupakan revolusi teknologi, transportasi, informatika serta komunikasi yang bersifat dinamis atau merupakan proses yang berkesinambungan. Apabila dari sisi teknologi dapat di ringkas dengan satu kata sekaligus, yaitu jaringan (*networking*), maka dari sisi sosiologis politik, globalisasi dunia dapat dimaknakan sebagai pengintegrasian dunia dalam satu kesatuan jalinan, hubungan, ancaman dan peluang melalui penguasaan teknologi informasi di mana ideologi atau paham dihubungkannya.¹¹

Seiring makin berkuasanya negara-negara maju atas negara-negara berkembang di era globalisasi, ada satu fenomena yang menarik untuk di cermati, yakni berubahnya perusahaan multinasional (MNC) menjadi perusahaan transnasional (TNC) sebagai pelaku utama dalam ekonomi dunia.¹² Adapun ciri TNC adalah murni modal yang bebas mengalir ke mana saja, tanpa kedudukan nasional, dengan perangkat manajemen internasional dan bersedia beroperasi di mana saja atau

8 Lihat James Petras dan Henry Veltmeyer, *Imperialisme Abad 21*, hlm.9.

9 Benjamin R.Barber, *Jihad Vs McWorld: Globalisme dan Tribalisme Baru Dunia*, alih bahasa Achmad Kahfi dan Ira Puspito Rini, (Surabaya: Ikon Teralitera,2003), 14.

10 Joseph E. Stiglitz, *Making Globalization Work*, hlm.51.

11 Firdaus Syam., *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta, PT.Bumi Aksara,2007),hlm.360.

12 Paul Hirts dan Grahame Thompson, *Globalisasi Adalah Mitos*, alih bahasa P.Soemitro, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2001),hlm. 19.

pindah ke lokasi mana saja di dunia untuk meraih laba yang paling aman atau yang sebesar-besarnya¹³.

Ini diakibatkan oleh investasi langsung asing sebagai akibat mengglobalnya sistem ekonomi pasar seiring makin kuatnya globalisasi. Ekonomi pasar adalah sebuah sistem ekonomi yang dikendalikan, diatur, dan diarahkan oleh pasar sendiri; tatanan produksi dan distribusi barang-barang dipercayakan kepada mekanisme swatata tersebut.¹⁴ Oleh karena yang berkembang adalah ekonomi pasar dan dunia ini dianggap sebagai sebuah pasar maka gagasan yang terbentuk adalah jika dunia hendak bergerak menuju sebuah pasar yang besar, maka korporasi sebaiknya dibangun sebesar-besarnya. Jika tidak, maka korporasi tersebut tidak akan dapat mengapung atau menciptakan gelombang di lautan luas tanpa tepi.¹⁵

Oleh karena itu tak heran jika menurut beberapa penulis, beberapa *Multi National Corporation* (MNC) telah berubah menjadi *Trans National Corporation* (TNC). Walaupun beberapa penulis tidak membedakan dengan jelas antara perusahaan transnasional dengan perusahaan multinasional.¹⁶ Pergeseran ke arah ini, yakni dari perusahaan-perusahaan multi nasional (MNC) menjadi perusahaan transnasional (TNC) memunculkan fenomena baru yang sering dikenal sebagai *footloose industry* (industri alas kaki). Perusahaan-perusahaan seperti ini biasanya mempunyai kemampuan memindahkan perusahaan dari satu negara ke negara yang lain. Proses ini sangat dipengaruhi oleh iklim investasi yang dianggap paling menguntungkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dan tersedianya pasar-pasar lokal.¹⁷

Meskipun begitu, ada yang berpendapat bahwa klaim globalisasi telah menghasilkan kemenangan bagi perusahaan besar dianggap hanyalah mitos.¹⁸ Karena dalam banyak hal globalisasi justru mengurangi kekuatan perusahaan-perusahaan besar. Memang, perusahaan besar yang dianak emaskan suatu bangsa bisa dengan mudah menggapaikan tentakel mereka ke seluruh dunia, tapi mereka cenderung berhadapan dengan raksasa lain yang juga sedang meluncurkan tentakel elastis

13 *Ibid.*.

14 Karl Polanyi, *Transformasi Besar: Asal-Usul Politik dan Ekonomi Zaman Sekarang*, alih bahasa M. Taufiq Rahman, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 92.

15 John Ralston Saul, *Runtuhnya Globalisme dan Penemuan Kembali Dunia*, alih bahasa Dariyatno, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 144.

16 Budi Winarno, *Pertarungan Negara Vs Pasar*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), hlm. 104.

17 *Ibid.*, hlm. 105.

18 Lihat John Micklethwait dan Adrian Wooldridge, *Masa Depan Sempurna: Tantangan dan Janji Globalisasi*, alih bahasa Samsudin Berlian, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 175.

mereka ke mana-mana.¹⁹

Perusahaan-perusahaan transnasional modern dalam usahanya mencari pasar-pasar global tidak bisa menggunakan “kebijakan luar negeri” karena kata luar negeri tidak ada artinya bagi pelaku bisnis global yang ambisius.²⁰ Bagi mereka, dunia ini hanyalah satu, tidak ada yang lain, yakni pasar itu sendiri. Ini pun karena globalisasi.

Paling tidak ada dua pandangan terhadap keberadaan perusahaan multinasional, yakni kelompok pendukung dan kelompok penentang. Bagi kelompok yang mendukung, MNC mendatangkan keuntungan bagi ekonomi-ekonomi industri maju dan seperti itu juga ekonomi industri-industri baru, meningkatkan penggunaan sumber-sumber daya dunia secara efisien dan produktif. Dengan demikian, MNC meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kemakmuran dunia. MNC merupakan pula sumber utama modal, teknologi dan akses pasar bagi hampir setiap negara.²¹

Sedangkan bagi kelompok penentang, MNC dianggap menggerogoti demokrasi, merugikan masyarakat-masyarakat nasional, dan bahkan suatu bentuk imperialisme baru. Dalam pandangan mereka, perusahaan-perusahaan MNC sedang mengintegrasikan masyarakat-masyarakat di seluruh dunia menjadi suatu lautan massa tanpa bentuk di mana individu-individu kehilangan kendali atas kehidupan mereka sendiri dan tunduk kepada kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan ini.²²

Kita semua terjerumus dalam usaha pembangunan kerajaan-kerajaan bisnis ini, baik sebagai budak yang “dipaksa” mengkonsumsi produk mereka, atau bahkan secara langsung menjadi budak perusahaan-perusahaan tersebut. Memang tidak semua orang bekerja pada perusahaan-perusahaan yang ganjil ini, tetapi kita senantiasa mendengar berbagai informasi, pandangan-pandangan, serta opini-opini tentang mereka.²³ Mungkin itu salah satu pandangan negatif para penentang MNC yang dianggap telah memperbudak manusia. Ada pengkritik berargumen bahwa gelombang kegiatan merger dan akuisisi (M&A) telah memungkinkan peningkatan luar biasa dalam konsentrasi dan dengan demikian kekuatan pasar.²⁴ Atau dengan kata

19 *Ibid.*, hlm.177.

20 Benjamin R.Barber, *Jihad Vs McWorld*, hlm.36.

21 Budi Winarno., *Pertarungan Negara Vs Pasar*, hlm.103.

22 *Ibid.*,

23 Salim Fredericks, *Invasi Politik dan Budaya*, alih bahasa Abu Faiz, (Bogor: Pustaka Thoriquul Izzah,2004), hlm.88.

24 Martin Wolf, *Globalisasi: Jalan Menuju Kesejahteraan*, hlm. 271.

lain merger dan akuisisi adalah salah satu cara membuat perusahaan-perusahaan tersebut menjadi "raksasa".

Merger adalah proses difusi perseroan dengan salah satu diantaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Merger terbagi menjadi 3 jenis yaitu, pertama merger horizontal, adalah merger yang dilakukan oleh usaha sejenis (usahanya sama), misalnya merger antara 2 perusahaan sepatu. Kedua adalah merger vertikal, adalah merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan, misalnya dalam alur produksi yang berurutan. Misalnya perusahaan ban merger dengan perusahaan mobil. Ketiga adalah merger konglomerat, yakni merger antara berbagai perusahaan yang menghasilkan produk yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya. Misalnya perusahaan mobil merger dengan perusahaan makanan. Tujuan utama merger konglomerat adalah untuk mencapai pertumbuhan badan usaha dengan cepat dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Caranya adalah dengan saling bertukar saham antara kedua perusahaan yang disatukan.²⁵

Sedangkan Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor. Akuisisi sering digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku atau jaminan produk yang akan diserap oleh pasar. Akuisisi berasal dari bahasa Latin *acquisitio* dan dalam bahasa Inggris menjadi *acquisition* yang berarti pengambilalihan. Misalnya Aqua diakuisisi oleh Danone, Pizza Hut diakuisisi oleh Coca-cola, dan BenQ mengakuisisi salah satu bisnis mobile device (MD) milik perusahaan elektronik raksasa Jerman Siemens AG.²⁶

Merger (penggabungan perusahaan) yang baru-baru ini terjadi antara Time-Warner dan AOL menunjukkan bagaimana industri-industri media yang memiliki keterkaitan dalam beberapa bidang usahanya menggabungkan diri untuk membangun suatu kekuatan yang jauh lebih besar daripada bila mereka berdiri sendiri-sendiri.²⁷

Tapi dalam banyak kasus merger, perusahaan-perusahaan itu sedang berusaha menutupi kelemahan mereka dengan ukuran besar, dan bukan sedang mengikuti skema megalomania penaklukan dunia. Satu hal yang pasti dari terus meningkatnya jumlah merger yaitu bahwa sebagian besar akan gagal. Satu-satunya pemenang adalah pemilik

25 www.wikipedia.org, akses 23 April 2010.

26 *Ibid.*,

27 Salim Fredericks, *Invasi Politik dan Budaya*, hlm.86.

saham perusahaan yang dibeli; yang menerima harga saham yang lebih tinggi daripada nilai sebenarnya.²⁸

Dengan makin membesarnya perusahaan, tak heran jika beberapa diantara mereka bahkan lebih besar daripada negara. Sebagaimana dikatakan David C. Korten bahwa mega korporasi global mempunyai ukuran yang jauh lebih besar dari banyak negara yang ada.²⁹ Tak heran jika Ia dapat mendiktekan kekuasaannya pada negara-negara yang menjadi pengikutnya.

Tapi benarkah bahwa korporasi lebih besar di banding negara-negara? Martin Wolf mungkin punya pendapat lain. Ia mengatakan klaim bahwa perusahaan itu lebih besar dan lebih berkuasa daripada negeri-negeri bukan hanya salah secara faktual. Lebih penting lagi, itu adalah salah paham. Karena bersembunyi di balik klaim ini adalah kesalahan akibat sikap keras kepala: penolakan untuk membedakan kekuasaan dari kebebasan.³⁰

Perusahaan berbeda dengan negeri karena mereka mencapai keberhasilan dengan memperoleh dari pelanggan mereka apa yang harus mereka bayarkan kepada pemasok mereka (termasuk pekerja dan kreditor mereka). Kecuali kalau mereka punya posisi monopoli yang kuat, mereka tidak bisa memaksa pelanggan membeli dari mereka. Mereka hanya bisa membujuk-bujuk. Sumber daya yang mereka kontrol adalah hasil pilihan bebas yang dibuat di pasar. Negeri-negeri atau lebih tepat pemerintah negeri-negeri berbeda. Mereka punya kontrol pemaksa atas wilayah. Bahkan negara paling lemah bisa memaksa orang melakukan hal-hal yang sebagian besar lebih suka tidak melakukannya: membayar pajak misalnya, atau melakukan wajib militer. Walaupun demokrasi modern canggih dapat sangat mengandalkan ketaatan sukarela orang memenuhi tuntutananya, Ia selalu punya hak memaksa yang bisa dia terapkan. Perusahaan tidak punya hak itu. Mereka adalah organisasi sipil yang harus mendapatkan sumber daya mereka di pasar. Mereka bergantung bukan pada pemaksaan tapi pada daya saing untuk selamat.³¹

Terlepas dari perdebatan bahwa globalisasi telah menyebabkan perusahaan-perusahaan telah semakin besar atau telah menang

28 John Micklethwait dan Adrian Wooldridge, *Masa Depan Sempurna: Tantangan dan Janji Globalisasi*, hlm.178.

29 David C. Korten, *The Post Corporate World: Kehidupan setelah kapitalisme*, alih bahasa A. Rahman Zainuddin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), hlm.1.

30 Martin Wolf, *Globalisasi: Jalan Menuju Kesejahteraan*, hlm.269.

31 *Ibid*, hlm 270.

dalam pertarungannya melawan negara-bangsa, namun yang pasti perusahaan yang besarlah yang memiliki ambisi untuk menguras kekayaan bumi dan membangun sistem atau mesin kekuasaan untuk menciptakan imperium global. Dan perusahaan-perusahaan kecil pada umumnya tidak memiliki ambisi itu.³²

1. Terminologi Korporatokrasi

Istilah korporatokrasi mungkin masih tergolong sebagai istilah yang belum terlalu populer di dalam kajian ilmu-ilmu sosial. Menurut Wikipedia dengan merujuk pada John Perkins (dalam bukunya *Confession of an Economic Hit Man*), korporatokrasi dilukiskan sebagai sistem kekuasaan yang dikontrol oleh berbagai korporasi besar, bank-bank internasional dan pemerintahan. Perkins sendiri mengatakan:

"istilah itu begitu saja datang bertengger di pikiran saya: korporatokrasi. Saya tidak yakin apakah saya sudah pernah mendengarnya sebelumnya atau saya yang menciptakannya, tetapi istilah itu Nampak sangat cocok untuk menggambarkan elite baru yang telah berketetapan untuk mencoba menguasai planet bumi".³³

John Perkins dalam bukunya tersebut menggunakannya untuk menunjukkan bahwa dalam rangka membangun imperium global, maka berbagai korporasi besar, bank dan pemerintahan bergabung menyatukan kekuatan financial dan politiknya untuk mengikuti kehendak mereka.³⁴

Sesungguhnya istilah korporatokrasi dapat digunakan untuk menunjukkan betapa korporasi atau perusahaan besar memang dalam kenyataannya dapat mendikte, bahkan kadang-kadang membeli pemerintahan untuk meloloskan keinginan mereka. Kalau pemerintahan yang dikuasai oleh kaum aristokrat (bangsawan) disebut sebagai aristokrasi, oleh plutokrat (orang kaya) disebut plutokrasi, oleh kleptokrat (maling,preman) disebut sebagai kleptokrasi, maka sebuah pemerintahan yang dikendalikan oleh korporatokrat (pemilik korporasi besar) boleh juga dinamakan sebagai korporatokrasi.³⁵

32 Lihat Mohammad Amien Rais, *Agenda Mendesak Bangsa:Selamatkan Indonesia*, (Yogyakarta: PPSK Press,2008), hlm.83.

33 *Ibid.*, hlm.81.

34 *Ibid.*,

35 *Ibid*, hlm.82.

2. Imperium Bisnis dan Eksploitasi Tanpa Batas

Kata Imperium³⁶ Bisnis dipakai untuk menunjukkan bahwa kekuasaan dan kekuatan korporatokrasi sangatlah besar dan tentu saja tidak main-main, layaknya sebuah kerajaan. Adapun kata bisnis ditambahkan karena "imperium" tersebut menganggap profit adalah segalanya.

Pada umumnya korporasi besar dihindangi penyakit *pathology of profit* atau penyakit mencari untung secara membabi buta. Tujuan mutlak korporasi adalah mencari keuntungan maksimal dengan biaya minimal. Semua cara untuk mendapatkan keuntungan dapat ditempuh. Yang premier adalah keuntungan, yang lainnya sekunder.³⁷

Pada saat sistem keuangan telah mengglobal dan melembaga, maka kaitan pertanggung-jawaban korporasi dengan orang dan kepentingan dunia orang hidup, terus menjadi semakin melemah. Karena korporasi itu dijalankan oleh manusia yang bekerja sebagai pegawainya, maka terdapat kecenderungan untuk berpikir bahwa lembaga itu sama keadaannya dengan manusia yang hidup – yaitu sebuah citra yang ditanamkan oleh bagian humas dari korporasi itu, dan diberi pula status hukum oleh putusan pengadilan. Namun demikian, korporasi itu bukanlah manusia dan ia bukan orang hidup! Ia merupakan sekumpulan yang tidak bernyawa dari hak dan hubungan keuangan yang dijaga secara hukum, yang direkayasa secara pintar sekali untuk mengabdikan kepada uang dan segala perintahnya. Uanglah yang mengalir dalam urat nadinya, bukan darah! Korporasi tidak memiliki jiwa dan juga tidak memiliki kesadaran!.³⁸

Perusahaan-perusahaan tidak bertujuan menciptakan kesempatan kerja; mereka mempekerjakan orang (sesedikit dan semurah mungkin) untuk mencetak profit. Perusahaan-perusahaan pembuat obat-obatan bukannya bermaksud menyelamatkan nyawa manusia; mereka memberikan layanan perawatan kesehatan adalah demi untuk

36 Menurut John Perkins, Imperium adalah negara-bangsa yang mendominasi negara-bangsa lainnya dan menunjukkan 1 atau lebih ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mengeksploitasi sumber daya dari negara yang didominasi.
 2. Menguras sumber daya dalam jumlah yang tidak sebanding dengan jumlah penduduknya jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain.
 3. Memiliki militer yang besar untuk menegakkan kebijakannya ketika upaya halus gagal.
 4. Menyebarkan bahasa, sastra, seni dan berbagai aspek budayanya ke seluruh tempat yang berada di bawah pengaruhnya.
 5. Menarik pajak bukan hanya dari warganya sendiri, tapi juga dari orang-orang di negara lain.
 6. Mendorong penggunaan mata uangnya sendiri di negara-negara yang berada di bawah kendalinya.
- Jika korporasi-korporasi besar sudah bercirikan 1 atau lebih seperti ciri di atas, maka pantaslah jika disebut sebagai Imperium Bisnis.

37 Muhammad Amien Rais, *Agenda Mendesak Bangsa*, hlm.84-85.

38 David C. Korten, *The Post Corporate World: Kehidupan setelah kapitalisme*, hlm.90.

menumpuk profit. Perusahaan-perusahaan minyak tidak bertujuan melestarikan lingkungan hidup kecuali untuk mematuhi peraturan atau menyelamatkan citra publik mereka.³⁹

Kita yang bekerja sebagai pegawai korporasi itu, bahkan CEO dan pengelola keuangannya yang berkuasa dan bergaji besar itu, adalah kuli-kuli kecil yang dibayar untuk mempertahankan nilai-nilai korporasi dan melakukan perintahnya. Dalam mempersiapkan kita untuk berperan dalam korporasi, kita dilatih dalam bahasa uang, cara untuk menentukan harga segala sesuatunya, dan setiap pilihan harus dapat dinilai dari segi uang. Pada akhirnya kita lalu menerima hal itu sebagai suatu kebenaran yang alamiah, sehingga bahkan kita sendiri dinilai berdasarkan kinerja uang dan dimotivasi oleh dorongan uang.⁴⁰

Dengan karakter yang seperti itu, tak heran jika perusahaan-perusahaan tersebut lebih kaya daripada semua negara berkembang. Pada 2004, penerimaan perusahaan mobil Amerika General Motor adalah 191,4 miliar dolar, lebih besar daripada PDB dari 148 lebih negara. Pada akhir tahun fiskal 2005, perusahaan ritel Amerika Wal-Mart menyabet penerimaan sebesar 285,2 miliar dolar, atau lebih besar daripada PDB apabila seluruh Negara di sub-Sahara Afrika dijadikan satu. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya kaya, tetapi juga memiliki kekuatan politik yang besar.⁴¹

Dalam mencari profit yang sebesar-besarnya, para korporasi tidak segan-segan untuk meminimalkan pengeluaran dalam segala bentuknya meskipun itu berarti membuat para buruh mereka menderita bahkan banyak di antara mereka yang sakit-sakitan. Berbagai korporasi besar berkaliber internasional, di dukung kebijakan Bank Dunia yang mendorong privatisasi dan keringanan pajak untuk perusahaan-perusahaan asing, mempekerjakan sendiri atau melimpahkan proyek ke pabrik-pabrik yang mengupah buruhnya terlalu rendah. Dan seandainya mereka protes, mereka akan dihajar atau dibunuh. Para buruh ini hidup penuh penderitaan agar barang bisa dijual dengan harga rendah di toko-toko "Negara Maju".⁴²

Memang, dengan hadirnya perusahaan-perusahaan raksasa tersebut di negara-negara berkembang ada keuntungan yang di dapat oleh negara berkembang tersebut diantaranya tersedianya lapangan

39 George Soros, *Open Society: Reforming Global Capitalism*, alih bahasa Sri Koesdiantinah (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm.165.

40 David C. Korten, *The Post Corporate World: Kehidupan setelah kapitalisme*, hlm.90.

41 Joseph E. Stiglitz, *Making Globalization Work*, hlm.276.

42 John Perkins, *Membongkar Kejahatan Jaringan Internasional*, alih bahasa Wawan Eko Yulianto dan Meda Satrio, (Jakarta:Ufuk Press, 2009), hlm.34-35.

pekerjaan dan berkurangnya pengangguran. Namun, jika dilihat lebih cermat lagi akan diketahui bahwa sesungguhnya yang paling diuntungkan adalah perusahaan-perusahaan tersebut.

Sejarah bahkan mengajarkan, karena keinginan untuk memperoleh keuntungan lebih banyak, terjadilah imperialisme. Negara-negara terbelakang itu bukan saja dijadikan sumber buruh dan barang mentah, tapi juga dijadikan pasar barang jadi mereka. Kita tahu masa ini terus berlangsung sampai pertengahan abad ke-20, ketika banyak negara terbelakang – yang lalu juga berstatus sebagai negara jajahan itu – akhirnya memerdekakan diri.⁴³

Cobalah perhatikan laporan yang ditulis oleh Jim Keady dan Leslie Kretz yang dikutip oleh John Perkins, yang mengisahkan tentang kondisi para buruh Nike di Indonesia dimana mereka hanya di gaji 1,25 dolar sehari yang hanya bisa membeli santapan terdiri dari nasi, sayur dan dua buah pisang untuk dua kali makan dalam porsi kecil. Jika ingin membeli sabun atau pasta gigi, mereka harus makan lebih sedikit lagi.⁴⁴

Mereka bekerja mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam, Senin sampai Sabtu dan kadang Minggu. Itu belum termasuk waktu untuk mempersiapkan diri dan waktu perjalanan ke tempat kerja. Mereka tidak punya uang untuk merayakan ulang tahun teman. Tidak bisa membeli radio dan TV dan tidak pernah membeli pakaian baru selama 2 tahun. Mereka merasakan kelelahan hingga ke tulang dan jika mereka berbicara maka mereka akan kehilangan pekerjaan mereka, sementara perusahaan multinasional tempat mereka bekerja memberitahu dunia bahwa mereka telah membuat perubahan serius dan para konsumen tidak perlu khawatir.⁴⁵

Kisah serupa juga dialami buruh Nike di Vietnam. Menurut laporan yang dikutip oleh Bob Herbert dalam *The New York Times*, sebagaimana dikutip oleh David C.Korten, tentang kondisi-kondisi wanita-wanita muda yang berumur antara 15-28 tahun yang bekerja di pabrik-pabrik yang membuat sepatu Nike di Vietnam, dimana 3 kali makan nasi, sedikit sayur dan mungkin juga sedikit *tofu* (dadih kacang), semuanya itu bernilai sama dengan \$2,10. Sewa kamar sekurang-kurangnya \$6,00 sebulan. Namun para buruh yang membuat sepatu Nike itu – yang mungkin dijual lebih dari \$100,00 sepasang – harus menanggung semua biaya ini serta biaya-biaya lainnya hanya dengan

43 Zaim Saidi, *Konglomerat Samson-Delilah: Menyingkap Kejahatan Perusahaan*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm.120.

44 *Ibid*, hlm.40.

45 *Ibid*, hlm.40-41.

bayaran \$1,60 sehari. Mereka mengeluh bahwa semenjak bekerja di pabrik itu, mereka mulai seringkali menderita sakit kepala, lesu dan kehilangan berat badan. Para buruh diizinkan istirahat sekali pergi ke kamar mandi dan 2 kali minum air, untuk setiap pergantian 8 jam. Kasus ini sayang sekali tidak dianggap sebagai kasus yang istimewa. Ia hanya kebetulan telah menjadi lambang dari banyak korporasi yang telah mengeruk keuntungan dengan memeras para buruh di Dunia Ketiga.⁴⁶

Bukan hanya karyawan Nike saja yang hidup dalam kondisi dan gaji yang buruk seperti itu, namun juga buruh Adidas, Reebok, The Gap, Old Navy, Tommy Hilfiger, Polo/Ralph Lauren, Lotto, Fila, dan Levi's. Semuanya mendapat gaji yang sama rendahnya, hidup di kawasan yang sama kumuh, dan memiliki tuntutan yang sama kepada perusahaan-perusahaan yang membeli mereka: berikan kami upah lebih tinggi dan kebebasan mengelola serikat yang independen.⁴⁷

Selain mengeksploitasi para buruhnya, untuk mendapat profit yang selangit korporasi-korporasi tersebut juga mengeksploitasi alam tanpa berpikir panjang akibat kerusakan yang ditimbulkannya.

Untuk mencari emas, *Benguet Mining Company* di Filipina telah membuat lobang yang dalam di bukit-bukit, mengikis habis pepohonan dan tanah permukaan dan membuang banyak sekali bongkah-bongkah batu ke dalam sungai-sungai setempat. Dengan terkurasnya sumber daya tanah dan air, maka orang Igorot yang merupakan penduduk asli di kawasan itu merasa kesulitan dalam menanam padi dan pisang di sana dan harus pergi ke sisi bukit yang satu lagi untuk memperoleh air minum dan untuk mandi. Zat sianida (*cyanide*) yang digunakan oleh perusahaan *Benguet* untuk memisahkan emas dari batu-batuan mengalir ke sungai-sungai yang membawanya ke dataran rendah, di mana zat itu membunuh binatang ternak serta mengurangi hasil padi, dan selanjutnya ke dalam lautan di mana ia membunuh ikan-ikan pantai dan terumbu karang, sehingga menghancurkan sumber kehidupan ribuan orang dalam safari perjalanannya itu.⁴⁸

Adalah tragis bahwa tidak ada hal yang dianggap istimewa dalam kasus *Benguet* itu. Keadaannya sama dengan kasus *Shell Oil* di Nigeria, *Texaco* di Ekuador, *Freeport McMoran* di Indonesia, dan kasus-kasus korporasi lain yang tidak terhitung jumlahnya yang tidak dipublikasikan yang memperoleh keuntungan dari penghancuran modal alam dan

46 David C. Korten, *The Post Corporate World: Kehidupan setelah kapitalisme*, hlm.92-93.

47 *Ibid*, hlm. 41.

48 David C. Korten, *The Post Corporate World: Kehidupan setelah kapitalisme*, hlm.92.

dalam pada itu, menghancurkan kehidupan dan tempat tinggal penduduk setempat.⁴⁹

Di Papua Nugini, tambang besar timah dan tembaga Ok Tedi membuang 80.000 ton material beracun setiap hari ke sungai Ok Tedi dan sungai Fly selama sekitar 12 tahun, dalam kegiatan ekstraksi yang bernilai sekitar 6 milyar dolar. Ketika bahan tambang habis, perusahaan yang mayoritas kepemilikannya dipegang oleh Australia itu, begitu saja meninggalkan pertambangan tersebut setelah mengakui bahwa perusahaannya tidak begitu memperhatikan dampak kerusakan lingkungan yang cukup besar. Perusahaan itu mengalihkan kepemilikannya kepada pemerintah, dan membiarkan pemerintah yang kebingungan mencari dana untuk mengatasi kerusakan yang telah ditimbulkan. Jumlah pasti kerugian yang dialami sangat sulit untuk ditentukan, tapi sangat jelas bahwa jumlah tersebut sangat besar dan harus ditanggung oleh masyarakat Papua Nugini.⁵⁰

Di semua negara, uanglah yang berkuasa, terutama di negara-negara berkembang. Perusahaan-perusahaan besar memiliki sumber daya lebih banyak dalam hal penjualan daripada pemerintah negara-negara berkembang, sehingga tidak begitu mengejutkan jika upaya-upaya perusahaan untuk membangun "iklim peraturan" yang sesuai dengan keinginan mereka acap kali berhasil. Sayangnya, sangat mudah bagi negara miskin—terutama yang pemerintahnya tidak bertanggung jawab secara demokratis—untuk mengalah terhadap tawaran-tawaran perusahaan tersebut.⁵¹

3. Bersatunya Pengusaha dan Penguasa

Ada 2 unsur yang terpenting dari korporatokrasi, yakni pengusaha dan pemerintah atau penguasa dimana perusahaan tersebut berada. Keduanya ibarat dua sisi mata uang, tanpa sisi sebaliknya tentu tidak akan disebut uang. Begitu juga korporatokrasi, tanpa bantuan dari pemerintah atau penguasa dimana perusahaannya berada tentu tidak akan bisa menguasai atau mengeruk sumber daya alam negara tersebut.

Korporasi yang berpikir, berencana, bertindak dan melakukan apa saja untuk mendapat keuntungan maksimal, tidak mungkin hanya bekerja sendirian untuk mendapat keuntungan maksimal, tidak mungkin hanya bekerja sendirian. Mereka memerlukan kekuatan politik

49 *Ibid.*

50 Joseph E. Stiglitz, *Making Globalization Work*, hlm.285.

51 *Ibid.*, hlm.288.

pemerintah.⁵²

Cara paling mudah bagi korporasi untuk menaklukkan kekuatan politik adalah dengan memberikan biaya kampanye tatkala calon presiden atau calon gubernur melakukan kampanye menjelang pemilihan umum. Presiden yang terpilih tidak bisa tidak pasti akan membalas budi pada korporasi yang telah menggelontorkan dana kampanye.⁵³

Di Amerika Serikat yang relatif kaya, banyak orang yang lebih suka menunjukkan dukungan mereka terhadap kandidat ataupun loyalitas mereka pada suatu partai tertentu dengan cara menulis sehelai cek, ketimbang dengan cara mencurahkan waktu pada kampanye atau aktivitas politik. Tentu saja sebagian terbesar dari warga negara tidak memiliki bakat khusus untuk berpolitik, atau mereka mau meluangkan waktu, sehingga uang menjadi alat pengganti yang lebih disukai dan pada saat yang sama ia juga berarti sebagai sebuah partisipasi politik dalam berdemokrasi.⁵⁴

Semua perusahaan, kartel dan bisnis besar di AS memiliki kantor politik di Washington. Di singgung pula bahwa kantor ini mempunyai seribu cabang yang melakukan penipuan terhadap penduduk (perusahaan-perusahaan besar di Washington berfungsi sebagai pusat politik, bukan ekonomi).⁵⁵ Oleh Karena itu, tak heran jika di Amerika sendiri dana kampanye merupakan salah satu masalah politik dan hukum yang paling pelik. Bukan saja korporasi Amerika yang berlomba-lomba memberikan dana kampanye kepada capres yang dinilai bakal mudah menjadi fasilitator kepentingan korporat, perusahaan asing (dari luar Amerika) juga ikut-ikutan menimbrung supaya kelak memperoleh kemudahan-kemudahan.⁵⁶

Di Amerika Serikat, pemilihan umum berputar pada kepentingan para kapitalis dan para orang kaya saja. Pada dasarnya merekalah yang mengirimkan para wakilnya ke Kongres dan Senat. Tentu saja dari 600 wakil rakyat di Kongres dan Senat itu ada 5% yang meraih kursi karena popularitas, kecakapan dan kemampuannya. Namun, mayoritas wakil rakyat adalah sebaliknya. Mayoritas besar adalah mereka yang berhasil karena "menggunakan politik uang".⁵⁷

52 Mohammad Amien Rais, *Agenda Mendesak Bangsa*, hlm.88.

53 *Ibid.*, hlm.89.

54 Herbert E. Alexander, *Financing Politics: Politik Uang dalam Pemilihan Presiden Secara Langsung*, alih bahasa Dwi Pratomo Yulianto, (Yogyakarta: Narasi, 2003), hlm.30.

55 Hashemi Rafsanjani, *Aspek-aspek Pokok Agama Islam: Pandangan Islam Tentang HAM, Hegemoni Barat dan Solusi Dunia Modern*, alih bahasa Anna Farida, (Bandung: Nuansa, 2008), hlm.203.

56 Mohammad Amien Rais, *Agenda Mendesak Bangsa*, hlm.89.

57 Hashemi Rafsanjani, *Aspek-aspek Pokok Agama Islam*, hlm.201.

Pengeluaran-pengeluaran untuk membayar perusahaan-perusahaan *public relation*, para pengacara, agen-agen periklanan telah dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk membebaskan segala hal yang sesungguhnya merupakan sumbangan-sumbangan politik sebagai pengeluaran-pengeluaran bisnis biasa.⁵⁸ Iklan lembaga juga bisa berperan sebagai alat-alat untuk menggunakan dana-dana perusahaan untuk menyampaikan sebuah pesan politik. Misalnya saja iklan-iklan perusahaan minyak pada koran-koran dan majalah-majalah berita, seperti yang dipasang oleh Exxon Mobile dan korporasi-korporasi lainnya, seringkali mencoba mempengaruhi opini publik dan kebijakan publik di bidang energi dan isu-isu tentang suku bunga.⁵⁹

Selain berwujud uang untuk memberi jaminan atas tawaran-tawaran tersebut, beberapa perusahaan menyediakan pelayanan dan barang-barang secara cuma-cuma sebagai bentuk sumbangan-sumbangan tak langsung untuk penyelenggaraan konvensi-konvensi nasional – misalnya dealer-dealer mobil menyediakan armada mobil-mobilnya, perusahaan-perusahaan *soft drink* memberikan minuman ringan secara gratis.⁶⁰ Perusahaan-perusahaan bisnis secara langsung juga memberikan bantuan kepada kota-kota yang menjadi tuan rumah dalam membiayai konvensi-konvensi pencalonan. Selama beberapa tahun, hotel-hotel, restoran-restoran dan armada-armada transportasi melayani kota-kota yang menjadi tuan rumah tersebut untuk memberikan sumbangan-sumbangannya, yang dianggap sebagai pengeluaran-pengeluaran bisnis yang sah, kepada komite-komite yang bersifat non partisan yang didirikan untuk menjamin tawaran-tawaran penyelenggaraan konvensi di kota tersebut.⁶¹

Namun ada cara korporasi besar Amerika dalam memegang kendali pemerintahan dengan lebih efektif lagi. Caranya langsung menduduki pos-pos kekuasaan yang penting. Tokoh-tokoh penentu kebijakan Amerika sangat terkait erat dengan korporatokrasi Amerika yang bergerak di bidang perminyakan. Condoleezza Rice, menteri luar negeri Amerika, adalah Direktur Chevron antara 1991-2001. Secara formal ia juga meninggalkan Chevron, tetapi keterkaitannya dengan kepentingan Chevron semakin menjadi-jadi setelah memegang kekuasaan politik luar negeri Amerika. Bermitra dengan Cheney, C.Rice dapat memenangkan kontrak pemipaan minyak (*crude oil pipelines*)

58 Herbert E. Alexander, *Financing Politics: Politik Uang dalam Pemilihan Presiden Secara Langsung*, hlm. 143.

59 *Ibid*, hlm.144.

60 *Ibid*, hlm.146.

61 *Ibid*, hlm. 145.

sepanjang 900 mil dari Kazakhstan Barat sampai Laut Hitam. Halliburton akan mengerjakan pemipaan itu untuk Chevron.⁶² Paparan tersebut menunjukkan bagaimana korporasi-korporasi tersebut menjalankan taktiknya di dalam negeri, yakni Amerika. Lalu bagaimana jika mereka merambah ke luar negeri?

Ketika korporasi-korporasi ini merambah ke luar negeri, ke negara-negara berkembang, praktik suap pun dimainkan.⁶³ Tentu saja perusahaan-perusahaan tersebut tidak perlu menawarkan sendiri uang suap tersebut. Mereka menyewa seorang "fasilitator", yang diberikan cukup uang untuk "memfasilitasi" kesepakatan tersebut. Apa yang dilakukannya, bagaimana ia memfasilitasi, tidak diketahui perusahaan dan mereka tidak ingin mengetahuinya. Agaknya mereka tahu ketika mereka membayar fasilitator tersebut jutaan dolar, mereka tidak sekedar membayar biaya konsultasi. Apa yang sesungguhnya mereka bayar adalah penyangkalan, supaya di kemudian hari mereka dapat mengklaim bahwa mereka tidak tahu-menahu jika uang tersebut digunakan sebagai uang suap.⁶⁴

Praktik suap tersebut diberikan kepada aparaturnegera untuk mendapatkan penurunan harga yang jauh daripada yang seharusnya mereka bayar, sehingga bisnis yang mereka jalankan menjadi lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang membayar sesuai harga pasar. Uang suap yang kecil artinya bagi sebuah perusahaan minyak merupakan jumlah luar biasa bagi para oknum aparaturnegera yang terlibat, yang biasanya adalah pegawai negeri sipil dengan gaji yang hanya beberapa dolar setahun.⁶⁵

Di dalam dunia perdagangan minyak internasional yang sangat kompetitif, lebih mudah bagi perusahaan minyak untuk memperoleh keuntungan besar melalui praktik suap. Suap-suap tersebut melemahkan proses demokrasi; juga mendistorsi pasar. Namun, masalah yang sebenarnya bukan terletak pada praktik-praktik suap yang mungkin saja sangat dibenci, melainkan akibat yang ditimbulkannya: ketika perusahaan minyak tersebut menarik laba besar, negara mengalami kerugian.⁶⁶

Semakin besar keuntungan yang diperoleh dari spekulasi terhadap gelembung-gelembung uang itu, semakin besar pulalah dana

62 Mohammad Amien Rais, *Agenda Mendesak Bangsa*, hlm.91.

63 Joseph E. Stiglitz, *Making Globalization Work*, hlm.218.

64 *Ibid*, hlm 219.

65 *Ibid*, hlm 218.

66 *Ibid*,.

yang dikuasai para spekulator itu untuk memberikan hadiah kepada para politisi yang bersahabat dengannya, dan semakin bersedia pulalah mereka untuk memberikan kepada para CEO korporasi keuntungan saham yang makin besar sebagai insentif untuk melakukan apa saja yang diminta, agar harga saham mereka tetap membumbung.⁶⁷

Selain suap, privatisasi juga adalah bukti dimana para penguasa telah menyerahkan Badan-Badan Usaha Milik Negara kepada para korporat. Privatisasi hampir selalu diasosiasikan dengan denasionalisasi ekonomi sebuah negara. Kedua kebijakan ini adalah alat strategis yang dipakai oleh para adikuasa ekonomi untuk menaklukkan perekonomian negara-negara dunia ketiga dan menghegemoni "masyarakat sipil".⁶⁸

Kecenderungan para penguasa untuk memprivatisasi atau men-swastakan BUMN-nya tidak akan bisa dilepaskan dari tuntutan liberalisasi dan pasar bebas.⁶⁹ Ini sejalan dengan desakan Kaum neoliberal yang terus mendukung-dukungkan kebijakan swastanisasi, sebuah kebijakan yang menuntut perpindahan sumber daya dan perusahaan dari kepemilikan publik ke tangan swasta. Pengalihan kepemilikan dilakukan melalui penjualan aset-aset milik negara.⁷⁰

Lalu siapa yang akan mendulang untung dari hasil privatisasi tersebut? Jawabannya tentu saja para perusahaan. Sebagaimana dikatakan James Petras dan Henry Veltmeyer: ketika ekonomi sebuah negara sudah di privatisasi, buah dari kebijakan ini akan dipanen oleh perusahaan-perusahaan yang untung atau ditangkap oleh pasar tanpa khawatir dengan reaksi "nasionalis" atau "sosialis" yang tidak menyenangkan.⁷¹

Pertanyaannya adalah mengapa para penguasa di negara-negara yang kaya akan sumber daya itu lebih memilih men-swastakan BUMN-nya daripada mengurusnya sendiri? Selain kemungkinan kurang informasi atau rasa takut tanpa dasar, yang paling mungkin adalah karena para pengelola Negara itu memegang teguh kepentingan picik dan sempitnya. Kepentingan picik dan sempit itu berupa kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok kecil dan melupakan sama sekali kepentingan bangsa yang lebih luas dan besar. Tidak tertutup kemungkinan adanya penyogokan gelap.⁷²

67 *Ibid*, hlm. 98-99.

68 James Petras dan Henry Veltmeyer, *Imperialisme Abad 21*, hlm.170.

69 Lihat Rahmat S.Labib, *Privatisasi dalam Pandangan Islam*, (Ciputat: Wadi Press, 2005), hlm.10.

70 Ha-Joon Chang dan Ilene Grabel, *Membongkar Mitos Neolib: Upaya Merebut Kembali Makna Pembangunan*, alih bahasa Muh.Gusti Zainal, (Yogyakarta: INSISTPres, 2008), hlm. 81.

71 Lihat James Petras dan Henry Veltmeyer, *Imperialisme Abad 21*, hlm.169.

72 Mohammad Amien Rais, *Agenda Mendesak Bangsa*, hlm.51

Sebagai contoh, Kasus penyogokan untuk para petinggi Kazakhstan yang dilakukan oleh agen bernama James Giffen yang bekerja untuk Exxon Mobil mencuat karena sempat bocor di pers. Sogokan Giffen sebesar 78 juta dolar Amerika itu tidak sia-sia. Yang disogok tidak tanggung-tanggung. Presiden Nursultan Nazarbayev dan menteri minyaknya, Nurlan Balgimbayev. Dalam liputan pers internasional sogokan itu dikenal sebagai *kazakhsgate*. Berkat sogokan lumayan itu, Exxon Mobil mendapat perlakuan istimewa. Exxon Mobile memperoleh 25 % bagian di ladang minyak Tengiz.⁷³

Di Indonesia sendiri, kita tentu masih ingat ketika pemerintah lebih memilih memberikan Blok Cepu kepada Exxon Mobil daripada kepada Pertamina. Apakah pemerintah kita juga telah menerima sogokan seperti yang diterima presiden Kazakhztan dan menterinya? *Wallahu a'lam bishawab*.

4. Kekuasaan yang Memudar (Redupnya Negara-Bangsa).

Ada hantu yang membayangi pemerintah-pemerintah dunia. Hantu itu ialah Globalisasi.⁷⁴ Rasanya kata-kata ini bukanlah omong kosong. Terbukti dengan adanya globalisasi, beberapa perusahaan internasional semakin internasional. Dengan globalisasi, mereka semakin gencar "menginvasi" negara-negara yang nota-bene menjadi "korban", sehingga membuat ukuran mereka bertambah besar.

Kekuatan Globalisme, melalui kesepakatan dagang, deregulasi dan privatisasi, tentunya akan sangat melemahkan kemampuan negara-bangsa dalam bertindak sesuai dengan kebebasan politisnya. Kevakuman politik yang menyusul kemudian, tentunya akan dipenuhi dengan alternatif-alternatif modern yang sudah nyata yaitu, perusahaan transnasional. Karena lebih kaya daripada mayoritas negara-bangsa di muka bumi, bebas dari kewajiban geografis dan sosial yang dipikul oleh bentuk negara yang sudah usang ini (yaitu negara-bangsa), jauh dari tuntutan nasionalisme yang berat dan seringkali memalukan, dan dalam kenyataannya juga bebas dari tuntutan emosional warga negara yang luar biasa berat dan banyaknya, maka perusahaan transnasional tentunya akan mampu menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan dunia secara lebih rasional dan efisien.⁷⁵

Peran yang dulu dijalankan oleh negara-bangsa, saat ini telah diambil alih oleh perusahaan transnasional. Tak heran jika para Globalis

⁷³ *Ibid.*,

⁷⁴ Martin Wolf, *Globalisasi: Jalan Menuju Kesejahteraan*, hlm.300.

⁷⁵ John Ralston Saul, *Runtuhnya Globalisme dan Penemuan Kembali Dunia*, hlm.146-147.

mengatakan bahwa perusahaan transnasional adalah negara-negara-bangsa yang baru, bahwa negara-bangsa yang lama mengikuti kepemimpinan pasar, karena terus-menerus tak berdaya.⁷⁶

Sebagaimana yang ditunjukkan di bagian sub-bab E (Bersatunya Pengusaha dan Penguasa) bahwa kekuatan politik yang dimiliki oleh korporasi tentu saja atas campur tangan pemerintah. Dan ketika korporasi sudah berhasil menguasai pemerintah, maka sesungguhnya yang berkuasa di negara tersebut adalah korporasi.

Dengan berkuasanya korporasi atas pemerintah, maka orientasi negara tersebut tentu akan disesuaikan dengan orientasi korporasi. Apa itu? Tentu saja profit yang sebesar-besarnya. Lalu dengan apa korporasi tersebut menguasai pemerintah? Tentu saja dengan modal yang mereka miliki. Politik nasional dan pilihan politik telah digeser oleh kekuatan pasar dunia yang lebih kuat dari negara yang paling kuat sekalipun. Modal itu bersifat mobil dan tidak mempunyai ikatan nasional, ia akan pergi ke tempat-tempat keuntungan ekonomi memberikan peluang.⁷⁷

Dengan orientasi profit yang sudah menjadi ruh negara –sebagaimana korporasi – maka semua potensi atau kekuatan yang dimiliki negara akan dimaksimalkan untuk meraih profit tersebut. Salah satu potensi tersebut adalah militer. Jika pada era yang lalu militer hanya digunakan sebagai alat keamanan negara, menjaga tapal batas negara, menjaga negara dari ancaman dari luar maupun dalam, maka pada era korporasi ini, militer-dengan legitimasi dari negara – telah menyerang negara lain untuk mengambil sumber daya alam negara tersebut.

Contoh paling gamblang dari ini adalah penyerangan Amerika ke Irak. Sudah bukan rahasia jika Amerika menyerang Irak bukanlah atas kepemilikan senjata pemusnah massal, namun atas keinginan untuk menguasai ladang-ladang minyak di Irak. Bisa kita bayangkan, bagaimana ratusan bahkan ribuan nyawa tentara dikorbankan dan pengeluaran biaya perang yang tentu saja tidak sedikit, hanya untuk memuaskan hasrat kekayaan para korporat yang sudah menguasai negara. Namun bagi mereka mungkin itu harga yang pantas. Sebagaimana peribahasa: jika ingin hasil yang maksimal, maka berkorbanlah dengan maksimal pula.

Selain para korporat, para penguasa tentu juga mendapat keuntungan yang besar - misalnya dari hasil perang tersebut. Namun, keuntungan yang didapatkan tersebut bukannya digunakan untuk

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 400.

⁷⁷ Paul Hirts dan Grahame Thompson, *Globalisasi Adalah Mitos*, hlm. 266.

kemakmuran rakyat malah digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongannya. Bahkan ketika pemerintah sudah memberikan semua potensi kepada korporasi tersebut, pemerintah masih saja menimbun kekayaan itu untuk kepentingannya sendiri. Kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengambil alih kekayaan yang ada, dimanfaatkan untuk menimbun kekayaan pribadi yang besar; insentif untuk menciptakan kekayaan baru dihambat, sektor sipil menjadi kerdil dan rakyat merasa terasing di dalam masyarakatnya sendiri.⁷⁸

Para pakar teori globalisasi yang ekstrem memimpikan sebuah dunia yang bebas bagi bisnis untuk melayani konsumen. Kekuasaan negara dan militer tidak berarti lagi di mata pasar dunia. Dalam pandangan ini, ekonomi dan politik terpisah dan politik kalah kuat berhadapan dengan ekonomi. Karena pasar mendominasi dan akibat-akibat dari pasar itu dilegitimasi oleh persaingan bebas dan dianggap sebagai di luar pengawasan nasional, maka negara menjadi kurang mampu untuk mengawasi akibat-akibat ekonomi atau mengubahnya dengan paksa.⁷⁹

Retorika politik yang baru ini didasarkan atas suatu liberalisme yang anti-politik. Dengan dilepaskan dari politik, perekonomian global membiarkan perusahaan-perusahaan dan pasar mengalokasikan faktor-faktor produksi yang paling menguntungkan dan tanpa diganggu oleh campur tangan negara. Perdagangan bebas, perusahaan transnasional dan pasar modal dunia telah membebaskan bisnis dari hambatan politik dan dapat memberikan kepada konsumen dunia produk yang paling efisien dan paling murah.⁸⁰

Negara-negara yang selama ini memegang hegemoni di dunia tidak dapat lagi memaksakan tujuan-tujuan kebijakannya sendiri, baik di dalam wilayahnya maupun di tempat lain, sementara badan-badan (pemerintah maupun swasta) yang selama ini tidak berdaya sekarang lebih kuat, karena kini memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menolak dan menghindari setiap kekuatan yang mencoba-coba menjadi "hegemon".⁸¹

Berbagai lembaga, dari lembaga sukarela internasional hingga perusahaan TNC, menikmati kekuasaan yang lebih besar sementara wibawa pemerintah nasional semakin susut. Lembaga-lembaga ini

78 David C.Korten, *Menuju Abad ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global*, alih bahasa Lilian Tejasudhana, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), hlm. 254-255.

79 Paul Hirts dan Grahame Thompson, *Globalisasi Adalah Mitos*, hlm. 2287-288.

80 *Ibid*, hlm. 267.

81 *Ibid*, hlm. 22.

dapat, dengan menggunakan pasar global dan media global, memperoleh legitimasi dari konsumen atau warga masyarakat lintas batas. Karena itu, kekuasaan negara nasional untuk mengatur makin susut, meski sebagian besar dari warga negara, khususnya di negara maju, tetap terikat pada negara masing-masing.⁸²

5. Konfrontasi Sengit dan Beberapa Tawaran Solusi.

Salah satu peribahasa mengatakan sepandai-pandai membungkus bangkai, suatu ketika akan tercium juga kebusukannya. Peribahasa ini mungkin sangat tepat untuk menggambarkan bagaimana korporasi-korporasi yang telah sekian lama menyembunyikan kebusukannya, akhirnya tercium juga oleh masyarakat dunia. Tak heran jika muncul berbagai kritikan terhadap imperialisme yang dilakukan para korporasi tersebut. Kritikan-kritikan tersebut diantaranya datang dari John Perkins, Joseph E. Stiglitz, David C. Korten, James Petras dan Henry Veltmeyer. Tidak ketinggalan juga dari seorang Milyader seperti George Soros. Selain itu juga tokoh-tokoh dari dalam negeri seperti M. Amien Rais.

Salah satu kritikan yang sangat tajam dilontarkan oleh John Perkins, yang dulu berprofesi sebagai *Economic Hit Man* alias Bandit Ekonomi, dalam 2 bukunya yang terkenal itu, yakni *Confession of an Economic Hit Man* (2006) dan *The Secret History of The American Empire* (2007). Dalam bukunya yang kedua, ia habis-habisan menceritakan tentang petualangannya di berbagai negara baik di Asia—termasuk Indonesia—, Amerika Latin, Timur Tengah dan Afrika. Bahkan di buku keduanya ini ia mengatakan dengan tegas, Bahwa, untuk mengubah dunia kita harus mengubah korporatokrasi; kita harus berhenti membiarkan segelintir orang itu terus menentukan nasib planet kita.⁸³ Mungkin kata-kata ini adalah bukti “pertaubatannya” setelah berpuluh tahun menjadi Bandit Ekonomi, sekaligus mengajak masyarakat dunia untuk mengubah dunia dengan cara mengubah korporatokrasi.

Kritikan yang tak kalah pedas juga dilontarkan oleh David C. Korten. Dengan latar belakang sebagai seorang Ekonom, ia mengkritik dengan telak bahwa sesungguhnya para korporat telah mengeksploitasi baik buruh maupun alam. Diantara karyanya adalah *Getting to The First Twenty Century: Voluntary Action and The Global Agenda* (1990), dan *The Post Corporate World: Life After Capitalism* (1999). Di buku keduanya ini, ia mengkritik korporasi secara telak dengan mengatakan bahwa korporasi sebagai sebuah lembaga yang memiliki kekuasaan

82 *Ibid*, hlm 22-23.

83 John Perkins, *Membongkar Kejahatan Jaringan Internasional*, hlm.365.

yang luar biasa besarnya dan sedikit sekali pertanggung jawabannya, yang oleh watak tatanan dan kepemilikannya itu sendiri terdorong untuk menyita dan melelang modal hidup dunia, demi memperoleh keuntungan sesaat yang cepat dan memusatkan kekayaan di tangan segelintir orang yang sangat kaya, mengendalikan komunikasi massa untuk membatasi kesadaran masyarakat luas tentang akibat-akibat yang ditimbulkan kekuasaan kapitalis dan menggerogoti prakarsa reformasi.⁸⁴

Namun, selain mengkritik imperialisme yang dilakukan para korporasi terhadap negara-negara lain khususnya negara berkembang, ia juga secara khusus menawarkan 6 agenda untuk mengembalikan hak-hak manusia yang telah dirampas oleh para korporasi. 6 agenda tersebut adalah mengembalikan demokrasi politik, mengakhiri fiksi hukum tentang kecurangan korporasi, mengadakan persetujuan internasional yang mengatur korporasi dan keuangan internasional, menghilangkan kesejahteraan korporasi, mengembalikan peran uang sebagai alat tukar dan memajukan demokrasi ekonomi.⁸⁵ Enam butir agenda yang diusulkan diatas, menggugat langsung ke pondasi kekuasaan keuangan dan korporasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan itu, dan membuka jalan bagi pendistribusian ulang kekayaan dan kekuasaan ekonomi secara radikal dengan mengembalikan hak-hak manusia kepada orang-orang yang hidup.⁸⁶

Joseph E. Stiglitz juga tak mau ketinggalan untuk memberikan kritiknya terhadap sepak terjang korporasi-korporasi multinasional. Dalam bukunya yang terkenal *Making Globalization Work* (2006), Mantan Wakil Presiden Bank Dunia ini bahkan membahas tentang sepak terjang perusahaan-perusahaan multinasional itu dalam satu bab khusus. Di antara kritiknya bahwa perusahaan-perusahaan itu tidak hanya kaya, tetapi juga memiliki kekuatan politik yang besar. Jika pemerintah memutuskan untuk mengenakan pajak atau memberlakukan peraturan yang tidak mereka sukai, mereka akan mengancam untuk berpindah ke wilayah lain.⁸⁷ Namun seperti para pengkritik lainnya, ia juga tak lupa untuk memberikan tawaran solusi untuk mengurangi "kesewenangan" perusahaan-perusahaan tersebut. Ia menyusun 5 agenda, yakni Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*/[CSR]), Membatasi kekuasaan perusahaan, Meningkatkan *corporate governance*, Hukum global untuk perekonomian global dan

84 David C. Korten, *The Post Corporate World: Kehidupan setelah kapitalisme*, hlm.95.

85 *Ibid*, hlm 221.

86 *Ibid*, hlm 235.

87 Joseph E. Stiglitz, *Making Globalization Work*, hlm. 276.

Mengurangi ruang lingkup korupsi.⁸⁸

Bahkan ketika ia berkunjung ke Indonesia, ia memperkenalkan kembali sebuah istilah yang kita anggap tabu dan haram kita sebutkan, karena begitu takutnya kita mendengar istilah itu, yaitu nasionalisasi. "Sebaiknya eksplorasi migas di Indonesia di nasionalisasi"⁸⁹, demikian pernyataannya.

Di Malaysia, Brazil, Chili dan Norwegia misalnya, pertambangan yang digarap sendiri oleh pemerintah ternyata mendatangkan keuntungan lebih besar dibandingkan bila diberikan kepada korporasi asing. Negara-negara Amerika Latin telah dengan jelas menunjukkan bagaimana negosiasi ulang mampu mendatangkan keuntungan jauh lebih banyak dan ternyata tidak ada perjanjian atau kontrak karya yang tidak dapat dinegosiasi kembali. Venezuela di bawah Hugo Chavez dan Bolivia di bawah Evo Morales membuktikan hal itu.⁹⁰

Seperti kita tahu Bolivia secara sepihak merekonstruksi semua kontrak karya yang semula terlalu merugikan rakyat Bolivia menjadi sangat menguntungkan. Padahal sebelumnya, korporasi seperti Exxon, Repsol, Petro Gas, Shell menakut-nakuti Bolivia, kalau Bolivia sampai meminta negosiasi ulang terhadap berbagai kontrak karya, Bolivia akan dikucilkan, akan dibawa ke arbitrase dan lain sebagainya. Ternyata dengan sikap tegas dan rasional, semua "gertak sambal" korporasi besar itu tidak pernah dilaksanakan. Sikap tegas seperti itu juga sebelumnya telah diperlihatkan oleh Venezuela dibawah Hugo Chavez. Terbukti Chevron, Exxon Mobil, British Petroleum, Conoco Phillips dan lain-lain tidak pernah hengkang dari Venezuela.⁹¹

Dalam konteks Indonesia sendiri, M. Amien Rais dalam bukunya *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia* (2008) juga sependapat dengan Stiglitz, bahwa jika kita tak berani menasionalisasi BUMN milik kita, paling tidak kita berani untuk meminta untuk menegosiasi ulang. Menurutnya paling tidak ada 4 faktor⁹² yang melandasi sudah waktunya untuk menuntut untuk negosiasi ulang, yakni Pertama doktrin *pacta sunt servanda* harus dipahami sekaligus dengan klausula *rebus sic stantibus*. Bila sebuah kontrak atau perjanjian ternyata dalam pelaksanaan merugikan salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan berhak merundingkan kembali kontrak atau perjanjian tersebut.

88 *Ibid*, hlm.289. Untuk lebih jelasnya baca hlm. 289-304.

89 *Seputar Indonesia*, 15 Agustus 2007. Lihat juga M.Amien Rais, *Agenda Mendesak Bangsa*, hlm. 48.

90 M.Amien Rais, *Agenda Mendesak Bangsa*, hlm. 48-49.

91 *Ibid*, hlm103.

92 *Ibid*, hlm 49-50.

Kedua, pasal 1 ayat 2 *The International Right Covenant on Civil and Political Right* mengatakan: "semua bangsa, untuk mencapai tujuannya memiliki kebebasan untuk memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alamnya. Dalam pasal ini juga dikatakan bahwa kerjasama ekonomi internasional harus didasarkan pada prinsip saling-untung dan berpedoman pada hukum internasional. Tidak dibenarkan suatu bangsa kehilangan atau dihilangkan hak hidupnya".

Ketiga, tafsir yang agak luas atas *Universal Declaration of Human Right* (1948) memberikan kita keyakinan bahwa melindungi dan memanfaatkan kekayaan alam yang kita miliki untuk bangsa Indonesia sendiri adalah salah satu bentuk hak asasi manusia. Pasal 3 dan 4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap orang untuk menikmati hidup, kebebasan dan keamanan. Tidak diperkenankan ada seseorang yang dikungkung dalam perbudakan dan penghambaan. Seorang pakar mengatakan bahwa, "*each people's right to its resources is a human right*", hak setiap orang atau bangsa untuk menguasai kekayaan alamnya adalah hak asasi manusia.

Keempat, kita sudah merdeka lebih dari 6 dasawarsa. Sudah sangat terlambat kalau kita masih saja mengabaikan pesan UUD 1945 pasal 33 ayat 3: " Bumi dan Air dan kekayaan alam yang didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Masih dalam buku yang sama, ia bahkan menulis satu bab tersendiri tentang korporatokrasi. Dalam bab tersebut ia mengidentifikasi bahwa korporatokrasi terdiri atas 7 unsur⁹³, yakni Korporasi besar, Pemerintah, Perbankan & Lembaga Keuangan Internasional, Militer, Media Massa, Intelektual Pengabdian Kekuasaan dan Elite Nasional Bermental *Inlander*.

Berbagai tindakan seperti Nasionalisasi dan Negosiasi Ulang telah dilakukan oleh orang lain dan tentu saja itu menjadi pelajaran dan contoh bagi kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk dilakukan. Berbagai tawaran solusi yang dapat menjadi jalan keluar alternatif juga telah dikemukakan oleh berbagai intelektual baik dalam maupun luar negeri. Lantas, masihkah kita terus berdiam diri?

93 *Ibid*, hlm 83. Untuk lebih jelasnya baca hlm. 83-173.

C. Dari Korporatokrasi Ke Kosmokrasi? ⁹⁴

Dalam suatu pertarungan atau kompetisi tentu ada yang menjadi pemenang. Dalam kasus Globalisasi, yang menjadi pemenang adalah elit-elit yang tentu saja memegang kekuasaan besar dalam korporasi-korporasi besar. Atau dengan kata lain, selain telah menyatukan dunia, globalisasi juga telah menciptakan suatu kelas penguasa baru yang makin terlihat yang terdiri dari orang-orang yang memiliki gagasan, koneksi, dan tekad bulat untuk unggul dalam ekonomi internasional. Mereka adalah kosmokrat. Merekalah orang-orang yang berhasil makmur berkat globalisasi. Mereka adalah kelas penguasa baru.

Mereka memegang jabatan tinggi dan penting di sebagian besar perusahaan besar dunia dan institusi internasional, berusaha untuk menciptakan dunia yang lebih kecil, berselera kosmopolitan dan kelas penguasa yang jauh lebih bergejolak dibandingkan dengan kelas-kelas lain sebelumnya. Tapi para kosmokrat disebut demikian lebih karena perilaku dan gaya hidup mereka daripada rekening bank mereka.

Ada beberapa perbedaan antara elit kosmokrat dengan elit sebelum mereka. Pertama, tidak seperti strata elit sebelumnya yang mencapai keberhasilan berkat properti dan juga mengikat mereka pada tempat tertentu, kosmokrat justru berhasil berkat informasi dan keahlian yang dengan mudah mengalir lintas batas. Kedua, jika kesetiaan kelas elit sebelumnya bersifat lokal dan emosional, maka kesetiaan kosmokrat bersifat internasional dan penuh perhitungan. Ketiga, dibanding elit sebelumnya, kosmokrat lebih menghargai inteligensi daripada kesetiaan. Keempat, oleh karena kosmokrat lebih menghargai inteligensi daripada kesetiaan, maka tidak seperti elit sebelumnya, banyak kosmokrat yang tidak menghargai usia, ras atau jenis kelamin. Bahkan mungkin, mereka adalah elit pertama dimana perempuan memainkan peran yang hampir sama dengan laki-laki.

Ciri lain dari kosmokrat adalah biasanya berwawasan Anglo-Amerika. Namun, sebenarnya nilai Amerika dari kosmokrat hanya dalam arti nilai-nilai orang yang selalu bergerak dan berubah dan bukan nilai-nilai suatu masyarakat yang merasa nyaman dengan tradisinya. Mereka juga adalah jenis orang-orang yang menganut definisi Jack Welch tentang "nilai universal" yang menurutnya menggambarkan General Electric -perusahaan minyak dunia- (meritokrasi, martabat,

⁹⁴ Sub bab ini pada dasarnya adalah pensistematisasian dari bab *Kosmokrat: Elit Yang Was-was* pada buku *Masa Depan Sempurna: Tantangan dan Janji Globalisasi*. Oleh karena itu, untuk kajian yang lebih mendalam tentang Kosmokrat dan Kosmokrasi bisa di baca di buku tersebut hlm.336-363.

kesederhanaan, kecepatan, kebencian pada birokrasi berbelit), dan ketidaksabarannya kepada “setiap monyet brengsek angkuh” yang tidak menganut nilai-nilai itu. Kosmokrat juga selalu menghilangkan rintangan, mengatasi batas-batas dan mengusir “kekakuan”.

Paling tidak ada 3 hal yang sangat penting dalam hidup kosmokrat. Pertama adalah penekanan pada konsumerisme kosmopolitan. Kosmokrat percaya bahwa mereka harus membeli yang terbaik di pasar, tidak peduli asal kebangsaannya, dan tentu saja berkat globalisasi, mereka makin bisa mewujudkan impian ini. Kedua adalah kepercayaan mereka, bahwa orang harus dinilai berdasarkan pencapaian mereka dan bukan siapa orangtua mereka.

Ketiga adalah keinginan mereka untuk saling berhubungan. Kosmokrat mempunyai teman yang bukan hanya di tempat tinggi tapi juga di tempat jauh – membuat mereka butuh, secara hampir patologis, terus berhubungan lewat surat suara, email, dan perjalanan tak jemu-jemu. Tidak cukup bagi kosmokrat jika hanya menggenggam telepon genggam sepanjang waktu, mereka memperlengkapi diri dengan *tri-band*, yang dapat dipakai baik di Eropa maupun Amerika atau bahkan dengan telepon satelit, yang dapat dipakai di mana saja di seluruh dunia. Untuk kosmokrat yang lebih kecil, berada dalam jaringan adalah dorongan hasrat, bahkan sampai lupa diri.

Di dunia kosmokrat, ada 3 lembaga yang mengikat. Pertama adalah sekolah bisnis. Jika elit sebelumnya belajar sejarah di Oxbridge atau di Ivy League, maka elit baru lebih mengejar MBA. Sekolah bisnis sedang menjadi kamp pelatihan globalisasi. Mereka merekrut mahasiswa dan staf mereka dari tempat yang sejauh mungkin. Mereka juga ingin sebanyak mungkin alumni mereka menghabiskan sebagian waktu mereka di luar negeri. Lembaga kedua adalah perusahaan-perusahaan besar layanan profesional: kantor pengacara, perusahaan akuntansi dan khususnya bank investasi dan konsultasi manajemen. Setiap tahunnya, McKinsey meneliti 50.000 lamaran dan melakukan puluhan ribu wawancara, banyak diantaranya melibatkan rekanan senior, untuk merekrut 500 rekanan pemula yang baru. Alumni McKinsey yang berjumlah 5.000 membentuk suatu elit di puncak hampir segala jenis pekerjaan, mengelola lembaga dari IBM, American Express, sampai Partai Konservatif Britania.

Lembaga ketiga yang mengikat kosmokrat adalah Internet. Internet adalah alat kosmokratik yang tanpa cacat: global, tidak terikat oleh peraturan nasional, penuh pengetahuan, dan “tidak memandang

jenis kelamin". Bagi suatu kelompok manusia yang begitu ingin tetap terkoneksi tetapi begitu tersebar secara geografis seperti kosmokrat, internet lebih dari sekedar pusat informasi.

Meski begitu, cara kosmokrat merangkul internet mungkin membuktikan hal yang paling menarik tentang kosmokrat, yakni rasa was-was mereka. Kosmokrat sering dibayar mahal untuk pemahaman mereka akan globalisasi. Tapi mereka pun membayar mahal untuk sukses material mereka, dengan mengorbankan baik kejiwaan maupun kehidupan sosial mereka. Mereka adalah elit yang was-was. Kegelisahan kosmokrat tampaknya adalah bagian yang tak terpisahkan dari meritokrasi mereka. Meritokrat adalah masyarakat fluid yang tidak pernah sangat yakin akan posisi mereka seperti aristokrat yang mewarisi posisi mereka dalam dunia yang jauh lebih stabil.

Rasa was-was kosmokrat mungkin tidak terlau bagus untuk mereka sendiri sebagai individu, tapi tampaknya bagus untuk kelas mereka secara keseluruhan. Samuel Huntington mengatakan bahwa mereka pasti akan mengalami bencana karena rasa puas diri mereka sendiri. Beberapa sebab yang membuat kosmokrat harus diwaspadai sekaligus membuat mereka was-was, meski banyak orang yang mengagumi keterbukaan mereka adalah: pertama kedangkalan mengenal. Kosmokrat cenderung menganggap bahwa mereka mengenal suatu negeri karena sudah bolak-balik hotel dan bandara. Tapi mereka jarang bertemu orang biasa, apalagi mendalami kehidupan mereka. Pengenalan dangkal ini menimbulkan banyak kesalahan.

Kedua adalah seperti yang dikatakan Robert Reich "keterasingan mereka yang sukses". Kosmokrat semakin lama semakin terputus dari masyarakat umum: mereka belajar di universitas asing, menghabiskan waktu banyak di luar negeri dan bekerja untuk lembaga yang berjangkauan global. Mereka membentuk dunia di dalam dunia, terhubung satu sama lain melalui jaringan global yang tak terhitung jumlahnya tapi terpisah dari anggota masyarakat mereka sendiri yang lebih konservatif. Mereka biasanya menyembunyikan diri mereka dalam perumahan pinggir kota yang terisolasi, mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah swasta dan biasanya menghindari pusat-pusat kota. Mereka lebih suka menghabiskan waktu mengobrol dengan mereka di seluruh dunia –lewat telepon atau email- daripada bicara dengan tetangga mereka dalam kegiatan lingkungan sekitar.

Ketiga adalah anggapan bahwa di mana saja mereka berhasil, kosmokrat tampaknya memusnahkan apa saja yang khas di tingkat

lokal. Jaringan hotel internasional seringkali punya desain sama di seluruh dunia, bahkan sampai ke tekstur handuk dan jenis sabun. Ini agaknya semakin meyakinkan bahwa mereka adalah tuan-tuan umat manusia, juga menyebabkan masyarakat tempat mereka berada bersikap menyingkirkan mereka, yang bisa membahayakan.

Namun titik yang paling lemah dari kosmokrasi adalah sikap mereka yang mengembalikan lebih sedikit dari yang mereka ambil, mereka sekaligus melepaskan hak menerima dukungan dan memperl lemah kesehatan dari masyarakat yang menampung mereka. Ketidakberakaran mereka membuat mereka sangat sulit diregulasi. Kritikan pun berdatangan. Mahathir bin Muhammad dan Lee Kwan Yew menentang kosmokrat dari segala ras karena meusak nilai-nilai Asia. Pemimpin Eropa Jacques Delors mencela kosmokrat sebagai "anak emas" dan "spekulator Anglo-Saxon". Christopher Lasch mengutuk elit kosmopolitan ini karena "cara kehidupan mereka yang berfoya-foya", rasa jijik mereka terhadap orang Amerika biasa dan perlawanan mereka yang sombong "terhadap keterbatasan ruang dan waktu".

Jumlah kosmokrat di dunia (pada tahun 2000) diperkirakan sekitar 20 juta orang, 40% orang diantaranya tinggal di Amerika. Angka tersebut akan berlipat ganda pada 2010. Artinya pada tahun ini jumlah kosmokrat sekitar 40 juta orang. Bahkan jika pun angka sebenarnya hanya separuhnya, ia tetap mewakili elit yang lebih luas daripada elit-elit sebelumnya. Tapi jumlah ini tetap sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah 6 milyar manusia di dunia. Sedangkan Huntington memperkirakan bahwa, di luar dunia Barat, kurang dari 50 juta orang mengenal jenis budaya kosmopolitan yang dia hubungkan dengan manusia Davos.

Namun layaknya pertarungan atau kompetisi, tentu tidak wajar jika tidak ada lawan. Maka lokalkrat adalah lawan yang tangguh bagi kosmokrat. Lokalkrat adalah orang lokal yang masuk dalam jaringan global (meski sudah termasuk pebisnis besar di pasar) yang menjadi makmur justru karena globalisasi belum sekomplit yang diinginkan para kosmokrat. Dengan kata lain, meski sudah berada di pasar global, namun jantung komersial (dan mungkin juga psikologis) para lokalkrat tetaplah pasar lokal. Bahkan beberapa lokalkrat menjadi "ayah" dari kosmokrat. Tak heran jika ada yang menyebut lokalkrat adalah kelas pemenang paling luas dalam globalisasi.

Jika begitu keadaannya, apakah para kosmokrat bisa berkuasa seperti halnya para korporatokrat. Atau sesungguhnya kosmokrat

dan korporatokrat adalah 2 sisi mata uang pada 1 uang. Orang bisa saja mengatakan bahwa tidak ada “benturan peradaban”, yang ada hanya kesulitan yang dialami satu peradaban yang sedang naik daun –peradaban kosmokrat- yang sedang bangkit melawan lusinan peradaban yang ingin menghalanginya. Dalam pertempuran ini, para kosmokrat pada pandangan pertama tampaknya unggul. Mereka memiliki otak dan banyak uang. Jika begitu, mungkin bisa dipastikan bahwa kosmokrasi akan tercipta pada saat atau setelah korporatokrat berkuasa.

Jika dilihat dari sudut pandang Sosiologi-Ekonomi, kosmokrat adalah kelas dimana konsumerisme adalah segalanya. Dalam kelas kosmokrat, mengonsumsi barang atau jasa adalah sesuatu yang sangat urgen bahkan sampai pada taraf berlebihan. Di era globalisasi seperti saat ini⁹⁵, rasanya tak bisa dipungkiri bahwa mengonsumsi bukan hanya kebutuhan, tapi juga gaya hidup. Jean P. Baudrillard mengatakan bahwa konsumsi bukan sekedar sebuah perilaku yang aktif dan kolektif, tapi konsumsi juga merupakan sebuah paksaan, sebuah moral, konsumsi adalah sebuah institusi.⁹⁶

Ia juga mengatakan bahwa Konsumsi adalah keseluruhan nilai, implikasinya adalah konsumsi berfungsi sebagai penyatu kelompok dan penyatu kontrol sosial. Tentu saja kontrol sosial dalam kelompoknya. Masyarakat kosmokrat atau masyarakat konsumsi merupakan masyarakat pembelajaran konsumsi, pelatihan sosial dalam konsumsi- artinya sebuah cara baru dan spesifik bersosialisasi dalam hubungannya dengan munculnya kekuatan-kekuatan produktif baru dan restrukturisasi monopolistik sistem ekonomi pada produktivitas yang tinggi.⁹⁷

Masih menurutnya, sesungguhnya kita berada dalam suatu titik di mana “konsumsi” menyita seluruh kehidupan kita, di mana semua aktivitas dirangkai dengan gaya yang sama, saluran kepuasan dikedepankan dari jam ke jam di mana “lingkungan hidup” adalah total, semua diatur, disibukkan dan dibudidayakan dalam fenomenologi konsumsi, penyesuaian umum dengan benda-benda, kekayaan, jasa-jasa, dan saluran-saluran relasi sosial.⁹⁸ Jika begini, timbul, tumbuh dan

95 Globalisasi telah membuat dunia ini menjadi satu (menyatu), bukan hanya dari sisi teknologi, namun juga Politik (ideologi), ekonomi, hukum, termasuk juga budaya (gaya hidup).

96 Jean P. Baudrillard, *Masyarakat Konsumsi*, alih bahasa Wahyunto, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), hlm.91.

97 *Ibid.*,

98 *Ibid.*, hlm.9.

jayanya kosmokrasi rasanya tak bisa dielakkan. Atau memang sedang berlangsung.

BAB II

PERKEMBANGAN GLOBALISASI DI DUNIA

A. Pengertian Globalisasi

Dimulainya pelayaran pada abad – 15 oleh bangsa Eropa untuk menemukan jalur perdagangan baru, mendirikan koloni, dan membawa rempah-rempah menunjukkan bahwa pada masa lalu, sebuah proses yang kita ketahui saat ini sebagai globalisasi telah dimulai. Berdirinya *United Nation* pada tahun 1945 membuat hampir seluruh negara di dunia tampak terintegrasi dengan duduk bersama menjadi satu, baik negara besar maupun kecil, dimana masing-masing memiliki hak satu suara (*one vote*).

Runtuhnya *Berlin Wall* pada tahun 1989 telah membuat blok Barat (Amerika Serikat) menjadi kekuatan unipolar yang ditandai dengan bubarnya blok Timur (Uni Soviet) pada tahun 1991 yang kemudian melahirkan apa yang dinamakan dengan “dunia global”. David Held mengatakan bahwa globalisasi pada dasarnya adalah “*interconnectivity*”, dan hal ini terjadi secara berbeda-beda menurut tingkat-tingkat dari empat faktor: *velocity, extensity, intensity, and impact*.¹

Tidak adanya pembatasan terhadap teritorial suatu wilayah negara yang kemudian berpengaruh pada meleburnya dunia dalam berbagai aspek, mulai dari ekonomi, budaya, teknologi, dan politik telah menciptakan suatu negara yang sangat luas dan terbuka, dimana negara-negara tersebut saling terkait antar negara yang satu dengan yang lain. Fenomena ini memungkinkan manusia untuk dapat

1 Lihat, Held, David, et al., 1999, *Global Transformation*, Stanford; Stanford University Press, hal, 16.

melakukan aktifitas dengan manusia di belahan dunia yang lain dalam waktu yang cukup singkat dengan hasil yang maksimal.

Lodge mendefinisikan globalisasi sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan².

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi merupakan proses masuk ke ruang lingkup dunia. Globalisasi berasal dari kata *globe/global*, yaitu dunia atau bola dunia.

Adanya keterbukaan akses perekonomian dunia menimbulkan efek terjadinya globalisasi ekonomi, dimana masing-masing negara dapat melakukan kegiatan ekonomi di masing-masing wilayah dan melebur dengan perekonomian internasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan masuknya perusahaan-perusahaan asing di berbagai negara yang melakukan perdagangan dan investasi untuk meningkatkan *income* dan *network* di sebuah wilayah baru sehingga mampu menguasai perekonomian belahan dunia melalui bisnis mereka.

Dari aspek teknologi, dapat dilihat juga bahwa munculnya peran alat-alat berteknologi canggih telah membuat manusia mampu mendapatkan akses informasi di suatu wilayah lain dengan sangat cepat, menyelesaikan pekerjaannya dari jarak jauh dengan waktu yang relative singkat, serta mampu menjangkau suatu tempat dengan santai tanpa mengeluarkan energi sedikitpun. Fenomena ini kemudian dapat disimpulkan sebagai telah terjadinya globalisasi teknologi.

Selain itu, globalisasi dari sisi budaya juga cukup mempengaruhi gaya hidup manusia sehari-hari dalam tatanan masyarakat dan organisasi. Salah satu contoh telah terjadinya globalisasi *kultural* ini dapat dilihat dari adanya hegemoni budaya asing yang mempengaruhi budaya-budaya local, sehingga kearifan local menjadi berkurang atau bahkan berganti dengan gaya hidup dan budaya wilayah lain.

Sedangkan dari segi politik dan institusional, globalisasi mampu menciptakan sebuah proses perubahan yang signifikan dari sebuah sistem pemerintahan kaku dan otoriter menuju sistem pemerintahan yang lebih transparan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2 Lihat, Winarno, Budi, 2004, *Globalisasi: Wujud Imperialisme Baru: Peran Negara dalam Pembangunan*, Tajidu Press, hal, 39.

B. Transformasi Dunia Global

Hampir seluruh belahan dunia sudah dipengaruhi oleh berbagai macam bentuk globalisasi mulai dari aspek ekonomi, teknologi, budaya sampai pada aspek politik. Berbagai contoh dari pengaruh globalisasi tersebut dapat dilihat buktinya di berbagai negara, diantaranya adalah :

1. Globalisasi di Eropa

Munculnya kelas-kelas borjuis atau kelas menengah, yang umumnya berasal dari kaum pedagang, telah mengimbangi kekuasaan para tuan tanah dan raja di Eropa pasca revolusi industri. Kaum pedagang ini pula yang kemudian mengorganisir revolusi Prancis yang menggulingkan Louis XVI. Momen penggulingan Louis XVI ini disebut Fukuyama dalam artikelnya *the End of History*, sebagai tonggak lahirnya demokrasi.

Pada abad 17 – 20 negara-negara di Eropa telah melakukan pelayaran untuk membuka wilayah baru, pada awalnya demi kepentingan perdagangan dengan dunia luar, namun dalam perkembangannya berubah menjadi penguasaan wilayah-wilayah tersebut untuk dilakukan eksploitasi kekayaan alam yang terkandung di wilayah tersebut dan menjadikannya wilayah koloni atau jajahan Negara-negara Eropa yang menjadi awal dimulainya imperialisme. Beberapa contoh dari Negara-negara tersebut diantaranya adalah Inggris, Portugis, dan Belanda yang berhasil membuka jalur pelayaran, mengeksploitasi sumber daya alam, dan menguasainya dengan menggunakan kekuatan.

Disamping itu Negara-negara tersebut juga mulai membentuk konsorsium untuk membangun perusahaan raksasa yang dimonitor oleh para penguasa saham di perusahaan tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya adalah *British East India Company* dan *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* atau VOC yang oleh bangsa Indonesia dikenal sebagai "Kompeni" dimana merupakan MNC pertama di dunia, disusul dengan berdirinya *Svenska Ostindiska Companiet* atau SOIC milik Swedia dan *Emden Company* milik Prusia.

Dalam perkembangannya beberapa perusahaan tersebut diberi kewenangan oleh negaranya untuk memiliki kekuatan militer sendiri, membangun wilayah koloni, mengadakan hubungan diplomasi, dan memiliki hak membangun sistem pemerintahan di negara jajahannya.

Salah satu contohnya adalah *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) yang didirikan pada 20 maret 1602 merupakan perusahaan

Belanda yang memiliki monopoli atas aktivitas perdagangan di Asia. VOC merupakan badan usaha istimewa karena didukung dan difasilitasi oleh negara. Bisa dikatakan VOC adalah sebuah negara didalam negara.

Dari sudut pandang ini dapat dilihat bahwasanya globalisasi yang terjadi di Eropa telah membuat negara-negara Eropa mampu memperluas dan menguasai perdagangan di hampir seluruh benua di dunia melalui perusahaan-perusahaan yang dimiliki. Bahkan kekuatan ekonomi melalui MNCs-nya tersebut mampu menciptakan suatu rezim pemerintahan yang berkuasa di suatu negara jajahan untuk mengontrol dan menguasai sumber daya serta kemudian mengakhiri kekuasaan sang penguasa atau raja di wilayah jajahannya tersebut.

2. Globalisasi di Asia

Wilayah Asia merupakan wilayah yang kaya akan rempah-rempah dan memiliki jalur yang cukup strategis dalam pelayaran dan perdagangan. Sebagai contoh misalnya, Negara-negara Eropa dan Timur Tengah banyak melakukan aktifitas pelayaran di wilayah ini selain untuk berdagang juga untuk menyebarkan kebudayaannya masing-masing serta mengembangkan politik Barat dan politik Islam di wilayah tersebut. Pengaruh keduanya kemudian dipakai oleh negara-negara di wilayah Asia Tenggara sehingga memancing konflik dan memunculkan kepentingan masing-masing pihak. Akibatnya Negara-negara seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia dijajah asing karena mudah untuk diadu domba.

Negara-negara di wilayah Asia hampir seluruhnya pernah mengalami masa penjajahan oleh bangsa Eropa, dimana sistem pemerintahan negara-negara Asia kemudian mampu atau dipaksakan untuk mengikuti sistem barat. Sebagai salah satu contoh fakta sejarahnya dapat kita lihat dari sejarah Jepang, dimana sistem pemerintahannya yang sudah bertahan selama 300 tahun lebih, menjadi runtuh seketika akibat intervensi ekonomi dari Amerika Serikat.

Pada era pemerintahan Tokugawa bakufu, Jepang memiliki kebijakan untuk mengisolasi diri dari dunia luar (sakoku). Namun, semenjak munculnya para pedagang dari Belanda dan Amerika Serikat yang mulai berdagang disana, lambat laun pemerintahan Tokugawa Jepang mulai mengendurkan kebijakannya. Terlebih pasca mendaratnya kapal hitam (blackship) yang dipimpin oleh Komodor Mathew Perry pada tahun 1853 telah membuat Jepang terpaksa menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat untuk membuka tiga pelabuhannya (Shimoda,

Nagasaki, Hakodate) demi kelancaran arus lalu lintas perdagangan milik Amerika Serikat³.

Ditandatangani perjanjian perdagangan (Perjanjian Kanagawa) telah menimbulkan kegoncangan di lingkungan pemerintahan Tokugawa beserta para daimyo. Perjanjian ini ditentang oleh para daimyo yang tidak puas terhadap pemerintahan Tokugawa dengan meneriakkan semboyan "Hormati Kaisar, Usir Penjajah". Protes keras ini kemudian mendorong beberapa daimyo di wilayah Satsuma dan Chosu untuk melakukan konsolidasi kekuatan demi melawan pemerintahan Tokugawa yang sudah berkuasa lebih dari 2 abad dengan memaksa pemimpin terakhir bakufu (Tokugawa Yoshinobu) untuk menyerahkan kekuasaannya di tangan kaisar. Hal ini kemudian menandai berakhirnya era Tokugawa (tahun 1868) dan menjadi awal gerakan restorasi Meiji⁴.

Walaupun Tokugawa telah menyerahkan kekuasaannya kepada Kaisar Meiji, namun masih memiliki pengaruh yang cukup kuat sehingga mampu menghimpun kekuatan yang berasal dari beberapa klan yang masih loyal terhadap pemerintahan Tokugawa, serta berniat mendirikan pemerintahannya sendiri di wilayah Ezo (Hokaido) dengan membentuk negara Republik Ezo, yang disponsori oleh Amerika Serikat, Perancis, dan Negara sekutu yang lain. Berdirinya Republik Ezo kemudian menjadi momentum pertama dalam berlangsungnya sistem pemilihan umum yang mana rakyat Jepang memiliki hak untuk memilih pemimpinnya secara langsung, namun Negara ini tidak dapat bertahan lama karena kalah berperang melawan pasukan Kaisar Meiji⁵.

Adanya kegiatan ekonomi berupa perdagangan antar negara yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di Jepang ini menunjukkan bahwa proses globalisasi ekonomi sedang berlangsung yang kemudian mampu merubah kebijakan perekonomian Jepang, dimana tadinya bersifat isolatif / tertutup menjadi semakin terbuka dan terintegrasi dengan perekonomian dunia. Disamping itu, ternyata globalisasi ekonomi yang terjadi di Jepang kemudian berdampak pada runtuhnya kekuasaan Tokugawa yang telah berkuasa selama lebih dari dua abad dan merubah bentuk pemerintahan Jepang secara signifikan. Bahkan mampu mendorong para pengikut Tokugawa untuk mendeklarasikan

3 *Treaty of Kanagawa*, diunduh pada 07 Oktober 2016,

<<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/310822/Treaty-of-Kanagawa>>

4 Restorasi Meiji: Suatu Model Pembelajaran Modernisasi Dari Jepang, diunduh pada 07 Oktober 2016,

<<http://saripedia.wordpress.com/2011/05/12/restorasi-meiji-suatu-model-pembelajaran-modernisasi-dari-jepang/>>

5 Ibid.

Negara independen di Republik Ezo (Hokaido) dan melaksanakan sebuah proses pemilu pertama kali di wilayah Jepang.

3. Globalisasi di Timur Tengah

Wilayah Timur Tengah umumnya merupakan wilayah gurun pasir yang gersang dan tandus. Sebelum era modernisasi muncul di wilayah tersebut, penduduk jazirah arab merupakan suku nomaden yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan selalu mencari daerah baru yang memiliki sumber mata air untuk kelangsungan hidup mereka. Salah satu sumber kehidupan di wilayah tersebut dinamakan wilayah oasis, yang merupakan sumber mata air untuk kelangsungan hidup bagi para penghuni di sekitarnya. Sebelum datangnya Islam sebagai salah satu agama terbesar di dunia, wilayah jazirah arab merupakan daerah tribal, dimana sering terjadi pertumpahan darah antar suku untuk memperebutkan wilayah oasis. Setelah datangnya Islam, wilayah ini kemudian menjadi daerah yang maju dan sempat meluas menguasai daratan Iberia di Eropa sampai ke wilayah India.

Pada abad 20 sampai awal abad 21 ini, beberapa negara di wilayah Timur Tengah telah bertransformasi menjadi daerah industri maju dan makmur akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Timur Tengah juga merupakan daerah yang kaya akan sumber daya mineral berupa gas alam dan minyak bumi. Dengan banyaknya pasokan sumber gas alam dan minyak bumi ini menjadikan negara-negara Arab sebagai partner ekonomi yang sangat penting di dalam kancah internasional.

Banyaknya sumber daya mineral yang dimiliki oleh negara-negara Arab, kemudian dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan dalam negeri (industrialisasi) dan menyejahterakan rakyatnya. Demi memperlancar proses industrialisasi tersebut, negara-negara Arab banyak bersandar pada sumber luar negeri, baik berupa kebutuhan teknologi, bahan makanan, dan lainnya, sehingga pengaruh lembaga keuangan internasional seperti IMF (*International Monetary Fund*) dan Bank Dunia (*World Bank*) terhadap politik regional negara-negara Arab lebih kuat dari peran seorang menteri atau pengusaha bahkan sebuah organisasi profesi dalam negeri sekalipun.

Paska runtuhnya Soviet dan melemahnya komunisme pada 1991, para penganut kapitalisme segera melihat peluang ini untuk menggemakan slogan pasar bebas internasional secara meluas. Disamping itu, teknologi informasi juga berkembang pesat, dimana jaringan internet merupakan *gateway* yang sangat instan dan mudah

digunakan untuk menjelajah dunia dan mengumpulkan informasi secara cepat dan aman. Slogan pasar bebas ini dengan sangat cepat mewabah di seluruh dunia termasuk timur tengah, baik melalui politik maupun teknologi informasi.

Masuknya pasar bebas ke Negara-negara Arab menunjukkan bahwa pengaruh globalisasi yang pada umumnya berasal dari Barat telah masuk dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat timur tengah. Masyarakat timur tengah kini mulai menikmati film *Hollywood*, terbiasa dengan makanan *Fried Chicken* dan *Mc Donald*, serta mulai mengubah gaya hidupnya baik dari segi ekonomi, politik, dan budaya meniru model yang telah diciptakan oleh barat.

Kondisi ini kemudian menciptakan kekhawatiran dari kalangan kritikus sosial di wilayah timur tengah. Kalangan kritikus sosial agak khawatir terhadap fenomena globalisasi budaya dengan melemahnya standard nilai yang nampak dalam dominasi hiburan hollywood lewat sarana informasi global. Banyak kalangan memprediksikan bahwa "*the golden archers of McDonalds*" (busur emas McDonalds) sendiri merupakan sebuah "*cultural threat*" (ancaman budaya).

Benjamin Barber dalam bukunya "*Jihad versus McWorld*" juga mengatakan bahwa, meluasnya arus globalisasi seperti *Mc Donald*, *Macintos*, dan teknologi informasi lainnya justru akan menambah alasan kaum radikal dan kalangan primordial untuk melakukan aksi balasan dengan *hujjah* membendung arus globalisasi, dan tidak mustahil berupa reaksi kekerasan. Hal ini cukup masuk akal, dilihat dari kilas balik sejarah timur tengah di masa lalu yang kenyang akan peperangan dan perlawanan antar dua kubu (perang salib)⁶.

Terhadap fenomena globalisasi di atas, maka dapat dikatakan bahwa negara-negara di wilayah timur tengah saat ini sedang menghadapi kemungkinan perubahan transformasi politik ataupun menunggu kondisi sosial masyarakat timur tengah, apakah mereka masih menerima sistem pemerintahan otoritarian seperti yang sudah terlaksana selama ini atau melakukan sebuah revolusi pemerintah yang berujung pada perang sipil, seperti yang telah terjadi saat ini di wilayah Yaman, Mesir, Suriah, dan Libya.

Dalam kasus-kasus yang terjadi di berbagai negara tersebut sudah jelas bahwasanya globalisasi yang berawal dari sebuah proses membuka jalur perdagangan dengan wilayah lain sampai pada praktik-praktik sharing kebudayaan, aktifitas ekonomi, dan politik di wilayah

6 Lihat, Barber, Benjamin, 1995, *Jihad vs. McWorld*, New York; Times Books.

tersebut cukup berpengaruh. Seperti yang sudah dipaparkan oleh David Held, bahwasanya globalisasi pada dasarnya adalah sebuah *"interconnectivity"* di mana aktivitas kebudayaan, ekonomi, dan politik antar negara saling terkait baik secara perilaku maupun ideologi. Pada dasarnya efek dari globalisasi ini, selain mempengaruhi aktifitas ekonomi dan politik suatu negara yang memiliki sistem pemerintahan demokratis, juga mempengaruhi sistem pemerintahan otoriter yang nantinya akan berakhir menuju ke proses demokratisasi negara tersebut. Tidak lepas dalam hal ini, China sebagai negara yang otoriter sekali pun telah mampu dipengaruhi oleh gelombang globalisasi sehingga proses demokratisasi mulai tampak di negara yang dijuluki sebagai negeri tirai bambu tersebut.

BAB III

POLITIK PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN CHINA

A. Sejarah Globalisasi di China

Pada awal abad masehi, China telah membuat gebrakan arus globalisasi pertama dengan mengadakan hubungan dagang dengan pihak Eropa (kekaisaran Roma). Munculnya istilah “silk road” atau jalur sutra telah menunjukkan bukti bahwasanya China telah memiliki perekonomian dan teknologi yang cukup maju, dimana telah mampu melakukan interaksi berupa hubungan dagang dengan pihak luar. Apabila dilihat dari arus perdagangan saat itu yang masih memakai peralatan tradisional, menunjukkan bahwa kain sutra yang berasal dari China merupakan barang dengan nilai harga jual tinggi dan berkualitas pada masanya.

China juga melahirkan sebuah pemahaman “Pax Sinica”, yaitu sebuah pemahaman yang muncul pada masa kekuasaan Dinasti Tang untuk menebarkan pengaruhnya di wilayah lain¹. Pada era kekaisaran ini China telah membuka hubungan dengan dunia luar, baik dengan pihak Eropa Barat maupun Timur Tengah. Di dalam pertemuan tersebut kemudian terjalin sebuah proses pengenalan kebudayaan masing-masing pihak, munculnya perdagangan, dan bahkan tukar menukar ilmu pengetahuan. Dari hubungannya yang sangat intens dengan pihak Eropa Barat tersebut maka tidak heran apabila pemikiran-pemikiran Barat kemudian dengan cepat merasuk ke dalam pikiran rakyat China.

¹ Lihat, Wibowo, I, 2004, *Belajar Dari Cina : Bagaimana Cina Merebut Peluang Dalam Era Globalisasi*, Jakarta; Penerbit Buku Kompas, hal, 12.

Pada tahun 1840 terjadi sebuah pertempuran dimana Inggris berhasil mendobrak pintu perdagangan China. Peristiwa ini dikenal sebagai "Perang Candu". Peperangan ini menghasilkan kekalahan pada pihak penguasa China pada saat itu, yaitu Dinasti Qing, dan termasuk salah satu faktor pemicu runtuhnya era kekaisaran China.

Runtuhnya kekaisaran China merupakan akibat dari gelombang globalisasi ekonomi, dimana pada awalnya China berusaha untuk ikut serta dalam mengambil keuntungan dari globalisasi, namun malah sebaliknya dihabisi oleh arus globalisasi itu sendiri. Selain itu, munculnya dr. Sun Yat Sen dari kelompok revolusioner juga menjadi salah satu faktor politik yang menentukan dalam proses runtuhnya era kekaisaran China.

Paska runtuhnya era kekaisaran China, Sun Yat Sen sendiri memilih untuk membangun kembali China dengan membentuk pemerintahan republik dan mengangkat dirinya sebagai Presiden Republik China. Tentu saja hal ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemikiran barat, dimana kaum borjuis atau kelas menengah di Eropa mampu meruntuhkan kekuasaan Louis XVI dan mengganti sistem perekonomian Eropa dari feodalisme menjadi sistem kapitalisme.

Pada tahun 1949 terjadi revolusi komunis yang memicu perang sipil di China antar partai penguasa Kuomintang dan partai Komunis China. Perang sipil ini pada akhirnya dimenangkan oleh pihak komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong yang kemudian sangat menentukan sistem pemerintahan China di masa millennium. Kemenangan Mao Zedong berimbas pada munculnya revolusi kebudayaan proletar yang diterapkan secara konsisten untuk menghancurkan segala macam warisan dari kebudayaan yang berumur ribuan tahun². Di bawah kepemimpinan Mao Zedong, China berusaha menghapus kebudayaan tradisionalnya menjadi kebudayaan baru yang berporos marxisme – sosialisme.

Setelah Mao Zedong wafat, maka kepemimpinan Republik Rakyat China dilanjutkan oleh Deng Xiaoping. Dalam kepemimpinan Deng Xiaoping ini China menjadi lebih agresif dalam hal globalisasi kebudayaan. Hal ini diwujudkan dari tingginya intensitas penanaman modal asing di negara China, sehingga muncul berbagai kios dengan simbol yang berasal dari barat. Selain China, seluruh dunia pun juga mengalami "McDonaldisasi" karena hampir tidak ada negara di dunia yang tidak

2 Lihat, Price, Don C, 1974, *Russia and the Roots of the Chinese Revolution*, Cambridge, MA: Harvard University Press.

memiliki McDonald³. Selain itu, Deng Xiaoping juga melakukan pemberangusan terhadap kelompok-kelompok yang resisten terhadap pemerintahannya. Contoh riil yang nyata adalah tragedi Tiananmen yang terjadi pada tanggal 04 Juni 1989, dimana para kaum intelektual China yang menentang pemerintahan Deng Xiaoping dimusnahkan dalam rangka untuk meredam gerakan reformasi China.

Kemudian pada tahun 1992, Deng Xiaoping membuat sebuah terobosan untuk menentukan masa depan China yang kemudian dikenal dengan "perjalanan ke selatan"⁴. Dalam hal ini Deng berhasil mengajak rakyat China untuk melanjutkan apa yang dinamakan dengan "gaige, kaifang" atau "reformasi dan membuka diri" sehingga membuat lawan-lawan politiknya tidak mampu berlutut dan China pun terus melangkahkan gerakannya masuk dalam deru globalisasi⁵.

Pada saat ini China telah berhasil menikmati jerih payahnya dari hasil keaktifannya dalam arus globalisasi dunia. Rakyat China ikut bersorak-sorai gembira ketika negaranya mampu bersaing dalam perekonomian internasional, rakyat China bangga ketika negaranya mampu menjuarai berbagai olimpiade dunia, serta mampu memposisikan dirinya sebagai Negara dengan GDP tertinggi di dunia. Untuk saat ini dunia pun tertegun melihat perkembangan China yang cukup signifikan sehingga China menjadi Negara yang cukup diperhitungkan bukan karena komunismenya yang kemudian membuat China terlihat menutup dan mengisolasi diri melainkan karena keterbukaan Negara China itu sendiri yang telah membuat dunia terkesan.

B. Politik Pemerintahan dan Kebijakan Ekonomi China

Republik Rakyat China memiliki sistem pemerintahan otoritarian, dimana hanya terdapat satu partai tunggal yang berkuasa dalam kursi pemerintahannya. Namun dalam perkembangannya, China memiliki sistem multipartai yang melebur dalam sebuah wadah yang ditoleransi oleh penguasa China. Wadah dari persatuan partai-partai politik kecil di China itu disebut sebagai "*united front*"⁶.

Tujuan dari *united front* adalah untuk mengakomodir partai-partai

3 Lihat, Barber, Benjamin, 1995, *Jihad vs. McWorld*, New York; Times Books.

4 Lihat, Meisner, Maurice, 1996, *The Deng Xiaoping Era. An Inquiry in the Fate of Chinese Socialism, 1978-1994*, Hill and Wang Inc., US.

5 Lihat, Wibowo, I, 2004, *Belajar Dari Cina : Bagaimana Cina Merebut Peluang Dalam Era Globalisasi*, Jakarta; Penerbit Buku Kompas.

6 *List of Political Parties in People's Republic of China*, diunduh pada 25 Oktober 2016, <http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_parties_in_the_People%27s_Republic_of_China>

politik kecil untuk turut serta dalam percaturan politik di China, akan tetapi tidak boleh melanggar batas-batas aturan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat China. Dalam artian partai – partai politik kecil ini harus beraliansi dengan partai berkuasa yaitu Partai Komunis China, serta mendukung program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah China dan tidak diizinkan untuk mengambil peran sebagai partai oposisi.

Disamping itu, terdapat juga beberapa partai politik China yang memposisikan diri sebagai partai oposisi dari Partai Komunis China, partai politik tersebut kemudian diblokir oleh pemerintah berkuasa di China, dan masing-masing pemimpin partainya dijebloskan ke penjara sebagai tahanan politik karena menentang kebijakan pemerintah China yang mayoritas berasal dari Partai Komunis China. Meski demikian, para loyalis dari partai oposisi tersebut tetap mengaktifkan partainya, dan melancarkan gerakan bawah tanah untuk mengkritisi kebijakan pemerintah China yang cenderung sangat otoriter. Para loyalis partai oposisi tersebut membangun kantor sekretariat partainya di luar negeri, sehingga tidak mudah dijangkau oleh pemerintahan China⁷. Sampai saat ini aktivitas mereka masih ada, walaupun belum cukup kuat untuk menumbangkan partai berkuasa, yaitu Partai Komunis China yang saat ini menguasai hampir seluruh pemerintahan di daratan China.

Politik pemerintahan China tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang China ratusan tahun yang telah melewati masa dari generasi ke generasi para pemimpinnya. Diawali dengan munculnya pemerintahan monarki atau kekaisaran, dimana pada saat itu masyarakat kelas atas adalah para pemilik tanah yang biasa disebut tuan tanah. Pada saat itu sistem feodal sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat di masa kekaisaran atau dinasti sehingga para pemilik tanah memiliki kekuasaan yang sangat besar untuk melakukan eksploitasi terhadap kaum petani dan kaum buruh, sedangkan pergerakan para *merchant* atau pedagang sangat dibatasi oleh sistem kerajaan yang lebih mengacu pada sistem kepemilikan atau tuan tanah yang lebih dikenal dengan istilah feudalisme.

Paska runtuhnya masa kekaisaran, maka sistem pemerintahan China berubah total sejalan dengan apa yang tengah terjadi di dunia pada waktu itu. Gelombang globalisasi yang berasal dari barat telah melakukan penetrasi terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat China pada waktu itu. Tidak hanya dari aspek kebudayaan, namun juga

⁷ *List of Political Parties in People's Republic of China*, diunduh pada 25 Oktober 2016, <http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_parties_in_the_People%27s_Republic_of_China>

dari aspek ekonomi, pendidikan, sistem pemerintahan telah diubah oleh sebuah gelombang besar yang bernama globalisasi. Seorang Sun Yat-sen, tokoh revolusioner China yang mengenyam pendidikan Barat pun berhasil mengubah sistem pemerintahan China menjadi sistem pemerintahan yang sama dengan dunia Barat dan menjadikannya sebagai sebuah Negara Republik China.

Tidak lama setelah pemerintahan Republik China berdiri, kekuatan militer Jepang datang untuk menginvasi wilayah China daratan. Kedatangan pasukan Jepang ke wilayah China ini kemudian memaksa partai berkuasa Kuomintang untuk bersatu dengan partai Komunis yang saat itu dipimpin oleh Mao Zedong untuk melakukan perlawanan terhadap agresi militer Jepang. Perlawanan terhadap agresi militer Jepang ternyata berhasil membuat pihak Jepang menyerah. Pasca mundurnya militer Jepang dari daratan China, kemudian memicu perebutan kekuasaan antar Kuomintang dengan Komunis yang berakhir pada berkuasanya Partai Komunis China pada 1 Oktober 1949.

1. Era Mao Zedong : Revolusi Kebudayaan Proletar

Berkuasanya pemerintahan Partai Komunis China telah menimbulkan perubahan secara menyeluruh pada sistem pemerintahan China yang sebelumnya telah memakai sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Partai Kuomintang. Pada masa inilah terjadi sebuah perubahan dari Republik China menjadi Republik Rakyat China. Dalam pemerintahannya Mao Zedong menegaskan bahwasanya masyarakat China harus berpijak pada sistem tanpa kelas seperti yang telah dicita-citakan oleh Karl Marx. Pemerintahan Mao Zedong menginginkan China yang secara formal membuang semua kebudayaan di masa lampau dan menggantikannya dengan kebudayaan global yang diwakili oleh Marxisme atau Komunisme. Dengan mewabahnya paham komunisme di seantero penjuru China, maka hal-hal yang tidak berbau komunisme akan dilikuidasi, baik dari segi agama, budaya borjuis – kapitalis, sampai pada kebutuhan primer dan sekunder. Hal ini dilakukan sebagai upaya dari Mao Zedong untuk membangkitkan semangat revolusioner rakyat China sehingga pada tahun 1966 muncul sebuah istilah yang disebut masa "Revolusi Kebudayaan Proletar"⁸.

Revolusi kebudayaan ini bertujuan untuk mengarahkan rakyat China pada ideologi komunisme yang berusaha menghapus kebudayaan lama dengan memakai ilmu sosialis, seni sosialis, pikiran sosialis,

8 Lihat, Meisner, Maurice, 1982, *Marxism, Maoism & Utopianism*, Madison, WI: University of Wisconsin Press.

dan berbagai atribut yang serba sosialis. Dengan begitu Partai Komunis China yang berkuasa menjadi satu-satunya partai tunggal yang kuat dengan dukungan dari jutaan rakyat yang memiliki pemikiran komunis yang sudah tertanam dalam jiwa dan raga. Pada masa ini, hampir seluruh tokoh-tokoh oposisi China dibungkam dan dihabisi oleh pemerintahan Mao dan pengaruh komunisme-nya, sehingga pemerintahan Mao Zedong menjadi pemerintahan yang tunggal dan otoritarian.

Selain itu dibawah kepemimpinan Mao, China menerapkan sistem perekonomian sosialis terpusat. Perekonomian pada masa Mao dibentuk pada tahun 1952, dimana sistem yang diterapkan sama dengan sistem milik negara-negara komunis di Eropa. Perekonomian di bawah Mao memiliki banyak kelemahan dan masalah yang rumit dalam beberapa hal. Kebijakan "lompatan besar ke depan" telah menambah bobot masalah perekonomian yang ada. Adanya substitusi impor, mencoba mencukupi kebutuhannya sendiri, dan rendahnya barang-barang konsumtif, menjadi faktor-faktor yang mengakibatkan perekonomian China di era 1950 – 1980 kurang begitu baik⁹. Hal ini diperparah lagi dengan memburuknya hubungan China dengan negara-negara adidaya (Amerika Serikat dan Uni Soviet) pada pertengahan 1960an, sehingga banyak kalangan ekonom mengecam keputusan ini dengan berpendapat bahwa keputusan ini akan menggeser banyak industri China yang menjauh dari wilayah pantai yang barang-barangnya dapat dengan mudah diekspor setelah diproduksi. Pada akhirnya perekonomian China akan mengambil jalan yang berbeda pada tahun 1980an.

Pada masa akhir kepemimpinan Mao Zedong, kondisi perpolitikan di China sedang berada pada posisi perebutan pengaruh dan dominasi antar pemimpin Partai Komunis China, yaitu antara *gang of four* yang merupakan sebuah fraksi yang dipimpin oleh Jiang Qing (istri dari Mao Zedong) melawan fraksi Deng Xiaoping. Pertarungan politik ini diawali dengan adanya gagasan dari Deng Xiaoping untuk melakukan reformasi ekonomi dan merevisi "revolusi proletar" yang sudah dianggap gagal dalam meningkatkan infrastruktur perekonomian China dan menyejahterakan rakyatnya. Sedangkan Jiang Qing beranggapan bahwa Deng Xiaoping merupakan tokoh yang sudah terpengaruh oleh ideologi pasar bebas atau kapitalisme barat sehingga harus disingkirkan dari Partai Komunis China. Rivalitas ini semakin memuncak pasca wafatnya Perdana Menteri China, Zhou Enlai. Namun, pada akhirnya pihak Deng Xiaoping berhasil mengambil alih kekuasaan

9 Lihat, Mittler, Rana, 2011, *China Modern Menguasai Dunia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal, 146.

Partai Komunis China dari tangan *gang of four* paska terjadinya insiden Tiananmen.

Insiden yang terjadi pada 5 April 1976 di lapangan Tiananmen adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan oleh rakyat atas ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh fraksi Jiang Qing yang melarang rakyat untuk berduka memperingati kematian Perdana Menteri Zhou Enlai karena dianggap bisa menjadi ancaman terhadap kebijakan revolusi kebudayaan. Selain itu, insiden ini juga memberi pengaruh yang cukup signifikan dalam menaikkan popularitas Deng Xiaoping. Fraksi Jiang Qing menganggap bahwa gerakan ini direncanakan dan dipelopori oleh sekutu Zhou Enlai, yaitu Deng Xiaoping. Gerakan dari rakyat ini kemudian dianggap oleh Mao Zedong dan fraksi Jiang Qing sebagai gerakan anti kebudayaan proletar dan kelompok penunggang kapitalis sehingga segera membubarkannya dengan kekerasan. Namun, setelah Mao Zedong meninggal dan kekuasaan *gang of four* runtuh pada bulan Oktober 1976, Deng Xiaoping berhasil mengambil alih kekuasaan. Gerakan ini kemudian dianggap sebagai wujud dari patriotism.

2. Era Deng Xiaoping : *Gaige Kaifang* (Reformasi dan Keterbukaan)

Diangkatnya Deng Xiaoping sebagai pemimpin Republik Rakyat China pasca Mao Zedong, tentu saja secara signifikan mengubah politik pemerintahan China baik dari dalam mau luar negeri. Pada masa Mao Zedong dapat dilihat bahwasanya kebijakan yang dilaksanakan olehnya lebih mengacu pada konsolidasi rezim komunis untuk memperkuat posisi pemerintahannya baik secara nasional maupun internasional. Karena alasan ideologi dan geopolitik yang sama dengan Uni Soviet, maka pada tahun 1950-an, Mao Zedong menerapkan strategi aliansi dengan Soviet untuk melawan dan memblokir kelompok kapitalis Amerika Serikat dan menganggapnya sebagai lawan. Namun, pada tahun 1969, kebijakan Mao berubah pasca terjadinya ketegangan di wilayah perbatasan China – Soviet yang menyebabkan perang antar dua negara tersebut dalam memperebutkan kedaulatan di dalam wilayah sengketa. Karena ancaman dari dua negara super power tersebut sangat membahayakan kedaulatan China, sehingga memaksa pemerintahan Mao Zedong untuk beraliansi dengan Amerika Serikat dalam menghadapi Blok Soviet.

Pada tahun 1980-an, Deng Xiaoping beranggapan bahwa periode revolusi dan perang yang selalu didengungkan oleh Mao Zedong sudah

berakhir dan berganti pada periode perdamaian dan pembangunan. Deng menganggap bahwa China harus mengubah strateginya, yang pada awalnya memihak pada salah satu negara adikuasa (Amerika Serikat) menjadi tidak memihak oleh unsur ideologi manapun, melainkan menawarkan persahabatan pada setiap negara, termasuk Uni Soviet. Pada saat inilah Deng Xiaoping menurunkan anggaran militer pemerintahannya demi meningkatkan pembangunan dalam negeri dan memperkuat perekonomian China. Deng mempersilahkan setiap negara untuk melakukan investasi secara luas di China dengan jaminan keamanan dan fasilitas dari pemerintahannya yang memuaskan.

Pada awal tahun 1980an, Deng Xiaoping membentuk Zona Ekonomi Khusus (SEZ) di kota-kota pelabuhan di wilayah pantai selatan China. Hal ini mengisyaratkan keinginan Deng untuk meletakkan tahap pertama pertumbuhan ekonomi China ; tahap dimulai dengan manufaktur dan industri ringan, serta didorong oleh investasi asing yang akan distimulasi dengan tarif pajak preferensial yang ekstrem dan undang-undang perburuhan. Salah satu contoh misalnya, pembukaan Shanghai pada 1990 telah menyediakan daya pendorong lebih jauh terhadap kebijakan ini. Pada akhirnya China telah beralih orientasi sebagai negara pengekspor yang secara spektakuler cukup berhasil¹⁰.

Kebijakan ini kemudian membuat China menjadi semakin kuat dalam hal pembangunan industri dan ekonomi. Pada tahun 1980-an ini juga sama sekali tidak ada hambatan terhadap hubungan antara China, Amerika Serikat, dan Uni Soviet, serta China dapat meraih keuntungan yang cukup besar dari hasil kompetisi persenjataan dan ketegangan antar dua negara adikuasa tersebut.

Dari tahun ke tahun perekonomian China cenderung meningkat dari hasil sebelumnya, namun pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi tersebut juga disertai dengan adanya inflasi tinggi. Hal ini kemudian memicu terjadinya demonstrasi mahasiswa dalam skala besar yang terkonsentrasi di lapangan Tiananmen. Puncak dari demonstrasi ini terjadi pada tanggal 4 Juni 1989 di lapangan Tiananmen, dimana para kelompok intelektual dilenyapkan secara paksa oleh pemerintah untuk mengamankan situasi yang sudah mulai kacau balau. Tragedi berdarah ini kemudian dikenal sebagai protes Tiananmen 1989. Akibat dari tindakan *offensive* pemerintah untuk mengatasi mahasiswa ini kemudian berdampak pada munculnya ketegangan antara China dengan negara-negara Barat yang merupakan klien investor China.

10 Lihat, Mittler, Rana, 2011, *China Modern Menguasai Dunia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal, 147.

Ketegangan tersebut berupa protes keras yang menyatakan bahwa pemerintah China tidak boleh mengambil tindakan yang melanggar HAM dan akan memberi tekanan kepada pemerintahan China berupa sanksi bagi China atas tindakan yang telah dilakukan di lapangan Tiananmen.

Banyaknya tekanan berupa sanksi yang diberikan oleh negara-negara Barat kepada China, ditambah lagi dengan runtuhnya negara komunis terbesar di dunia (Uni Soviet), telah membuat China berada pada posisi yang sulit. Oleh karena itu, pada tahun 1991, Deng Xiaoping mengambil keputusan untuk mengubah kebijakan pemerintahannya. Kebijakan Deng Xiaoping yang diterapkan kali ini yaitu, memposisikan China sebagai sebuah negara yang tenang dan aman, serta berusaha sebisa mungkin untuk menjaga citra China melalui teknologi informasi, sehingga China hanya akan mengambil tindakan yang seperlunya dianggap penting dalam upaya untuk tidak memancing negara lain untuk mengkritik China. Kebijakan ini dikenal sebagai kebijakan China dalam mengambil posisi *low profile*. Disamping itu China juga tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara Barat. Pada akhirnya kebijakan-kebijakan tersebut cukup efektif dalam meredam kemarahan komunitas internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat pasca terjadinya protes Tiananmen 1989.

3. Era Jiang Zemin : *One China, Two Systems*

Pada tanggal 27 Maret 1993, tonggak kepemimpinan pemerintahan pusat China beralih ke tangan penerus Deng Xiaoping, yaitu Jiang Zemin. Kepemimpinan Jiang menjadi populer setelah para veteran Partai Komunis China mempercayakan tugas-tugasnya kepada Jiang Zemin, akibat dari bertambahnya usia yang semakin tua. Kepemimpinan dari Presiden Jiang Zemin kemudian berhasil menunjukkan tentang bagaimana China benar-benar harus bisa membaur dengan komunitas internasional. Sebagai contohnya, Republik Rakyat China selalu memberikan sikap yang sangat netral dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Pemerintah Jiang Zemin juga tetap konsisten dan mampu bekerja sama dengan Negara lain dalam pelucutan senjata pemusnah massal yang sudah dimulai semenjak 1980an. China juga berhasil melakukan lobi terhadap pemerintahan London, untuk mengembalikan Hongkong ke pangkuan daratan China, serta berusaha untuk bergabung ke dalam WTO pada 1999 tapi belum berhasil.

Namun, disini lain China juga menambahkan anggaran militernya sebagai upaya untuk meningkatkan teknologi persenjataan China yang sudah mulai usang. Hal ini dipicu oleh adanya perang teluk yang terjadi pada tahun 1991, serangan bom terhadap kedutaan China pada saat terjadinya perang Kosovo (1999), dan ketegangan dengan pihak Republik China (Taiwan), dimana China daratan menginginkan Taiwan untuk tidak memerdekakan diri dan selaras dengan pemerintah Republik Rakyat China. Pada saat ini pemerintah China sudah mengeluarkan kebijakan *one China, two system*.

4. Era Hu Jintao : *Peace and Harmony*

Pada generasi pemimpin berikutnya, Republik Rakyat China dipimpin oleh pasangan Hu Jintao – Wen Jiaobao, kedua pasangan ini (Presiden Hu Jintao – Perdana Menteri Wen Jiaobao) melakukan reformasi desain kebijakan China, dimana pemerintahan China lebih terfokus pada masalah perdamaian dan hubungan kerjasama. Pada era 2000-an, China yang tadinya memposisikan diri untuk tidak membuat pemerintahannya menjadi pusat perhatian dunia, sekarang semakin terintegrasi dengan komunitas internasional. Hal ini sudah dibuktikan semenjak 2001, dimana pemerintahan Hu – Wen telah mengimplementasikan kebijakan untuk membaaur dengan komunitas internasional. Sebagai contohnya pemerintah China berhasil bergabung menjadi anggota *World Trade Organization* pada tahun 2001, melakukan upaya kerjasama strategis China – Russia dibawah payung *Shanghai Cooperation Organization* (SCO), turut serta berpartisipasi dalam integrasi wilayah bersama dengan ASEAN, aktif dalam diplomasi ekonomi dengan negara-negara Afrika dan Amerika Latin, membangun kerjasama pembangunan strategis dengan Uni Eropa, kerjasama dengan Amerika Serikat terkait dengan isu-isu global, dan sebagainya.

BAB IV

GLOBALISASI BERPENGARUH PADA PENGUATAN SISTEM EKONOMI PASAR SOSIALIS DI CHINA

A. Integrasi China Dalam Ekonomi Internasional

Keaktifan China dalam komunitas internasional pada era Hu – Wen ini berbanding terbalik 180 derajat dari era Deng Xiaoping dan Jiang Zemin. China yang tadinya tidak ingin menarik perhatian masyarakat komunitas internasional, sekarang berubah menjadi negara yang aktif dan mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam segi perekonomian. Hal tersebut bisa dilihat dari pesatnya pembangunan industri di kota-kota wilayah China (Shenzhen, Shanghai, Chongqing, Nanning, Tianjin). Kemajuan perekonomian dan perindustrian di wilayah-wilayah tersebut tidak luput dari peran pemimpin China yang visioner, tegas, disiplin, dan berani untuk mengambil langkah pertama demi kemajuan China.

Diawali dengan reformasi ekonomi dan keterbukaan yang dilakukan oleh Deng Xiaoping pada tahun 1978 telah membuat China menjadi negara yang kokoh dan siap dalam menghadapi arus globalisasi.

Pada tanggal 17 September 2001, Republik Rakyat China secara resmi menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO). Masuknya China menjadi anggota WTO merupakan usaha dari pemerintah China yang sejak lama ingin bergabung kembali dengan organisasi perdagangan internasional ini. Sebelumnya pada tahun 1948 China merupakan anggota dan salah satu negara pendiri dari *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT), pada waktu itu masih diwakili oleh Republik China yang dipimpin Presiden Chiang Kai Sek. Namun,

pada tahun 1950 China dibawah Mao memutuskan untuk keluar dari GATT. Semenjak dibukanya kran perekonomian China pada tahun 1978 oleh Deng Xiaoping, China kembali ingin masuk menjadi anggota resmi dari lembaga tersebut dan hasilnya sejak 2001 berhasil menjadi anggota resmi. *World Trade Organization* (WTO) merupakan organisasi perdagangan internasional dimana negara anggotanya memiliki keuntungan dalam hal ekonomi dan percepatan industrialisasi. Dengan masuknya China kedalam WTO tentu saja untuk meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor yang tinggi, serta mendapatkan modal dari luar sebanyak-banyaknya. Selain itu, China juga memperoleh prestise internasional dan demikian akan memperkuat legitimasinya baik di dalam negeri maupun di luar negeri¹.

Sementara itu, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang juga menginginkan agar China masuk dalam perekonomian internasional sehingga mereka dapat menikmati barang-barang ekspor dari China yang murah dan permintaan akan barang-barang impor yang tinggi oleh para konsumen di China. Para investor asing juga mengincar kemungkinan memproduksi produk-produk yang *low-cost* di dalam China yang dapat diekspor dan dibuang ke pasar domestik².

Salah satu contoh kesiapan China tersebut bisa dilihat dari salah satu kawasan pesisir China, yaitu wilayah Provinsi Shanxi, Kota Shenzhen. Daerah yang dulunya dikenal sebagai kota nelayan yang miskin dan tertinggal, kini menjadi sebuah daerah perindustrian yang maju. Segalanya berubah ketika Deng Xiaoping pada Januari 1984 menetapkan kawasan itu menjadi zona ekonomi khusus. Dari sini pemerintah China mulai membuka pintu seluas-luasnya kepada investor asing dengan iming-iming perlakuan istimewa. Dalam 30 tahun, kota ini mencatatkan produk domestik bruto US\$ 120 miliar pada 2010. Pendapatan kotor warga diproyeksikan US\$ 20 ribu setahun pada 2020³.

Aspek yang lain terkait berkembangnya sistem perekonomian di China adalah masuknya para pengusaha-pengusaha di China menjadi kader partai, dimana mereka dapat mengontrol dan mengusulkan suara mereka melalui kongres rakyat terkait kebijakan mengenai perekonomian China.

1 Lihat, Wibowo, I, 2004, *Belajar Dari Cina : Bagaimana Cina Merebut Peluang Dalam Era Globalisasi*, Jakarta ; Penerbit Buku Kompas, hal, 63.

2 *Ibid*, hal, 64.

3 Lihat, Majalah Tempo, *Liputan Khusus Ekonomi China : Kapitalisme Buatan Cina*, Tempo Edisi 23 – 29 Januari 2012, hal. 60-61.

Sejak dibukanya perekonomian domestik China terhadap perekonomian global pada 1979 oleh Deng Xiaoping, banyak sekali kalangan investor yang menanamkan modalnya secara besar-besaran di China. Sebagai contoh misalnya, meningkatnya investasi dalam 6 tahun terakhir di salah satu kota di China, yaitu Chongqing. Pada tahun 2005, investasi asing langsung di kota ini sekitar \$516 juta, sedangkan pada tahun 2010 meningkat tajam menjadi \$6.344 juta⁴. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan perekonomian di China menjadi semakin maju serta mampu bersaing dalam skala nasional maupun internasional.

Di wilayah Chongqing ini, pemerintah mampu mengubah kawasan yang tadinya merupakan daerah persawahan kemudian menjadi kawasan pusat belanja dan pusat bisnis seluas 3,6 hektar pada tahun 2003. Hasilnya, setahun sejak menjadi pusat bisnis, angka penjualan di kawasan itu meningkat hingga mencapai 207,37 miliar yuan. Hingga akhir 2010, PDB Chongqing mencapai 792,6 miliar yuan atau sekitar 1.109 triliun rupiah, setara dengan gabungan yang dihasilkan Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan DIY di Indonesia⁵. Hal ini seperti menjawab tantangan Presiden Hu Jintao lima tahun yang lalu, dimana dia berpendapat bahwa Chongqing harus menjadi tiang pertumbuhan utama di bagian barat China.

Pemerintahan China terbukti sangat serius dalam memajukan perekonomian negara dan menyejahterakan rakyatnya. Pertumbuhan ekonomi dan industri yang diterapkan tidak hanya sekedar wilayah pesisir timur dan selatan China saja yang diperhatikan melainkan wilayah barat China juga mulai dipertimbangkan oleh para pemimpinya supaya tidak terjadi ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan sosial antara wilayah China timur, selatan, dan barat.

Seorang analis dari Korea Selatan, Jae Ho Chung menyimpulkan pengamatannya terhadap perkembangan ekonomi China setelah 25 tahun. Menurut Jae Ho Chung, rahasia dibalik kesuksesan China dalam melakukan reformasi bidang ekonominya terkait erat dengan 5 proses, yaitu desentralisasi, marketisasi, diversifikasi kepemilikan, liberalisasi, dan internasionalisasi.⁶

Sejak tahun 1990-an, China telah melakukan desentralisasi kekuasaan administratif maupun otoritas perencanaan anggaran kepada

4 *Ibid*, hal. 55.

5 *Ibid*, hal. 53-54.

6 Chung, Jae Ho, "China's Reforms at Twenty-five: Challenges for Leadership", *China. An International Journal*, Vol. 1, No. 1 (March 2003), hal. 121

pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun dibawahnya. Mereka ini menjadi pelaksana kebijakan ekonomi yang dibuatnya sendiri.

Dengan marketisasi peran negara diperkecil, terutama dalam pembuatan rencana oleh pemerintah pusat. Sebagai contoh, pada awal reformasi hanya 5% saja dari ekonomi China yang dimarketisasikan, kemudian pada tahun 1999 sudah naik ke angka 50%. Begitu pula sebelum reformasi, negara mengontrol harga dari 1.336 barang, pada 1998 hanya tinggal 58 saja barang yang dikontrol oleh negara⁷.

Proses internasionalisasi sebenarnya sama saja dengan proses mengembangkan hubungan dengan dunia luar. Pada tahun 1978, China hanya memiliki hubungan diplomatic dengan 99 negara, namun pada akhir tahun 2001 angka itu telah naik menjadi 162 negara. Pada pertengahan 1990-an, 60% dari wilayah China dinyatakan "terbuka" bagi dunia luar. Perdagangan internasional yang pada 1978 hanya menyumbang 9,8% pada GNP China, pada 2001 melejit ke angka 44,7%. Gairah untuk berkiprah di panggung internasional ini diiringi dengan semangat untuk masuk ke berbagai rezim internasional, seperti *United Nation Development Program* (UNDP), *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, *Asian Development Bank* (ADB), dan *World Trade Organization* (WTO). Selain itu, China juga aktif dalam perjanjian dan kerjasama berupa, *Non-Proliferation Treaty*, *Comprehensive Test Ban Treaty*, *Chemical Weapon Convention*, *Outer Space Treaty*, *Seabed Arms Control Treaty*⁸.

Melihat besaran angka-angka di atas, tidak heran kalau orang-orang diseluruh dunia merasakan "bahaya" bahkan "ancaman" dari China. Disebutkan dari majalah Inggris terkemuka, *The Economist* dalam edisinya pada bulan Februari tahun 2003, mencoba mendudukan angka-angka besar dari China itu dalam konteks dan perspektif yang sepadan. Apa yang ditakutkan dari China untuk saat ini sebenarnya adalah ekspornya. Sebagai contoh, ekspor China pada 2001 melejit setinggi 23% menjadi US\$ 266 miliar dan merupakan 4,4% dari ekspor dunia. Namun, angka tersebut masih jauh dari catatan Jepang yang pernah mencapai 10,1% dari ekspor dunia pada 1986, bahkan masih lebih rendah dari angka Jepang untuk tahun 2001 (6,6%)⁹.

7 *Ibid*, hal. 122

8 Chung, Jae Ho, "China's Reforms at Twenty-five: Challenges for Leadership", *China. An International Journal*, Vol. 1, No. 1 (March 2003), hal. 123

9 "Is The Wakening Giant a Monster", *The Economist* (15-21 Februari 2003), hal. 63 - 65

Kepemilikan perusahaan didiversifikasikan dengan macam-macam kombinasi. Privatisasi menjadi salah satu macamnya. Sebagai negara sosialis – komunis, masalah kepemilikan ini merupakan masalah paling peka dan paling sulit, tetapi pemerintahan China berhasil menemukan formula “liberalisasi pemikiran”. Melalui kompromi yang panjang, pada akhirnya formula ini telah berhasil membuat orang China berani keluar dari cengkeraman ideologi. China berhasil *survive* dalam rangka menghidupkan teori Gorbachev secara bertahap dan melalui proses yang cukup panjang dan berdarah-darah. Tidak hanya melakukan apa yang disebut Gorbachev sebagai *uskoreniye* atau percepatan pembangunan ekonomi, pemerintah China juga berani menerapkan keterbukaan (*openness/glasnost*) secara bertahap sehingga dapat bergabung dengan komunitas internasional dan tetap bertahan sebagai negara besar yang utuh.

Secara garis besar tonggak kepemimpinan dalam pemerintahan Republik Rakyat China dapat dikategorikan menjadi 4 periode kepemimpinan yang berpengaruh secara signifikan dalam kebijakan China baik secara internal maupun eksternal. Keempat periode kepemimpinan Republik Rakyat China yang berpengaruh itu diantaranya adalah ; Mao Zedong sebagai generasi pertama dan merupakan pendiri dari Partai Komunis China, Deng Xiaoping masuk dalam kategori generasi kedua karena jasa-jasanya dalam mencetuskan ucapan *nanxun* yang kemudian menjadi pedoman dalam garis besar haluan negara, Jiang Zemin merupakan generasi ketiga yang mampu mengeluarkan China dalam kondisi krisis paska protes Tiananmen 1989, dan yang terakhir adalah generasi keempat Hu Jintao yang mampu mengembalikan kepercayaan komunitas internasional terhadap China, serta membuatnya tampil sebagai negara dengan perekonomian yang tidak kalah dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutunya.

Berikut ini adalah gambar tabel dari strategi besar Republik Rakyat China dari generasi ke generasi ;

Table 4.1, Strategi Utama China

Strategi Utama	Strategi pada masa Mao: penerapan kebijakan 'oneside binding', 1950 'two lines', 1960 'one line' 1970	Strategi pada masa Deng and Jiang: 'Reformasi dan Keterbukaan', 1980, "Low Profile", 1990	Strategi pada masa Hu Jintao : Kebijakan Perdamaian -2003 – sekarang
Strategi Utama Berbasis Domestik	Moscow Consensus	Washington Consensus	Post-Washington Consensus
Penilaian Berdasarkan Periode	Masa-masa peperangan dan revolusi	Perdamaian dan pembangunan menjadi isu utama dalam era ini	Perdamaian dan pembangunan menjadi sebuah misi yang harus diwujudkan dalam era ini
Ideologi yang Digunakan	Revolusi proletar Internationalisme plus realisme;	Non-ideologi, Pragmatisme dan realisme; Taoisme	Socialisme, pacifisme, Confusionisme
Tujuan dan Upaya Strategi China	Untuk mempertahankan kemerdekaan nasional melalui perang dan konfrontasi	Pembangunan nasional melalui keterbukaan dan integrasi pasar global	Untuk mencapai pembangunan nasional dan perdamaian dunia dalam rangka integrasi internasional

Sasaran dan Kemampuan Strategi China	Penggunaan kemampuan China masih sangat terbatas sebagai proses revolusi	<i>Low-profile policy</i> , dengan mengejar kepentingan praktis untuk mendapatkan pengaruh dan kepercayaan internasional	Pengakuan China yang maju dan menciptakan integrasi internasional yang aman dan damai
---	--	--	---

Sumber: Dongsheng Di, "*Continuity and changes : A comparative study on China's new grand strategy*", *China. An International Journal*, No. 12 (February 2007).

B. Penguatan Sistem Ekonomi Pasar Sosialis

Pada tahun 1992, Kongres Nasional Partai Komunis China ke -14 merumuskan tentang sebuah reformasi perekonomian China yang dikenal dengan *ekonomi pasar sosialis* dan menjadi sebuah garis besar haluan negara. GBHN ini merupakan hasil dari ekspedisi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping ke kota-kota di sepanjang wilayah selatan China. Dalam setiap pidato di kota-kota yang dilewatinya, Deng tak henti-hentinya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi China harus dipercepat. Katanya : "Ekonomi China tidak boleh berjalan seperti gadis-gadis dengan kaki diikat". Ucapan Deng ini kemudian dikenal dengan nama ucapan *nanxun* (ucapan perjalanan ke selatan) yang mana kemudian dikristalkan sebagai garis besar haluan Negara dalam sidang Kongres Nasional Partai Komunis China dan ditetapkan oleh pemerintah China bahwa Republik Rakyat China harus menganut *ekonomi pasar sosialis*¹⁰.

Istilah ekonomi pasar sosialis merupakan sebuah istilah baru yang menyatakan bahwa China pada prinsipnya mengikuti sistem ekonomi pasar, dimana produksi dan distribusi diatur oleh mekanisme pasar. Mekanisme pasar mengatur bahwa negara harus menarik diri dan tidak boleh melakukan intervensi dalam aktivitas perekonomian, namun negara diizinkan untuk memainkan peranan kontrol makro.

Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh sidang pleno ke -3 dari Komite Sentral, November 1993, menegaskan hal ini : "membangun sistem ekonomi pasar sosialis berarti menjadikan pasar sebagai faktor fundamental dalam alokasi sumber daya di bawah kontrol makro oleh

¹⁰ Lihat, Wibowo, I, 2004, *Belajar Dari Cina : Bagaimana Cina Merebut Peluang Dalam Era Globalisasi*, Jakarta ; Penerbit Buku Kompas, hal, 34.

Negara”¹¹.

Kebijakan ekonomi pasar sosialis ini kemudian menjadi sebuah batu pijakan bagi negara Republik Rakyat China dalam membangun pertumbuhan perekonomiannya semenjak tahun 1992. Pada awalnya diadakan sebuah reformasi fiskal pada tahun 1994 yang mengatur masalah pembagian pendapatan pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Reformasi ini meletakkan dasar bagi struktur perpajakan dan pengeluaran publik yang sesuai dengan ekonomi pasar. Hal ini merupakan salah satu rangkaian reformasi institusi ekonomi yang ditujukan untuk mendukung sistem ekonomi pasar¹².

Tahun berikutnya, 1995, dikeluarkan dua undang-undang yang mengatur bank sentral dan bank komersial. Menurut Lu Ding, China mengikuti model “*US Federal Reserve*”.

Namun, dibalik kebijakan untuk membiarkan banyaknya investor dari perusahaan-perusahaan baik asing maupun swasta yang masuk, permasalahan privatisasi merupakan hal yang paling sensitif dan rumit di sebuah negara sosialis/komunis. Kebijakan ekonomi pasar sosialis bisa menjadi pisau bermata dua bagi China yang berideologi komunis. Privatisasi yang dilakukan oleh pemerintahan China bisa menimbulkan kecemasan pada kalangan investor asing dan memiliki arti yang besar bagi kaum buruh di China.

Privatisasi perusahaan swasta menjadi milik negara dapat dimaknai sebagai pemutusan hubungan kerja bagi kaum buruh yang memang tidak memiliki kualifikasi yang ditentukan oleh negara. Apabila hal tersebut dilakukan oleh pemerintah China, maka bisa dipastikan akan terjadi protes dan demonstrasi secara besar-besaran oleh kaum buruh, dimana mereka akan menuntut hak-haknya untuk hidup dan memakmurkan keluarganya yang tinggal dibawah kekuasaan rezim Partai Komunis China. Hal ini tentu saja akan merugikan Partai Komunis China dan mampu mengguncang pemerintahan pusat. Tidak sampai disitu saja, ketegangan bisa saja muncul dari kedua belah pihak yang tidak mau menerima tawaran dengan pihak pemerintah.

Demonstrasi buruh sebuah perusahaan negara sebenarnya baru mencerminkan masalah buruh di hampir seluruh kota di wilayah China. Republik Rakyat China dikenal memiliki sekurang-kurangnya tiga macam

11 Lihat, Wibowo, I, 2004, *Belajar Dari Cina : Bagaimana Cina Merebut Peluang Dalam Era Globalisasi*, Jakarta ; Penerbit Buku Kompas, hal, 35.

12 Lihat, Ding, Lu, “*China’s Institution Development for a Market Economy since Deng Xiaoping’s 1992 Nanxun*”, dlm. John Wong dan Zheng Yongnian (eds.), *The Nanxun Legacy and China’s Development in the Post-Deng Era* (Singapore: Singapore University Press, 2001), hlm. 51-73.

buruh, yaitu ada buruh perusahaan negara, ada buruh perusahaan swasta, dan yang terakhir adalah buruh lepas yang sering dijuluki "*mangliu*"¹³. Terdapat sekitar kira-kira 200-250 juta buruh "*mangliu*" di China. Mereka ini adalah para petani yang untuk sementara atau untuk jangka waktu yang lama meninggalkan keluarganya dan kampung halamannya untuk bekerja mencari nafkah di kota-kota China.

Selama 30 tahun China menjalankan sistem ekonomi sosialis yang memberi jaminan kepada buruh dan memberikan status bahwa semua buruh yang ada di China adalah buruh perusahaan nasional milik negara. Namun sesudah 1978, hal tersebut berbanding terbalik 180 derajat dengan keadaan setelahnya. Atas nama ekonomi pasar sosialis, aneka jaminan dan santunan yang dulu dinikmati oleh para kaum buruh dan petani, saat ini dikurangi dan terjadi pemangkasan. Lebih runyamnya lagi ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Akibatnya saat ini banyak bermunculan buruh paruh waktu, buruh kontrak yang telah disebutkan tadi, dimana hal ini berpengaruh pada kehidupan buruh dan keluarganya.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ekonomi neo-liberal yang semakin menguasai China telah menghimpit ratusan buruh-buruh yang terdapat di kota-kota di China, baik yang ada di perusahaan nasional milik negara, di perusahaan swasta, maupun mereka yang bekerja sebagai buruh lepas atau buruh kontrak¹⁴.

Disamping harus memperhatikan permasalahan para buruh yang terancam PHK akibat dari adanya privatisasi (yang sesungguhnya bertentangan dengan ekonomi pasar sosialis), pemerintahan China juga memberikan perhatian khusus kepada para pengusaha swasta yang ada di China. Hal yang terjadi di dalam lingkaran kekuasaan China, pada kenyataannya masih terjadi silang pendapat antar elit pemimpin China. Di antara kalangan elit pemerintah tersebut, ada yang secara ideologis mampu menerima kehadiran pengusaha swasta, namun juga masih ada yang belum bisa melepaskan kontrol negara kepada perusahaan swasta. Pengusaha swasta masih belum diizinkan untuk membeli tanah. Mereka harus membayar mahal barang maupun jasa kebutuhan umum¹⁵.

Misalnya, pada tahun 1997, mereka harus membayar tarif listrik

13 Lihat, I, Wibowo, *Negara dan Masyarakat Bercermin Dari Republik Rakyat Cina*, Jakarta: Gramedia dan Pusat Studi Cina, 2000, Bab. 4.

14 *Ibid.*

15 Lihat, Wibowo, I, 2004, *Belajar Dari Cina : Bagaimana Cina Merebut Peluang Dalam Era Globalisasi*, Jakarta ; Penerbit Buku Kompas.

dua atau tiga kali lebih mahal daripada yang harus dibayarkan oleh perusahaan milik Negara. Demikian pula pemakaian fasilitas umum atau angkutan publik yang lain. Pengusaha swasta harus membayarnya dengan harga yang cukup tinggi. Contoh lain, apabila seorang pengusaha swasta ingin membuka sebuah usaha baru, maka izin dari pemerintah setempat akan dikeluarkan setelah melalui proses yang cukup panjang dan berbelit-belit, bahkan bisa mencapai berbulan-bulan lamanya. Dari sektor keuangan dan perbankan, diskriminasi terhadap pengusaha swasta juga terlihat sangat jelas perbandingannya dengan perusahaan nasional milik negara. Pada prinsipnya bank-bank di China tidak memberikan pinjaman kepada pengusaha swasta untuk investasi dalam *fixed assets*. Pinjaman yang diberikan hanya pinjaman jangka pendek yang disertai persyaratan yang cukup ketat. Dapat dikatakan bahwa pengusaha swasta memperoleh pinjaman yang cukup kecil dari institusi keuangan yang dimiliki pemerintah. Sedangkan, apabila para pengusaha swasta ingin mencari sumber pendanaan dari pasar saham di Shanghai dan Shenzhen, cukup sulit bagi mereka karena pemerintah tidak akan mengizinkannya. Maka banyak pelaku bisnis terpaksa mencari modal di luar institusi negara dengan bunga yang tinggi, yang terkadang membuat para pengusaha swasta tersebut sangat tercekik dengan regulasinya¹⁶.

Sumber kemarahan yang lain di China adalah para kaum petani. Para kaum petani ini merasa dijadikan sapi perahan yang dituntut untuk bekerja tanpa diperhatikan mengenai kesejahteraannya oleh para pejabat desa. Aneka ragam pajak dikenakan kepada para petani, dan sementara itu hasil panen dari kelompok tani tidak mampu bersaing dengan harga beras yang berasal dari produk impor. Akibatnya mereka mengamuk dan melakukan penyerangan serta berbagai macam protes terhadap kantor-kantor pemerintahan desa, seperti di kantor kecamatan dan kelurahan¹⁷.

Kegelisahan di kalangan rakyat tidak lebih dari sekedar kehilangan pekerjaan saja. Akan tetapi, hal tersebut dikarenakan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan yang korup sehingga mengakibatkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah menurun. Semenjak terjadinya pembantaian di Tian'anmen yang terjadi pada tahun 1989 (era pemerintahan Deng Xiaoping), seluruh China telah dilanda rasa kekecewaan yang cukup mendalam terhadap banyaknya kasus korupsi yang terjadi di tingkatan elit pemerintahan China. Mereka

16 Lihat, Nolan, Peter, 2001, *China and the Global Economy*, New York: Palgrave, hal. 13-17

17 Lihat, Chang, Gordon, 2001, *The Coming Collapse of China*, New York, Random House.

melakukan protes terhadap pemerintah China yang tidak transparan dan menuntut pemberantasan korupsi secepatnya supaya rakyat China tidak mengalami kesengsaraan yang panjang akibat ulah para oknum birokrat yang tidak bertanggung jawab tersebut.

Bukti dari banyaknya elit pemerintahan China yang terlibat dalam korupsi di China bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2, Pejabat Tinggi yang Terbukti Korupsi dan Hukuman yang Diterima.

Nama	Kedudukan ketika tertangkap	Hukuman/tahun pelaksanaan
Cao Xiukang	Kepala, Pabean Zhangjian	Hukuman mati/1999
Chen Xitong	Sekretaris Partai, Beijing	16 tahun penjara/1998
Cheng Kejie	Wakil Ketua Kongres Rakyat Nasional	Hukuman mati/2000
Hu Changqing	Wakil Gubernur, Jiangxi	Hukuman mati/2000
Li Chenglong	Wakil Walikota Guigang, Guangxi	Hukuman mati/2000
Li Jizhou	Wakil Menteri, Menteri Keamanan Umum	Dalam proses
Xu Yunhong	Sekretaris Partai, Ningbo	10 tahun penjara/2000

Sumber: Zou Keyuan, "Why China's Rampant Corruption Cannot Be Checked by Laws Alone," in Wang Gungwu dan Zheng Yongnian (eds.), *Damage Control. The Chinese Communist Party in the Jiang Zemin Era* (Singapore: Eastern Universities Press, 2003), hlm. 83.

Melihat banyaknya permasalahan dan kasus yang menghantui China, dimana suatu saat akan menjadi sebuah bom waktu yang mungkin akan meruntuhkan China, maka pemerintah China membangun sebuah komitmen untuk memberangus korupsi secara tanpa pandang bulu.

Namun, tetap saja *grass root* masih menginginkan sebuah perubahan untuk perbaikan nasib mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Para petani, para buruh kontrak, dan pengusaha swasta pun tidak kehabisan akal untuk membuat pemerintah China menunjukkan perhatiannya kepada mereka.

Kalangan pengusaha swasta, misalnya berhasil membuat strategi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam dunia ekonomi dan industri. Para pengusaha swasta beranggapan bahwa satu-satunya peluang untuk melawan kebijakan yang timpang antara perusahaan swasta dan nasional adalah dengan turut serta menjadi kader Partai Komunis China. menurut survey, tercatat hampir 30% dari pengusaha

swasta di China adalah anggota Partai Komunis China, sementara ada 11,1% yang berniat akan masuk¹⁸.

Hal ini merupakan hasil dari diizinkannya para pengusaha swasta untuk masuk ke dalam partai yang disahkan oleh Jiang Zemin pada tanggal 1 Juli 2001, walaupun pasca disahkannya izin tersebut kemudian memicu perdebatan panas dan kritik dari kelompok kiri terhadap kebijakan Jiang Zemin tersebut¹⁹. Oleh karena itu, para pengusaha swasta masih harus tetap berjuang dan belum dapat bernafas dengan lega karena masih ada kelompok elit lain yang belum bisa menerima kehadiran mereka di pemerintahan China.

Lain halnya dengan para pengusaha swasta, kaum buruh dan kelompok petani mencoba berjuang untuk mendapatkan hak-haknya melalui protes dan demonstrasi. Demonstrasi ini terjadi akibat kebijakan privatisasi perusahaan yang dilakukan oleh pemerintah China, dimana perusahaan milik negara akan diserahkan dan dikelola oleh pihak swasta. Hal ini tentu saja menimbulkan PHK kepada para buruh perusahaan nasional, disamping itu mereka juga akan kehilangan jaminan sosial yang telah dinikmati selama menjadi buruh di perusahaan nasional. Para buruh ini kemudian melakukan konsolidasi bersama serikat kerja dan masyarakat untuk menuntut pemerintahan China demi uang pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja.

Misalnya, data yang dihimpun oleh Dewan Negara yang dikeluarkan pada tahun 1997 melaporkan tiga bulan pertama pada tahun 1997, sekitar 2,35 juta penduduk kota ikut dalam tindakan kolektif yang diakui disebabkan oleh kehilangan pekerjaan. Dalam laporannya di depan Konggres Rakyat Nasional pada bulan Mei 2001, Wei Jianxing menyampaikan sebuah laporan keadaan perburuhan. Wei Jianxing adalah anggota politburo yang mengawasi serikat kerja dan hukum perburuhan pada waktu itu. Dikatakan bahwa, banyak orang biasa yang resah dan marah, bukan karena mereka mempunyai tujuan politik yang tidak baik, tetapi karena hak-hak mereka dilanggar dan karena kepentingan material mereka dikurangi²⁰.

Sepertinya pemerintahan China untuk saat ini lebih mendahulukan

18 Lihat, Wibowo, Ignatius, "Party Recruitment": *From Crisis to Private Entrepreneurs*, dlm. Wang Gungwu dan Zheng Yongnian (eds.), *Damage Control. The Chinese Communist Party in the Jiang Zemin Era*, 2003, Singapore: East Asia Institute, hlm. 190-208.

19 Lihat, Wibowo, I, 2004, *Belajar Dari Cina : Bagaimana Cina Merebut Peluang Dalam Era Globalisasi*, Jakarta ; Penerbit Buku Kompas, hal. 59.

20 Lihat, Ding, XL, *The Challenge of Managing a Huge Society Under Rapid Transformation*, dlm. John Wong dan Zheng Yongnian (eds.), *China's Post-Jiang Leadership Succession*, 2002, Singapore University Press, hal. 211-212.

para pemilik modal ketimbang memperhatikan para buruh. Sebuah negara yang berhaluan komunis untuk saat ini sedang mengikuti tren neo-liberal. Namun, apabila nasib buruh tidak segera diperhatikan, maka bukan hal yang mustahil bila kejadian yang ada di perancis, dimana para kaum buruh melakukan revolusi untuk melengserkan Raja Louis dari kekuasaannya, juga akan terulang kembali di China. Beberapa masalah yang muncul di China tersebut pada akhirnya mampu diselesaikan oleh pemerintah China secara bertahap.

Tabel 4.2, Tingkat kerusuhan yang dilakukan oleh para buruh di China bisa dilihat dari tabel berikut ini²¹:

Wilayah besar	Kekacauan (%)	Penduduk (%)
Sembilan provinsi pesisir (Hebei, Liaoning, Shangdong, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Guangdong, Guangxi, Hainan)	24	39,64
Sembilan provinsi tengah (Shanxi, Inner Mongolia, Jilin, Heilongjiang, Anhui, Jiangxi, Henan, Hubei, Hunan)	43	36,82
Sembilan provinsi barat (Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet, Shaanxi, Gansu, Qinghai)	32,5	23,53

Perkembangan sistem ekonomi pasar sosialis pada dasarnya sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bisa dilihat dari mulainya pasar modal di China pada tahun 1990 yang kemudian mengalami perkembangan yang cepat, setelah mengalami fluktuasi selama kurang lebih 8 tahun. Pada akhirnya di tahun 1999 market capitalization mencapai 35% dari GDP. Undang-undang mengenai pasar modal akhirnya diterapkan pada Juli 1999, dimana perkembangan pasar uang dan pasar modal akan mempermudah aliran modal dan dengan demikian membuat bisnis semakin gampang. Selain itu, pada tahun 1998 Perdana Menteri Zhu Rongji mengadakan reformasi perusahaan-perusahaan negara. Untuk pertama kalinya perusahaan milik negara di China dibiarkan berkembang sendiri dalam dunia bisnis dalam rangka membangun ekonomi pasar²².

21 Lihat, Allan Liu, *Mass Politics in the People's Republic*, 1996, Boulder, CO: Westview Press, hal. 125.

22 Lihat, Wibowo, I, 2004, *Belajar Dari Cina : Bagaimana Cina Merebut Peluang Dalam Era Globalisasi*, Jakarta ; Penerbit Buku Kompas, hal. 36.

Sedangkan dari segi tenaga kerja, China berupaya membangun sistem social security-nya, dimana pada tahun 1995 proses privatisasi perumahan penduduk dimulai dan terus berkembang pesat. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi beban yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk menyediakan perumahan bagi para pegawainya. Akibatnya berkembanglah property market baik untuk tempat tinggal maupun usaha. Disamping itu, pemerintah China juga mengamandemen UUD Republik Rakyat China untuk menampung masuk kelompok pengusaha swasta, dimana kemudian menghasilkan UU Perusahaan dengan dana individu yang berlaku mulai tahun 2000. Semua ini membuka jalan untuk terciptanya lingkungan yang ramah bagi pengusaha. Hebatnya lagi, pemerintah China menambah aturan yang diterapkan pada 17 Januari 2001, yang menetapkan untuk mendaftarkan bisnis atau usaha swasta hanya diperlukan biaya sebesar 1 RMB (kurs rupiah saat itu = Rp. 1000,-). Peraturan-peraturan baru tersebut merupakan implementasi dari sistem ekonomi pasar sosialis di China²³.

C. China Modern

Setelah melalui fase reformasi pemerintahan yang diawali dengan runtuhnya masa kekaisaran Dinasti Qing pada tahun 1911, kemudian dideklarasikan Negara Republik China pada tahun 1912 oleh Sun Yat Sen, yang dilanjutkan pada pembentukan Negara Republik Rakyat China oleh Mao Zedong pada 1949 sampai saat ini telah membuat China menjadi sebuah negara dengan pengalaman tata negara yang luar biasa. Sekarang China sudah menjadi salah satu dari aktor utama dunia internasional yang bisa dijadikan contoh oleh negara-negara berkembang mengenai model perekonomian dan industrinya yang berkembang pesat menguasai hampir seluruh dunia.

Perkembangan teknologi informasi di China juga menjadi salah satu faktor terpenting bagi para kaum buruh dalam mendapatkan akses informasi yang cepat mengenai perkembangan terkini terkait dengan kebijakan privatisasi perusahaan dan demonstrasi antar kaum buruh di berbagai wilayah di China. Media informasi, baik berupa elektronik maupun cetak, telah menjadi pijakan utama bagi para kaum buruh untuk menentukan aksi selanjutnya dalam menuntut pemerintah China untuk member jaminan kepada para buruh yang terkena PHK akibat dari kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah pusat China.

²³ Ibid, Hal, 37.

Semakin lancar dan mudahnya mereka mendapatkan akses informasi membuktikan bahwasanya perkembangan teknologi informasi di hampir se-antero China telah menjadi kekuatan baru yang sangat menguntungkan bagi siapapun. Perkembangan tersebut mempermudah berbagai pihak, baik dari pemerintah, kalangan pengusaha, intelektual, maupun buruh untuk menyerap informasi penting dan terkini yang ada di seluruh wilayah China. Adanya teknologi untuk mempermudah penyerapan akses informasi tersebut kemudian memicu lahirnya beberapa jaringan sosial yang mampu melakukan konsolidasi untuk melakukan aksi kepada pemerintah dalam upaya menuntut dan mendorong transparansi pemerintah bagi warga negaranya.

Pemerintah China yang tidak mampu membendung perkembangan teknologi informasi, kemudian berupaya untuk melakukan pembatasan akses informasi terkait konten-konten yang tidak diinginkan oleh pemerintah pusat China untuk diakses oleh warganya. Hal ini bisa dibuktikan dengan ancaman dari pemerintah China kepada perusahaan *google* untuk menutup situsnya www.google.cn, apabila pihak *google* tidak dapat bekerjasama dengan pemerintah China. salah satu contohnya adalah pemerintah China melakukan blokir sepenuhnya atau sebagian pada layanan *search engine google* kecuali *g-mail*. Hal ini membuat berang pihak *google* dan mengancam akan benar-benar menutup operasinya di China. *Google* tidak akan tunduk pada kebijakan sensor pemerintah dan secara efektif mematikan mesin pencari di China²⁴.

Diblokirnya akses menuju *search engine Google* kemudian tidak membuat China menjadi terisolasi. Dengan cerdasnya China membuat sebuah *search engine* sendiri yang dikenal dengan nama Baidu, dimana *search engine* tersebut berhasil menggeser *Google* dan menjadi situs papan atas yang paling sering dikunjungi oleh rakyat China. Bahkan situs Renren dan Weibo (semacam Facebook dan Twitter) juga menjadi situs jejaring sosial paling populer di China, sehingga masyarakat China masih bisa melakukan komunikasi dan membentuk komunitas sosial-politik dalam jejaring tersebut²⁵. Disamping hukum sensor pemerintah China yang begitu ketat, terdapat pula sebuah "zona abu-abu". Zona ini merupakan wilayah-wilayah pergerakan bawah tanah yang lahir karena adanya perkembangan teknologi yang ada di China. Salah satu contohnya adalah munculnya film-film *underground*

24 *Google Diblokir Lagi di China*, diunduh pada 01 Februari 2017, <<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/07/30/127518-google-diblokir-lagi-di-cina>>

25 Lihat, Agustina W, dalam *Liputan Khusus : Kapitalisme Buatan Cina*, *Tempo* Edisi 23 – 29 Januari 2012, hal. 61.

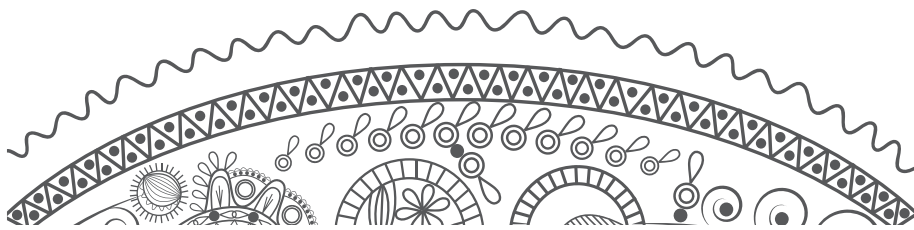
yang mengkritik mengenai revolusi kebudayaan, pemberontakan kebudayaan menemukan cara untuk membuat pandangan mereka menjadi dikenal²⁶.

Melihat perkembangan masyarakat kelas menengah di China telah membuat pemerintah China untuk mulai meninggalkan pola kebijakan lama, dimana pada masa lalu para pemimpin China menerapkan pemerintahan yang keras dan otoriter terhadap rakyat yang membangkang. Pada hari ini, China telah mulai merubah secara pelan dan bertahap tapi pasti mengenai pemerintahannya yang mulai mencoba untuk melibatkan rakyat dalam hal pembangunan perekonomian. Para pemimpin China dimulai dari Deng, Jiang, dan Hu Jintao dipuji oleh dunia atas kemampuannya dalam mengembangkan China menjadi negara dengan ekonomi yang maju.

Inti dari perubahan di China ada pada sistem ekonominya. China telah memulai reformasinya dari tingkat pedesaan, yaitu melalui pembubaran komune. Petani yang merupakan mayoritas penduduk China dilepaskan dari kekangan perencanaan dan membiarkan mereka memproduksi serta berinvestasi menurut hukum pasar. Sementara itu reformasi perusahaan milik negara di pusat-pusat kota dibiarkan merambat pelan. Pemerintah China tidak secara tiba-tiba mencabut subsidi bagi para buruh, dan tidak serta merta mengadakan privatisasi. Dengan demikian, pemerintah China telah menciptakan sebuah sistem sendiri yang diberi nama sistem "ekonomi pasar sosialis"²⁷. Perubahan sistem ekonomi di China yang berdasar pada kebebasan individu itu dipadukan dengan sistem politik yang dikuasai oleh satu partai, Partai Komunis China. Untuk mengurangi kepengapan politik dan tercapainya stabilitas politik, maka pemerintah China menciptakan "Konggres Rakyat", baik pada tingkat local maupun nasional. Hal dibuktikan dengan adanya perubahan kecil di pedesaan, dimana penduduk bisa bebas memilih sendiri kepala desanya, yang kemudian diberi otonomi untuk mengelola desa mereka sendiri²⁸. Sistem ekonomi pasar sosialis dan stabilitas politik di tingkat-tingkat pedesaan ini kemudian akan mendorong terciptanya reformasi ekonomi.

27 Lihat, Wibowo, I, 2004, *Belajar Dari Cina : Bagaimana Cina Merebut Peluang Dalam Era Globalisasi*, Jakarta ; Penerbit Buku Kompas, hal. 209.

28 *Ibid*, hal. 210



BAB V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Globalisasi yang melanda China bisa diartikan pisau bermata dua dalam proses mengawal China menjadi tampak demokratis. Satu sisi mengawali dengan menunjukkan keterbukaannya dari segi perekonomian dan teknologi informatika, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari kegiatan perekonomian dunia, namun disisi lain juga bisa berdampak pada kesenjangan sosial masyarakat di China apabila Negara tidak mampu melakukan reformasi sistem yang lebih baik. Dari segi perekonomian China telah mampu\ menumbuhkan kepercayaan investor asing untuk melakukan aktivitas ekonomi di China sehingga membuka banyak lowongan pekerjaan bagi rakyat China. Sedangkan dari segi informasi menunjukkan bahwa pemerintah China berusaha untuk memberikan akses informasi yang positif bagi rakyatnya. Dengan melakukan tindakan kontrol terhadap berbagai situs informasi di China, maka Partai Komunis China mampu mempertahankan kekuasaannya sampai hari ini, serta menunjukkan kepada rakyatnya dan du.nia bahwa perekonomian China telah semakin maju bahkan bisa dikatakan hampir sebanding dengan perekonomian Amerika Serikat.

Meleburnya China dengan komunitas internasional akan membuat negara komunis itu terlihat menjadi negara yang terbuka dan aman bagi siapapun. Pemerintahan China juga mulai meningkatkan mutu pelayanan publik sehingga komunitas internasional merasa nyaman melakukan aktivitas bisnis di wilayah China. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian China, ketegasan terhadap hukum untuk

para koruptor, serta dimulainya pemilu ditingkatan desa menunjukkan keseriusan dari pemerintahan China untuk merubah pandangan komunitas internasional terhadap negara tersebut, dari negara terisolir menjadi negara terbuka yang diminati oleh para investor asing.

Adanya gejala sosial dengan merebaknya beberapa komunitas buruh dan petani China yang melakukan demonstrasi untuk menuntut kesejahteraan yang wajib diberikan oleh pemerintah China kepada rakyatnya, adanya kalangan swasta yang berusaha merubah kebijakan ekonomi China untuk semakin terbuka, mudah, dan transparan merupakan bukti bahwa China sedang mengalami proses kemajuan ekonomi secara bertahap. Semakin meningkatnya perekonomian di China akan memunculkan kelas menengah terdidik yang selalu menuntut kesejahteraan dan kemakmuran, serta berupaya untuk terus mendapatkan akses informasi yang cepat, mudah, dan aman untuk keberlangsungan bisnis mereka. Dengan demikian, pengaruh dari munculnya globalisasi dijadikan peluang oleh pemerintah China untuk dapat membaaur dengan komunitas internasional terutama dari segi perekonomiannya, sehingga China saat ini telah bertransformasi menjadi sebuah negara industri yang maju dan aman bagi para investor asing, serta menjadikan sistem perekonomian China menjadi sistem yang tidak kalah dengan sistem ekonomi kapitalis yang selama ini diterapkan oleh negara-negara Barat.

INDEKS

A

Adam Smith 4
Adidas 22
Afrika 20, 31, 58
Alan Greenspan v
Alvin Toefler v
American Express 36
Amerika Latin 31, 33, 58
Amerikanisasi 12
Amerika Serikat vi, 1, 2, 4, 24, 41, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 75
Anglo-Amerika 35
Aqua 16
Arab 46, 47
aristokrat (bangsawan) 18
Asia vi, viii, 31, 38, 44, 70, 95, 98
Asian Development Bank (ADB) 62
Australia 23

B

Bank Dunia 2, 20, 32, 46
Barat 2, 3, 4, 6, 11, 13, 24, 26, 38, 41, 44, 47, 49, 53, 56, 57, 76,

94, 95

Barber 2, 13, 15, 47, 51, 91
Benguet 22
Benguet Mining Company 22
Benjamin Barber 47
BenQ 16
Bermental Inlander 34
Bob Herbert 21
Bolivia 33
Brazil 33
British Petroleum 33
BUMN 5, 27, 33

C

Cao Xiukang 69
Cepu 28
Cheney 25
Chen Xitong 69
Chevron 25, 26, 33
Chiang Kai Sek 59
Chili 33
China iv, vi, viii, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 91, 92, 93,

94, 95
Chongqing 59, 61
Christopher Lasch 38
Coca-cola 16
Confession of an Economic Hit
Man 18, 31
Conoco Phillips 33
corporate governance 32
crude oil pipelines 25

D

Danone 16
David C.Korten 21, 30, 31
David Held 6, 41, 48
David Kelly 3
David Ricardo 7
Demonstrasi 66, 70
Deng Xiaoping viii, 10, 50, 51, 54,
55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 65,
66, 68, 92, 93
Dewan Keamanan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (DK PBB)
57
Dewan Negara 70
Dinasti Qing 50, 72
diplomatic 62
distigmatisasi 9
DKI Jakarta 61

E

Economic Hit Man 18, 31
Ekuador 22
Eropa vi, vii, 4, 36, 38, 41, 43, 44,
46, 49, 50, 54, 58, 60, 63
evolusi ideologi 11
Evo Morales 33
Exxon Mobile 28, 33

F

feudalisme 52
Filipina 6, 22, 44
financial 18
fixed assets 68

footloose industry (industri alas
kaki) 14
Francis Fukuyama v, 11
Freeport Mc Moran
Fried Chicken 47
Friedrich List 4, 5, 92
Fujian 71
Fukuyama v, 11, 43, 92

G

gang of four 54, 55
Gansu 71
General Agreement on Tariff and
Trade (GATT) 59
General Electric 35
George Soros 20, 31
Giddens 2, 92
Giffen 28
Globalisasi v, vii, viii, 1, 2, 6, 11,
12, 13, 14, 15, 17, 28, 29, 30,
35, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 49,
51, 60, 65, 66, 67, 70, 71, 74,
75, 93, 94, 95
Gorbachev 63
grass root 69
Greenspan v, vi
Gross Domestic Product (GDP) 2
Guangdong 71
Guangxi 69, 71
Guigang 69
Guizhou 71

H

Hainan 71
Hakodate 45
Halwani 7
HAM 24, 57, 94
Hebei 71
Hegemoni 24, 94
Heilongjiang 71
Henan 71
Henry Veltmeyer 12, 13, 27, 31,
94

Hollywood 47
homogenisasi 1, 2
Hubei 71
Hu Changqing 69
Hugo Chavez 33
Hu Jintao viii, 58, 61, 63, 64
Hunan 71
Hu – Wen 58, 59
hypertext 9

I

IBM 36
identitas pembangkang (resistance identity) 9
Imperialisme 1, 6, 12, 13, 27, 42, 94, 95
imperialisme kultural 1
Imperium vii, 19
India 2, 43, 46
individualitas 5
Informational Age 8
Inggris 16, 43, 50, 62
Inner Mongolia 71
instabilitas 11
institusional 1, 5, 6, 42
interaktif 9
Internasional viii, 20, 31, 34, 59, 94, 98
internasionalisasi 61, 62
International Monetary Fund (IMF) 62
Internet 36
intervensi 4, 5, 44, 65
investasi 5, 6, 7, 8, 12, 14, 36, 42, 56, 61, 68
investor 16, 56, 60, 61, 66, 75, 76
Irak 29
isomorfis 2
Ivy League 36

J

Jack Welch 35
Jacques Delors 38

Jae Ho Chung 61
James Giffen 28
James Petras 12, 13, 27, 31
Jean P. Baudrillard 39
Jepang 2, 44, 45, 46, 53, 60, 62, 94
Jerman 16
Jiang Qing 54, 55
Jiangsu 71
Jiangxi 69, 71
Jiang Zemin viii, 57, 59, 63, 69, 70, 93, 95
Jilin 71
Jim Keady 21
John Naisbit vi
John Perkins 18, 19, 20, 21, 31
Joseph E. Stiglitz 12, 31, 32
jurnal Pacific Affairs 3

K

kaifang 51
Kapitalisme vii, 4, 11, 12, 60, 73, 91, 93
Karl Marx 53
Kazakhztan 28
kedaulatan 1, 6, 55
kelurahan 68
kleptokrasi 18
Komite Sentral 65
Komparatif 7
Komunisme 53
Kongres 24, 65, 69
Konservatif 36
korporasi 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35
korporatokrasi 18, 19, 23, 25, 31, 34
Kosmokrat 35, 36, 37
Kota Shenzhen 60
Kuisel 1, 93
Kuomintang 50, 53

L

lapangan Tiananmen 3, 55, 56, 57
Lee Kwan Yew 38
Leslie Kretz 21
Levi's 22
Liaoning 71
Libya 47
Li Chenglong 69
Li Jizhou 69
Lodge 1, 42
Lokalkrat 38
London 57, 92, 94
Lotto 22
Louis XVI 43, 50
low profile 57
Lu Ding 66

M

Macintos 47
Mahathir bin Muhammad 38
Making Globalization Work 12, 13, 20, 23, 26, 32, 95
makro 3, 5, 65
Malaysia 6, 33, 44
Manuel Castell 8
Mao Zedong viii, 50, 53, 54, 55, 63, 72
Martin Wolf 11, 12, 15, 17, 28
marxisme 50
Mathew Perry 44
Mc Donald 47
Media Massa 34
Meiji 45, 94
Mekanisme 65
mendistorsi 26
merger dan akuisisi (M&A) 15
Meritokrat 37
Mesir 47
meta-language 9
mikro 3, 8
Militer 34

Millennium 8, 91
Mobile 25, 28, 33
mobile device (MD) 16
monopoli 5, 17, 44

N

Nagasaki 45
Nanning 59
Nanxun 66, 92
Nasional 34, 65, 69, 70
nation-state 2
Nike 21, 22
Ningbo 69
Nobel Ekonomi 2
Norwegia 33
Nursultan Nazarbayev 28

O

Old Navy 22
one size fits all 2
Oost-Indische Compagnie (VOC) 43
Oxbridge 36

P

Papua Nugini 23
partai Komunis China 50
Partai Konservatif Britania 36
partai penguasa Kuomintang 50
pathology of profit 19
Pax Sinica 49
PDB 20, 61
PDB Chongqing 61
pemutusan hubungan kerja (PHK) 67
Perancis 45
Perang Candu 50
perang Kosovo 58
Pertamina 28
perusahaan multinasional (MNC) 13
perusahaan transnasional (TNC) 13, 14

pervasif 2
Petani 74
Petro Gas 33
Pizza Hut 16
plutokrat (orang kaya) 18
Polo/Ralph Lauren 22
popularitas 24, 55
privatisasi 3, 20, 27, 28, 66, 67,
70, 72, 74
profit-seeking 5

Q

Qinghai 71

R

Reebok 22
Reformasi viii, 55, 64, 66
Renren 73
Repsol 33
Republik China 50, 53, 58, 59, 72
revolusi 8, 13, 43, 47, 50, 54, 55,
64, 65, 71, 74
rezim otoriter 6
RMB 72
Robert Reich 37
Robyn Meredith vi
Roma 49
Rusia 6

S

Samuel Huntington 37
sekolah bisnis 36
Senat 24
Serawak 6
Shaanxi 71
Shangdong 71
Shanghai 56, 58, 59, 68
Shanghai Cooperation Organiza-
tion (SCO) 58
Shanxi 60, 71
Shell Oil 22
Shenzhen 59, 60, 68
Shimoda 44

Sichuan 71
Siemens AG 16
signifikan 1, 2, 42, 45, 51, 55, 63,
71
silk road 49
sipil 3, 17, 26, 27, 30, 47, 50
SOIC 43
solidaritas 5
Sosialis viii, 65
Sosiologi-Ekonomi 39
Soviet 11, 41, 46, 54, 55, 56, 57
state capitalism. 4, 5
Stiglitz 2, 12, 13, 20, 23, 26, 31,
32, 33, 95
sub-Sahara Afrika 20
subsidiaritas 5
sungai Fly 23
Sungai Ok Tedi
Sun Yat-sen 53
Suriah 47

T

Taiwan 58
terlegitimasi (legitimizing identi-
ty) 9
The Gap 22
The New York Times 21
The Rise of Network Society 8
The Secret History of The Ameri-
can Empire 31
Thomas L Friedman v
Tiananmen 3, 51, 55, 56, 57, 63
Tianjin 59
Tibet 71
Time-Warner 16
Timur Tengah viii, 31, 44, 46, 49
Tokugawa 44, 45
Tokugawa bakufu 44
Tommy Hilfiger 22

U

underground 73
Uni Eropa 4, 58, 60, 63

Uni Soviet 11, 41, 54, 55, 56, 57
United Nation 41, 62
United Nation Development Pro-
gram (UNDP) 62
US Federal Reserve 66

V

Venezuela 33
Vietnam 21, 44

W

Wal-Mart 20
Washington 24, 64
Weibo 73
Wei Jianxing 70
Wen Jiaobao 58
World Trade Organization (WTO)
59, 60, 62

X

Xu Yunhong 69

Y

Yaman 47
Yunnan 71

Z

Zat sianida (cyanide) 22
Zhangjian 69
Zhejiang 71
Zhou Enlai 54, 55
Zhu Rongji 71
zona abu-abu 73
Zona Ekonomi Khusus (SEZ) 56

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Herbert A. 2003. *Financing Politics: Politik Uang dalam Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Yogyakarta: Narasi.
- Allan Liu. 1996. *Mass Politics in the People's Republic*, Boulder, CO: Westview Press.
- Agustina W, dalam *Liputan Khusus : Kapitalisme Buatan Cina*, Tempo Edisi 23 – 29 Januari 2012.
- Barber, Benjamin, 1995, *Jihad vs. McWorld*, New York; Times Books.
- Barber, Benjamin R. 2003. *Jihad Vs McWorld: Globalisme dan Tribalisme Baru Dunia*, Surabaya: Ikon Teralitera.
- Baudrillard, Jean P. 2009. *Masyarakat Konsumsi*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Castell, Manuel, *The Information Age: Economy, Society and Culture*, Oxford; Blackwell. Terdiri dari tiga volume. Volume I: *The Rise of the Network Society* (1996). Volume II: *The Power of Identity* (1997). Volume III: *End of Millennium* (1998)
- Chang, Gordon, 2001, *The Coming Collapse of China*, New York, Random House.
- Chang, Ha-Joon dan Ilene Grabel. 2008. *Membongkar Mitos Neolib: Upaya Merebut Kembali Makna Pembangunan*, Yogyakarta: INSIST Pres.

- Chung, Jae Ho, "China's Reforms at Twenty-five: Challenges for Leadership", *China. An International Journal*, Vol. 1, No. 1 (March 2003).
- Diamond, Larry, 1999, *Developing Democracy Toward Consolidation*, Balimore; John Hopkins University Press.
- Ding, Lu, "China's Institution Development for a Market Economy since Deng Xiaoping's 1992 Nanxun, dlm. John Wong dan Zheng Yongnian (eds.), *The Nanxun Legacy and China's Development in the Post-Deng Era* (Singapore: Singapore University Press, 2001).
- Ding, XL, *The Challenge of Managing a Huge Society Under Rapid Transformation*, dlm. John Wong dan Zheng Yongnian (eds.), *China's Post-Jiang Leadership Succession*, 2002, Singapore University Press.
- Flora, Cornelia Butler, 2003, *Democracy: Balancing Market, State and Civil Society*, dalam Michael M. Bell dan Fred Hendricks (ed.), *Walking Towards Justice: Democratization in Rural Life, Jurnal Research in Rural Sociology and Development, Volume 9*, Emerald Group Publishing Limited, hal. 89-100
- Leuwis, C., 2003, *Communication for rural Innovation : Rethinking Agricultural Extension Third Edition*, Blackwell Science. London.
- Fredericks, Salim. 2004. *Invasi Politik dan Budaya*, Bogor: Pustaka Thoriquel Izzah.
- Friedman, John, 1992, *Empowerment: the Politics of Alternative Development*, Balckwell.
- Fukuyama, Francis dkk. 2005. *Amerika dan Dunia*, Jakarta;Yayasan Obor Indonesia.
- George Friedrich List, *National Economy*, diunduh pada 23 April 2012, <<http://www.fordham.edu/halsall/mod/1856list.asp>>
- Giddens, Anthony, 2000, *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives*, New York; Routledge.
- Google Diblokir Lagi di China, diunduh pada 01 Februari 2012, <<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/07/30/127518-google-diblokir-lagi-di-cina>>
- Held, David, et al., 1999, *Global Transformation*, Stanford; Stanford University Press.

- Hirst, Paul dan Grahame Thompson. 2001. *Globalisasi adalah Mitos*, Jakarta;Yayasan Obor Indonesia.
- Jiang Zemin, *I Hope the Western World Can Understand China Better*, diunduh pada 25 April 2011<<http://www.nytimes.com/2001/08/10/world/china-s-leaders-jiang-s-words-hope-western-world-can-understand-china-better.html>>
- Jim O'Neill, *China Overtakes Japan as World's Second Biggest Economy*, diunduh pada 20 Februari 2011<<http://www.bloomberg.com/news/2010-08-16/china-economy-passes-japan-s-in-second-quarter-capping-three-decade-rise.html>>.
- Kardiman, Drs dkk, 2006, *Ekonomi Dunia Keseharian Kita*, Penerbit Yudistira.
- Kelly, David, *Public Intellectuals and Citizen Movements in China in the Hu-Wen Era*, Pacific Affairs Vol. 79, no. 2, Summer 2006.
- Komaruddin Hidayat, *Demokrasi Model China*, diunduh pada 25 April 2011,
<<http://internasional.kompas.com/read/2010/02/13/05120239/Demokrasi.Model.China>>
- Korten, David C. *The Post Corporate World: Kehidupan setelah kapitalisme*, Jakarta;Yayasan Obor Indonesia, 2005
- Korten, David C. *Menuju Abad ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global*, Yayasan Obor Indonesia, 2002
- Kuisel, Richard, 1993, *Seducing the French: the Dilemma of Americanization*, Berkeley; University of California Press.
- Labib, Rahmat S. *Privatisasi dalam Pandangan Islam*, Ciputat: Wadi Press,2005
- Laporan UNDP, *Corruption and Integrity Improvement Initiative in Developing Countries*, OECD Development Center, New York.
- List of Political Parties in People's Republic of China*, diunduh pada 25 Oktober 2011,<http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_parties_in_the_People%27s_Republic_of_China>
- Majalah Tempo, *Liputan Khusus Ekonomi China : Kapitalisme Buatan Cina*, Tempo Edisi 23 – 29 Januari 2012.
- Meisner, Maurice, 1996, *The Deng Xiaoping Era. An Inquiry in the Fate of Chinese Socialism, 1978-1994*, Hill and Wang Inc., US.

- Mittler, Rana, 2011, *China Modern Menguasai Dunia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Martinussen, John, 1997, *Society, State & Market: A Guide to Competing Theories of Development*, London; Zed Books.
- Max Weber: *An Introduction to His Life and Work*. Chicago; University of Chicago Press.
- Micklethwait, John dan Adrian Wooldridge, *Masa Depan Sempurna: Tantangan dan Janji Globalisasi*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2007
- Nolan, Peter. 2001. *China and the Global Economy*., New York: Palgrave.
- Perkins, John. 2009. *Membongkar Kejahatan Jaringan Internasional*, Jakarta:Ufuk Press.
- Peter Binns, *State Capitalism*, diunduh pada 23 April 2017, <<http://www.marxists.de/statecap/binns/statecap.htm>>
- Petras, James dan Henry Veltmeyer. 2002. *Imperialisme Abad-21*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Polanyi, Karl. 2003. *Transformasi Besar: Asal-Usul Politik dan Ekonomi Zaman Sekarang*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Price, Don C, 1974, *Russia and the Roots of the Chinese Revolution*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rafsanjani, Hashemi. 2008. *Aspek-aspek Pokok Agama Islam: Pandangan Islam Tentang HAM, Hegemoni Barat dan Solusi Dunia Modern*, Bandung: Nuansa.
- Rais, Mohammad Amien. 2008. *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia*, Yogyakarta: PPSK Press.
- Restorasi Meiji: *Suatu Model Pembelajaran Modernisasi Dari Jepang*, diunduh pada 07 Oktober 2011, <http://saripedia.wordpress.com/2011/05/12/restorasi-meiji-suatu-model-pembelajaran-modernisasi-dari-jepang/>
- Saidi, Zaim. 1996. *Konglomerat Samson-Delilah: Menyingkap Kejahatan Perusahaan*, Bandung:Mizan.
- Saul, John Ralston. 2008. *Globalisme dan Penemuan Kembali Dunia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Soepriyatno. 2008. *Nasionalisme dan Kebangkitan Ekonomi*, Jakarta: Inside Press.
- Soros, George. 2007. *Open Society: Reforming Global Capitalism*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
- Stiglitz, Joseph, 2002, *Globalization and its Discontents*, New York; W.W. Norton.
- Stiglitz, Joseph E. 2007, *Making Globalization Work*, Bandung: Mizan.
- Syam, Firdaus. 2007. *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- The Concise Encyclopedia of Economics*, diunduh pada 23 April 2012, <<http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Smith.html>>
- The Economist* (15-21 Februari 2003), "Is The Wakening Giant a Monster", hal, 63 -65.
- Treaty of Kanagawa*, diunduh pada 07 Oktober 2011, <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/310822/Treaty-of-Kanagawa>
- Wolf, Martin. 2007. *Globalisasi: Jalan Menuju Kesejahteraan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wibowo, I, 2004, *Belajar Dari Cina : Bagaimana Cina Merebut Peluang Dalam Era Globalisasi*, Jakarta ; Penerbit Buku Kompas.
- Wibowo, I, *Negara dan Masyarakat Bercermin Dari Republik Rakyat Cina* (Jakarta: Gramedia dan Pusat Studi Cina, 2000, Bab. 4.)
- Wibowo, Ignatius, "Party Recruitment": *From Crisis to Private Entrepreneurs*, dlm. Wang Gungwu dan Zheng Yongnian (eds.), *Damage Control. The Chinese Communist Party in the Jiang Zemin Era*, 2003, Singapore: East Asia Institute.
- Winarno, Budi, 2004, *Globalisasi: Wujud Imperialisme Baru: Peran Negara dalam Pembangunan*, Tajidu Press.
- Winarno, Budi. 2009. *Pertarungan Negara Vs Pasar*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zou Keyuan, "Why China's Rampant Corruption Cannot Be Checked by Laws Alone," in Wang Gungwu dan Zheng Yongnian (eds.), *Damage Control. The Chinese Communist Party in the Jiang Zemin Era* (Singapore: Eastern Universities Press, 2003).

TENTANG PENULIS

Penulis pertama bernama Dani Fadillah, lahir di Sumatera Utara pada tanggal 29 Juni 1988. Putra bungsu dari lima bersaudara ini menyelesaikan pendidikan S1 di Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menyelesaikan pendidikan S2 di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Saat-saat menjadi mahasiswa penulis menghabiskan waktunya untuk menjadi aktifis dalam dunia pergerakan mahasiswa dengan berkarir di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini penulis menempuh karir sebagai Dosen di prodi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan masih menyempatkan diri untuk datang sebagai pembicara di berbagai pertemuan ilmiah baik lokal hingga internasional.



Penulis kedua bernama Kumajaya, lahir di Yogyakarta pada tanggal 28 Juli 1987. Putra sulung dari empat bersaudara ini menyelesaikan pendidikan S1 nya di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan kemudian melanjutkan pendidikan S2 nya di Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saat masih aktif kuliah penulis menghabiskan waktunya untuk menjadi aktifis di Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, penulis juga telah banyak mendalami pengetahuan terkait politik ekonomi di Negara-negara Asia Timur. Saat ini penulis kerap melaksanakan perjalanan akademik di berbagai Negara Asia.

